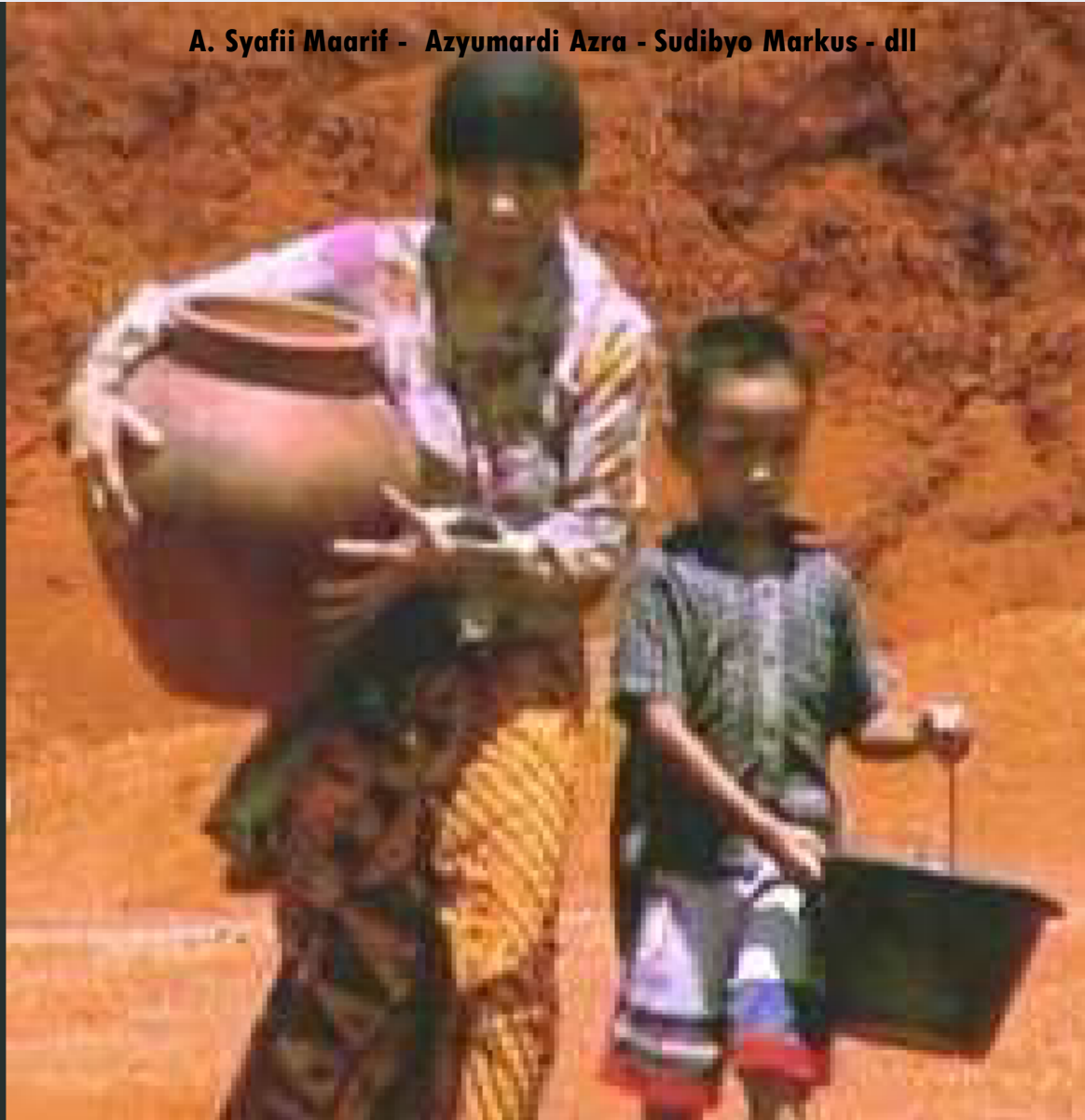


A. Syafii Maarif - Azyumardi Azra - Sudibyo Markus - dll



ISLAM, GOOD GOVERNANCE, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

**Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam,
dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal**

MAARIF *Institute*
for Culture and Humanity

Editor :

Siti Sarah Muwahidah
Sudibyo Markus Azyumardi Azra - Syafii Maarif - dll
Zakiyuddin Baidhowy



The Asia Foundation



ISLAM, GOOD GOVERNANCE, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam,
dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal



ISLAM, GOOD GOVERNANCE, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam,
dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal

Penulis:

A. Syafii Maarif
Azyumardi Azra
Sudibyo Markus
dll

Editor:

Siti Sarah Muwahidah
Zakkiyudin Baidhowy

ISLAM, GOOD GOVERNANCE, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif
di Tingkat Lokal

©MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007

Hak cipta dilindungi Undang -Undang
All rights reserved
Cetakan I, September 2007

Diterbitkan oleh:

MAARIF Institute for Culture and Humanity
Gedung Wisma Nusantara, Lantai 7
Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350
Telp. 62-21-3914004, Fax. 62-21-3914003
<http://www.maarifinstitute.org>
e-mail: maarif@maarifinstitute.org

Bekerjasama dengan:
The Asia Foundation

Editor:

Siti Sarah Muwahidah
Zakkiyudin Baidhowy

Layout dan Desain Sampul:
Widyawan Sigitmanto

ISBN:

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan / Siti Sarah Muwahidah,
Zakkiyudin Baidhowy.

-- Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.

xxii+179 hlm; 24 cm

ISBN: 978 - 979 - 97766 - 2 - 4

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

Raja Juli Antoni _____ ix
(*Direktur Eksekutif MAARIF Institute*)

John Brownlee _____ x
(*Direktur Islam dan Pembangunan The Asia Foundation*)

Robin L. Bush _____ xii
(*Deputi Country Representative The Asia Foundation*)

PENGANTAR

Kemiskinan, Tanggungjawab Praksis Sosial Islam _____ xv
A. Syafii Maarif

Arah dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia _____ xvii
Aburizal Bakrie

PENDAHULUAN

Islam, *Good Governance* dan Pengentasan Kemiskinan _____ xxi
Editor

BAB I PERAN SOSIAL-POLITIK ORGANISASI MASSA ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Meretas Visi Keberpihakan dalam Pengentasan Kemiskinan: Merajut
Kesepahaman Tanggungjawab Ormas dan Orpol Islam _____ 3
Editor

Orpol dan Ormas Islam, *Good Governance*, dan Pengentasan
Kemiskinan _____ 10
Azyumardi Azra

Gerakan Sosial Muhammadiyah: Strategi dan Agenda Pengentasan
Kemiskinan _____ 14
Sudibyo Markus

BAB II PELAYANAN KESEHATAN DAN AKSES MASYARAKAT MISKIN

Menuju Layanan Kesehatan Pro *Mustadh'afin* _____ 21
Editor

Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin _____ 27
Sri Astuti S. Suparmanto

Pengalaman Pemerintah Kota Pekalongan dalam Pengelolaan
Kesehatan Masyarakat Miskin _____ 41
Dwi Heri Wibawa

Metamorfosa *Penolong Kesengsaraan Oemoem* (PKO) _____ 48
Ibnu Naser Arrohimi

BAB III JALAN TERJAL MENUJU PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Memaknai Pendidikan untuk Semua, Memprioritaskan Pendidikan untuk
Kaum Miskin _____ 57
Editor

Kebijakan Pemerintah Sektor Pendidikan untuk Kelompok
Masyarakat Miskin _____ 63
Suyanto

BAB IV EKONOMI MIKRO SEBAGAI ALTERNATIF BAGI KELOMPOK MISKIN

Memberdayakan si Kecil, Menegakkan Otoritas Kaum Miskin _____ 69
Editor

Akses dan Proteksi untuk Masyarakat Miskin terhadap Modal:
Pengalaman Baitut Tamwil Muhammadiyah
Wiradesa Pekalongan _____ 73
Achmad Su'ud

Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa dan Musthad'afin:
Pengalaman Kopontren Sidogiri ____ 81
HM. Dumairi Noor

BAB V PENGUATAN SUARA WARGA UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK

Kewargaan Demokratis-Partisipatif Mengawal
Kebijakan Publik ____ 89
Editor

Upaya Forum Warga Menyemai Gagasan untuk Perubahan ____ 95
Obeng Nur Rosyid

Forum Warga: Jalan Lain Demokrasi ____ 101
Khairul Anam

Peran Serta Masyarakat dalam Membuat Kebijakan ____ 111
Doni A. Munir

BAB VI MENTRADISIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: TANTANGAN DAN AGENDA

Menumbuhkan Kepercayaan, Membangun Kesetaraan Pemerintah dan
Rakyat ____ 117
Editor

Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mentradisikan Transparansi
dan Akuntabilitas:
Pengalaman Kabupaten Lebak ____ 124
Mulyadi Jayabaya

Meretas Jalan *Good Governance*, Membangun Fondasi Kesetaraan
Relasi Rakyat-Pemerintah: Menengok Kasus Gunungkidul ____ 129
Taufik

Transparansi dan Akuntabilitas, Jalan untuk Meraih Kepercayaan
Masyarakat: Pengalaman di Kota Surakarta ____ 137
Setyo Dwi Herwanto

BAB VII POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

Pokok Pikiran dan Rekomendasi _____ 145

Lampiran

Pembicara dan Peserta (profil lembaga) _____ 149

Profil MI _____ 176

SAMBUTAN

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati Buya Syafii Maarif, Menkokesra, Ir. Aburizal Bakrie, yang dalam hal ini mewakili Wakil Presiden RI, Bapak H. Jusuf Kalla, dan Deputy Country Representative The Asia Foundation, Robin L. Bush, serta rekan-rekan tamu undangan dan peserta konferensi yang saya hormati.

Hal pertama yang akan saya sampaikan atas nama MAARIF Institute adalah ucapan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menghadiri *Konferensi Nasional: Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan* yang akan kita laksanakan selama dua hari ini.

Tujuan acara kali ini adalah untuk melakukan refleksi dan evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan semua. Harapan dalam pelaksanaan konferensi kali ini adalah sebagai forum kita dapat berbagi pengalaman dan kita mendapatkan *lesson learned* dari *best practice* yang selama tiga tahun ini yang kita kerjakan sekaligus dapat melihat verifikasi pengalaman di daerah lain.

Akhir kata, selamat berkonferensi dan semoga melahirkan rekomendasi yang menjadi agenda aksi bersama sehingga mampu mengurai benang kusut bencana kemiskinan di Indonesia.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 26 Agustus 2007

Raja Juli Antoni
Direktur Eksekutif

SAMBUTAN

THE ASIA FOUNDATION

Satu konferensi nasional telah digelar dengan tajuk "Islam, *Good Governance*, dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" pada akhir bulan Agustus 2007; sebuah konferensi yang berusaha mengkaitkan lembaga keagamaan (khususnya kelompok Islam), tata pemerintahan dan kemiskinan. Harapan pada konferensi ini adalah sebuah sintesis atas keterkaitan hubungan antara keterlibatan kelompok Islam dalam mendorong tata pemerintahan lokal. Pemaparan para narasumber tentang kasus-kasus yang ada telah membuktikan hal ini. Oleh karenanya, konferensi ini makin mendorong keterlibatan kelompok Islam dalam upaya perbaikan tata pemerintahan di Indonesia.

Tata pemerintahan seringkali terkait dengan cara pemerintah untuk memberikan layanan dasar yang memadai untuk kelompok miskin sekaligus memberikan jaminan kebijakan yang memastikan kelompok ini bisa mengaksesnya. Oleh karenanya, pelibatan kelompok Islam di dalam tata pemerintahan secara langsung akan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi merupakan masalah serius yang sering dihadapi oleh kelompok miskin. Dengan memperbaiki tingkat layanan dan jaminan layanan yang ada bagi kelompok miskin tentu saja akan mengurangi beban kelompok miskin. Pengalaman narasumber di lapangan telah menghasilkan praktek inovatif yang bisa ditiru atau diaplikasikan.

Buku ini merupakan kumpulan proses, temuan dan pokok pikiran yang terjadi selama Konferensi Nasional berlangsung selama 2 hari. Tentu saja, buku ini memberikan banyak informasi tentang praktek-praktek pelibatan kelompok Islam dalam mendorong tata pemerintahan yang baik dan kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin. Bahkan sejumlah pemerintah daerah telah menggandeng kelompok Islam untuk ikut terlibat dalam memantau tata pemerintahan lokal sebagaimana yang dilakukan oleh kota Pekalongan yang melibatkan NU dan Muhammadiyah di dalam memantau pelaksanaan musrenbang. Inisiatif-inisiatif organisasi kelompok sipil dan organisasi berbasis Islam pun tidak kalah pentingnya untuk dihadirkan. Salah satunya adalah keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam mendorong penyediaan akses pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan. Harapan kami, buku ini bisa menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran untuk memperbaiki pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. The Asia Foundation juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Department for International Development (DfID) atas dukungannya

terhadap penguatan kelompok sipil dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Terima kasih dan selamat membaca.

John Brownlee
Direktur *Islam and Development*
The Asia Foundation

SAMBUTAN

THE ASIA FOUNDATION

Para Pejabat Pemerintah Indonesia;

Para wakil pemerintahan dan donor asing;

Para wakil dari organisasi Islam

Para peneliti dan akademisi pemerhati good governance dan kemiskinan

Para wakil organisasi masyarakat sipil dan forum warga;

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang saya hormati;

Selamat pagi,

Merupakan kebahagiaan bagi The Asia Foundation untuk memberikan sambutan dalam forum penting ini. The Asia Foundation memandang bahwa kontribusi kelompok Islam di dalam proses politik dan pembangunan di Indonesia sangat besar. Keterlibatannya dalam melakukan reformasi sistem politik dan desentralisasi pada pada massa yang lalu memberikan manfaat yang signifikan dalam proses demokrasi yang ada. Bahkan tumbuhnya partai-partai Islam ikut menandai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hanya saja, proses demokrasi akan menjadi timpang apabila tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2007 yang lalu menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun sekitar 2 juta orang tetapi dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi yakni 37,17 juta jiwa. Bahkan Bank Dunia menyatakan banyak terdapat 42 % penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan khususnya yang berpenghasilan antara US\$ 1 – US\$ 2 per orang per hari.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah kelompok Islam, maka kondisi kemiskinan banyak dialami pula oleh umat Islam. Oleh karenanya, sudah saatnya organisasi Islam ikut terlibat dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, berbagai ahli pembangunan mengakui bahwa salah satu kunci penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan adalah peningkatan tata pemerintahan yang baik. Bukti dan temuan yang ada menunjukkan bahwa desentralisasi telah memberikan ruang dan peluang yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karenanya, upaya-upaya untuk pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan dan pelayanan publik yang lebih baik perlu didukung.

Konferensi ini mencoba untuk menampilkan sejumlah inisiatif-inisiatif lokal khususnya yang dilakukan oleh organisasi berbasis Islam dan beberapa pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui perbaikan tata pemerintahan lokal. Bahkan sejumlah pemerintah daerah telah menggandeng kelompok Islam untuk ikut terlibat dalam memantau tata pemerintahan lokal sebagaimana yang dilakukan oleh kota Pekalongan yang melibatkan NU dan Muhammadiyah di dalam memantau pelaksanaan musrenbang. Inisiatif-inisiatif organisasi kelompok sipil dan organisasi berbasis Islam pun tidak kalah pentingnya untuk dihadirkan. Salah satunya adalah keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam menyediakan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kelompok miskin.

Inisiatif-inisiatif lokal ini perlu dipublikasikan lebih luas untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat lebih luas. Harapan kami, forum ini bisa menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran untuk memperbaiki pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini, The Asia Foundation telah bekerja bersama berbagai organisasi berbasis Islam dalam upaya memperbaiki kondisi pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan. Ada sekitar 18 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia yang ikut ambil bagian dalam program ini bersama organisasi kelompok sipil khususnya LSM dan organisasi Islam.

Untuk itu, The Asia Foundation mengucapkan terima kasih kepada mitra lokal dan pemerintah daerah yang terlibat dalam program "Prakarsa Masyarakat Sipil dalam Upaya Pengentasan kemiskinan atau *Civil Society Initiative to againts Poverty (CSIAP)*". Kami sangat bangga dengan hasil-hasil yang dicapai selama ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada MAARIF Institute for Culture and Humanity yang telah mengorganisir acara ini dengan baik serta para narasumber yang mau berbagi ilmu dan pengalamannya untuk kita semua. Akhirnya, kami berharap konferensi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi ajang untuk melakukan kritik dan komentar yang membangun.

Kita berharap dalam rangkaian rekomendasi-rekomendasi dari hasil konferensi ini akan membantu pengembangan *good governance* dan pengurangan

kemiskinan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi tiang utama suksesnya proses reformasi dan demokratisasi tersebut.

Terima kasih dan selamat berdiskusi.

Robin L. Bush
Deputy Country Representative
The Asia Foundation

PENGANTAR

KEMISKINAN, TANGGUNGJAWAB PRAKISIS SOSIAL ISLAM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Menkokesra, Ir. Aburizal Bakrie, perwakilan dari The Asia Foundation, pegiat MAARIF Institute, dan peserta konferensi hari ini yang saya hormati.

Isu mengenai Islam, *good governance*, dan pengentasan kemiskinan itu terkait secara logis, secara teoritik. Tetapi berdasarkan pengalaman empirik kita, belum tentu semua orang Islam itu mempunyai kepekaan sosial. Belum tentu orang Islam itu mempunyai kepedulian sosial yang tinggi walau agamanya mengajarkan itu. Bahkan tidak jarang sebenarnya – saya baru pulang dari Jawa Timur, saya mendapat keterangan dari beberapa aktivis – banyak juga para Kyai yang jadi calo politik untuk berebut kekayaan dengan cara tidak benar. Menurut saya, penyakit semacam ini harus kita bedah. Tadi Pak Menkokesra mengatakan, Islam itu *rahmatan lil alamin*. Itu betul. Namun kenyataannya, jangankan Islam sebagai rahmat alam semesta, yang mencakup semua manusia termasuk yang tidak beragama-Islam, bahkan belum sepenuhnya menjadi rahmat bagi orang Islam sendiri.

Perwakilan dari TAF mengatakan bahwa peran organisasi Islam itu besar karena ada politik Islam, partai politik. Tapi, antar mereka saling cakar, mereka tidak jarang atas nama Islam berebut tulang, berebut rejeki-politik menjadi mata pencaharian. Beberapa hari lalu saya bicara dengan Saudara Sofyan Wanandi. Dia mengerti peta ekonomi perusahaan Indonesia. Dia mengatakan “Pak, di DPR kita ini yang tidak baik pasti ada dan yang baik tapi tidak berdaya pasti ada.” Prilaku anggota DPR yang sudah naik haji beberapa kali dan yang tidak haji hampir serupa. Sulit sekali kita mencari teladan-teladan di negeri ini.

Saya rasa dengan adanya bantuan dari TAF dan dengan adanya penelitian di beberapa daerah tingkat dua yang dilakukan oleh MAARIF Institute, kita akan melihat bagaimana peta kondisi sesungguhnya daerah tingkat dua tersebut. Dari informasi yang saya terima, dari 492 daerah tingkat dua itu yang sudah menjalankan prinsip *good governance* ternyata kecil sekali. Tadi Pak Menkokesra mengatakan, apa ukurannya? Ukur dengan yang standar saja: apakah disitu ada akuntabilitas? Apakah disitu ada keterbukaan? Apakah disitu ada partisipasi masyarakat? Apakah disitu ada kerjasama antara

eksekutif-legislatif? Memang jika melihat UU otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan dirinya, mensejahterakan masyarakat. Namun pasti ada “tetapi”nya. Tidak jarang saya dengar beberapa bupati mungkin lebih banyak di Jakarta dibanding mengurus daerahnya. Inilah persoalan-persoalan yang menurut saya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perlu ada kepemimpinan yang efektif untuk mewujudkan *good governance*.

Dari beberapa daerah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan praktik *good governance* tadi, ternyata faktor yang paling penting adalah adanya kepemimpinan yang efektif yang memiliki visi jauh ke depan, ada *leadership* yang cukup kokoh.

Artinya apa? Contoh yang sedikit di Kabupaten/Kota itu adalah bukti bahwa kita bisa bangkit. Saya tidak tahu nanti, tahun 2009 dimana partai politik sibuk berkampanye lagi. Memang sulit mendapatkan negarawan yang memiliki keseriusan, jujur, dan ikhlas. Indonesia, negeri khatulistiwa ini masih cantik, walaupun sudah dirusak oleh anak-anaknya sendiri, masih tetap ada harapan untuk bangkit dengan catatan kita munculkan, kita tumbuhkan kepemimpinan yang efektif di daerah-daerah, walau di tingkat pusat masih banyak persoalan.

Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia penduduknya sekitar 200 juta dan Malaysia mungkin hanya 75 juta. Dari pengalaman saya membaca, alasan kenapa Malaysia dan Timur Tengah lepas dari krisis ialah karena mereka tidak mau menyembah kepada IMF. Publik boleh saja tidak sepakat, tapi pendapat-pendapat seperti ini mohon-mohon diperhatikan.

Mudah-mudahan dengan dialog hari ini dan besok dapat membuahkan hasil yang tajam tapi sopan. Ketidaksopanan sama halnya dengan mengkhianati *sunnatullah* dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Prof. Ahmad Syafii Maarif

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebelum saya sampaikan sambutan atas nama Wakil Presiden, saya ingin menawarkan juga kerjasama dari pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Bakrie untuk Bangsa kepada Maarif Institute. Karena saya juga berkeyakinan bahwa Islam itu betul-betul seperti juga yang tadi disampaikan Bapak Syafii Maarif, yaitu *rahmatan lil alamin*. Tidak boleh ada anggapan Islam itu radikal, Islam itu tidak bersahabat, dsb.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Jusuf Kalla, dikarenakan kesibukannya maka beliau dengan terpaksa tidak bisa hadir dalam acara seminar ini. Akan tetapi beliau memberikan dukungan sepenuhnya dan mengutus saya untuk mewakilinya dalam acara yang sangat penting ini. Seminar semacam ini saya kira patut kita sambut dengan baik. Saya yakin saudara-saudara yang datang dari seluruh Indonesia bisa membuat suatu rumusan-rumusan yang baik.

Topik yang saudara-saudara ajukan dalam seminar ini terkait dengan tiga tema besar, yaitu Islam, *good governance*, dan langkah-langkah untuk menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, maka saudara-saudara ingin melihat dan merumuskan Islam secara praktis, bagaimana cara menggunakannya dan juga merealisasikan suatu prinsip-prinsip tersebut dalam rangka membentuk suatu sistem dan perilaku pemerintahan yang baik dan kita harapkan dapat terjadi. Merealisasikan prinsip-prinsip Islam dan *good governance* dapat menurunkan angka kemiskinan di dalam masyarakat kita.

Saya sepakat dengan tema yang diusung. Meskipun angka kemiskinan sudah menurun, mungkin 16,67% atau 36,75 juta orang, namun masyarakat miskin masih besar sekali jumlahnya. Tentu di dalam menanggulangi kemiskinan kita tidak bisa menurunkan kemiskinan dengan serta merta. Kita menurunkan kemiskinan dengan cara *step by step*. Dan jika kita lihat, salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals* yaitu mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2015, maka kita bisa mengharapakan, melakukannya, dan mencapainya.

Saya punya keyakinan penuh pada tahun 2015 kita bisa mengurangi angka kemiskinan dari 16,67% menjadi tinggal 8%. Akan tetapi 8% dari 300juta

orang *is still a big amount*, jadi masih tetap banyak penduduk miskin yang akan kita turunkan angkanya. Niat dan pencarian yang saudara-saudara ingin melakukan itu perlu didukung oleh semua pihak.

Bapak Syafii Marif melakukan kritik terhadap (prilaku) partai politik dan politisi serta organisasi Islam politik. Akan tetapi bagaimanapun juga suatu kebijakan dari pemerintah dan tindakan yang akan diambil, tidak akan bisa jalan bila tidak didukung oleh insan-insan politik dan partai-partai politik. Bagaimanapun juga status dan *performance* dari pada insan politik dan partai politik tetap harus bisa kita (pemerintah) gandeng. Dengan “menggandeng” partai-partai politik dan insan-insan politik, *policy-policy* yang akan diambil oleh pemerintah akan mendapatkan dukungan.

Indonesia adalah suatu negeri dengan suatu masyarakat muslim terbesar, yang sejak sembilan tahun terakhir telah menjadi suatu negara yang demokratis. Saya, dalam benak saya mengatakan, apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, dapat membuat suatu negara ini menjadi demokratis asalkan kita tetap menjalankannya dengan suatu konsistensi. Satu-satunya negara yang bisa kita bandingkan dengan Indonesia untuk melakukan suatu *droves (drive?)* yang lebih daripada Indonesia adalah India. Sedangkan dibanding negara yang lain, dalam melakukan pembangunan masalah demokratisasi, Indonesia yang tumbuh paling tinggi di dunia, kecuali India tadi.

Dalam suatu pencarian dan pandangan yang implisit pada suatu tema seminar, Islam tidak lagi dilihat secara ideologis. Islam tidak lagi dipertentangkan dan tidak boleh dipertentangkan dengan NKRI. Kenapa tadi saya langsung menawarkan kerjasama dengan MAARIF Institute, karena disitu ada bendera merah putih, di dalam seluruh tayangan PSA dan filler yang ditampilkan MAARIF Institute ada bendera merah putihnya.

Yang saudara-saudara ingin lakukan, saya yakin adalah membumikan Islam, membuat suatu Islam yang relevan dalam mengatasi masalah-masalah praktis yang paling penting untuk dihadapi, yaitu mengatasi kemiskinan yang masih menimpa 36,75 juta rakyat Indonesia. Bagi saya, itulah cara pandang dan sikap yang sangat baik yang harus kita perjuangkan terus. Dengan begitu, maka Islam menjadi *rahmatan lil allamin* atau rahmat bagi semuanya, termasuk suatu rahmat bagi mereka yang masih tersisihkan, rahmat bagi mereka yang memang masih membutuhkan suatu uluran tangan dari kita semua.

Terlebih lagi, mencari jawaban dalam menggulangi kemiskinan bukan dengan cara pemberian uluran belas kasihan atau *charity*. Saya baik didalam diskusi maupun agenda pembahasan memerangi kemiskinan dalam pemerintah selalu mengatakan bahwa *charity* yang kita lakukan tidak bisa mengentaskan kemiskinan, tidak *sustainable* (berkelanjutan). Oleh karena itu, *charity* harus

digabungkan dengan pemberdayaan masyarakat. Saudara-saudara telah mengatakan, pemberian belas kasihan tidak kita cari. Yang kita cari adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan sistem dan perilaku pemerintahan yang baik (*good governance*) serta kemudian kita berdayakan masyarakat tersebut, sehingga mereka dapat mengangkat dirinya dari kemiskinan. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita semua dengan suatu sumbangan pemikiran yang bisa saudara-saudara berikan dalam seminar ini. Saya berharap besar, saya yakin bahwa kita akan bisa melangkah ke depan lebih baik lagi di dalam menegakkan prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan tadi.

Saudara-saudara sekalian, panitia meminta saya untuk berbicara mengenai aspek dan garis besar kebijakan pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, saya akan mulai dengan dua pandangan dasar atau paradigma kebijakan pengentasan kemiskinan. Pertama, kemiskinan dapat diatasi jika kita bisa berhasil mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, katakanlah diatas 7% pertahun. Pertumbuhan ekonomi dapat memperbesar kue ekonomi nasional, dengan kue yang semakin besar, kita dapat menikmati porsi yang semakin besar, yang dapat membantu semua rakyat, termasuk rakyat miskin untuk menolong mereka keluar dari kemiskinan. Kedua, bahwa kemiskinan dapat diatasi hanya jika kita membuat suatu kebijakan yang langsung menolong rakyat miskin. Orang miskin harus langsung menjadi sasaran program-program kongkrit. Kedua hal ini dapat saling memperkuat.

Menyadari pentingnya pertumbuhan ekonomi, kebijakan *pro poor* untuk perbaikan infrastuktur mesti diperhitungkan sebagai sarana mensejahterakan masyarakat. India sebagai negara berkembang memiliki standar penghasilan, bagi lulusan S1 berpenghasilan 50 -150 USD per bulan. Penghasilan merupakan pelajaran yang dapat kita petik untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Fokus pemerintah tidak hanya pada investasi tetapi pertumbuhan ekonomi pun penting.

Kesungguhan pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan terbukti dengan memprioritaskan dana bagi orang miskin. Pada tahun 2004 alokasi dana APBN untuk masalah kemiskinan adalah 18 trilyun dan jumlah ini meningkat. Pada tahun 2007 dana yang disiapkan dari APBN untuk pengentasan kemiskinan 58 trilyun. Tidak kurang 76,4 juta orang dapat dilindungi oleh asuransi kesehatan untuk orang miskin dan yang mendekati miskin. Sejumlah 40% orang Indonesia dibiayai untuk dapat menikmati kesehatan, pendidikan, dan infrastuktur. Kebijakan yang dapat langsung mengurangi kemiskinan melalui program bidang pendidikan gratis 9 tahun, BOS, dan asuransi kesehatan.

Pemerintah menggulirkan dana BBM 27% bagi masyarakat tingkat menengah sebagai modal bergulir dan yang tepat sasaran hanya 22%. Maka ada penghematan sebesar Rp. 1 triliun. Melalui program yang *pro poor*, ada sekitar 500 ribu keluarga miskin dapat terbantu. Program pemerintah lainnya yang dianggap berhasil adalah P2KP dan PPK. Program ini menyedot banyak sumberdaya melalui pembukaan lapangan pekerjaan untuk sekitar 12 juta orang. PNPM akan dilaksanakan sampai 2015 dengan cakupan yang lebih besar terdiri lebih dari 6000 desa. Program PPK dan P2KP ditambah program pertanian, pesisir, dan nelayan memberikan langsung anggarannya kepada pihak kecamatan. Bantuan dari pusat sebesar 250 juta per tahun diberikan kepada setiap desa bertujuan untuk pengembangan daerah. Total dana terserap di tingkat lokal (langsung kepada masyarakat desa) sebesar 60 triliun.

Saya keliling desa untuk melihat dampak langsung dari program PNPM yang dapat disebarkan sebagai tenaga pendamping bagi masyarakat desa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini bukan program baru tetapi memperluas jangkauan pemberian bantuan dengan target sasaran tahun 2009 mencapai sekitar 62.000 desa dan merupakan *soft opening* yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa sendiri. Contohnya antara lain berupa perbaikan infrastruktur jalan desa, sebagai sarana untuk penghubung transportasi dan pengadaan air minum.

Solusi bantuan yang diberikan untuk desa-desa adalah dengan cara memberikan informasi dan mengajarkan teknis pelaksanaan untuk membangun desa. Program tersebut memerlukan adanya tenaga pendamping. Semua bukanlah sebagai mimpi yang tidak mungkin dapat kita laksanakan, maka perlunya dukungan dari organisasi massa Islam, LSM, dan pemerintah. Harapan saya perusahaan dan pemerintah dapat membuat infrastuktur yang murah.

Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita buka konferensi nasional kali ini.

Ir. Aburizal Bakrie
Menko Kesra RI

PENDAHULUAN

Islam, Good Governance dan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40 persen dari penduduk (lebih dari 110 juta orang) Indonesia hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari (World Bank, 2005, policy brief “*Poverty Reduction*”).

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (sektor swasta, NGO, donor agency). Bahkan organisasi dunia seperti PBB telah mendorong negara-negara di dunia untuk memerangi musuh kemiskinan melalui berbagai forum. Diantara hasilnya ialah telah dikeluarkannya *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam memerangi kemiskinan. Meskipun demikian, kemiskinan di Indonesia masih dipandang sebagai tugas pemerintah dan kelompok tertentu yang memperjuangkan (seperti LSM dan media massa) bahkan si miskin sendiri dan bukan menjadi kewajiban bersama untuk mengatasinya. Karena keterbatasan peran di dalam pelibatan pengentasan kemiskinan, program-program yang dilakukan oleh pemerintah pun seringkali tidak berkesinambungan dan sporadis bahkan cenderung tidak tepat. Oleh karenanya, kondisi kemiskinan di Indonesia nampaknya tidak mengalami perubahan (kemajuan) dibanding kondisi lainnya, seperti perkembangan demokrasi. Bahkan dalam keadaan demokrasi yang berubah pun kemiskinan di Indonesia tetap menunjukkan gambaran yang memprihatinkan.

Sebagai sebuah isu yang integral, proses perubahan politik dan kemiskinan seharusnya menjadi bagian yang berbanding lurus dengan demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kondisi yang ada telah menunjukkan bahwa proses demokrasi yang telah membawa perubahan sistem politik masih belum berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan politik di Indonesia didorong oleh keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak, salah satunya adalah organisasi massa Islam (OMI). Kekuatan massa OMI, baik yang berbasis NU maupun Muhammadiyah, telah mendorong perubahan sistem politik yang ada. Bahkan saat ini, ada gejala kuat memobilisasi kekuatan sosial kedua organisasi tersebut untuk kepentingan politik praktis (baca: partai politik) yang menyebabkan dinamika tersendiri di kalangan internal masing-masing.

Dalam konteks ini, partisipasi bahkan peran OMI di dalam perubahan politik Indonesia, demokratisasi, dan good governance sangat signifikan. Lalu

bagaimana dengan keterlibatan OMI dalam proses membangun demokrasi ekonomi? Tentunya hal ini perlu dijawab dengan penelitian yang memadai. Yang pasti, fakta berbicara bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim sehingga bisa dipastikan yang menjadi korban pemiskinan struktural itu adalah sebagian besar masyarakat Muslim. Namun keberhasilan OMI mendorong aspirasi politik belum berdampak paralel terhadap perjuangan ekonomi masyarakat miskin. Kondisi ini memunculkan asumsi bahwa OMI beserta *stakeholder* yang ada belum memiliki platform apalagi agenda aksi sistemik memperjuangkan perubahan ekonomi yang berpihak kaum miskin.

Didasari fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas, Maarif Institute melaksanakan Konferensi Nasional: “Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan”. Konferensi yang diikuti oleh sejumlah besar aktivis organisasi massa Islam, NGOs, dan instansi pemerintah yang *concern* dalam proses mendorong serta mengadvokasi kebijakan pro masyarakat miskin ini bertujuan untuk memfasilitasi ruang dialog antara kelompok masyarakat dan pemerintah, tempat untuk berbagi pengalaman, dan mengeksplorasi model keterlibatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesemuanya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin, serta terbentuknya program-program pengentasan kemiskinan yang lebih sistematis.

Buku ini berusaha untuk merekam berbagai pengalaman, kritik, refleksi-refleksi dan rekomendasi yang dipaparkan oleh pembicara, narasumber, dan peserta selama konferensi. Hanya beberapa makalah dan presentasi terpilih yang dimuat. Buku ini mengulas enam topik berbeda terkait pengentasan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tema sesi-sesi dialog dalam konferensi tersebut. Tiap bab diawali dengan essay pendek untuk mereview keseluruhan proses dan dialog yang terjadi, sembari berusaha menampilkan benang merah dari presentasi-presentasi dan makalah-makalah para pembicara. Sementara pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang merupakan hasil diskusi partisipan konferensi dirangkum dan ditampilkan dalam bab tujuh.

Pada akhirnya kami berharap agar upaya yang kami lakukan ini dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Semoga.

Jakarta, Oktober 2007

Editor



MERETAS VISI KEBERPIHAKAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN: Merajut Kesepahaman Tanggung Jawab Ormas dan Orpol Islam

Persatuan Bangsa-Bangsa mencanangkan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) sejak tahun 2000. Kesepakatan bersama ini pada hakikatnya merupakan tekad bangsa-bangsa di dunia untuk memahami kemiskinan dan cara-cara manusiawi untuk mengatasinya. Inilah pekerjaan besar mengawali abad 21.

Pada saat yang sama, perubahan iklim global (*global warming*) menengarai semakin besar dan luasnya tantangan untuk pengentasan kemiskinan. Keduanya bersumber dari sistem sosial-ekonomi dan sistem politik yang bukan hanya gagal, bahkan juga hancur. Kita kini hidup dalam suatu masa yang paling “menakjubkan” sepanjang pengalaman manusia. Sebagai suatu spesies, kita sedang menghadapi ancaman bagi seluruh spesies manusia dan non-manusia, peluang sekaligus keniscayaan untuk menerima tanggung jawab peran dalam membawa dunia ini agar bekerja untuk semua manusia dan alam semesta.

Tujuh tahun akan berlalu dalam perjalanan MDGs. Dalam separuh perjalanan ini problem kemiskinan di Indonesia - sebagai salah satu negara yang meratifikasi MDGs - masih jauh dari terentaskan. Dalam beberapa aspek bahkan kondisinya makin runyam. Tentu saja, situasi semacam ini tidak boleh dibiarkan mengingat capaian MDGs tinggal delapan tahun lagi. Ini membawa semua warga negara untuk membuka diri terhadap berbagai kemungkinan berbagi tanggung jawab untuk secara bersama-sama menjawab problem pengentasan kemiskinan.

Memang, sejatinya tanggung jawab untuk menanggulangi kemiskinan ada di pundak negara. Tanggung jawab ini secara normatif sejak awal telah dicanangkan oleh para pendiri negara ini dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945: negara bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, menangani dan memelihara orang-orang miskin serta anak-anak terlantar. Landasan normatif ini mengandaikan peran negara *penuh* dalam mengurangi jumlah orang-orang miskin, sekaligus membuat mereka hidup layak dan sejahtera. Negara tidak dapat lari dari tanggung jawab ini dengan dalih kekurangan sumber daya finansial untuk pembiayaan program-program kesejahteraan umum di seputar tiga ranah: peningkatan pendapatan perkapita, kesehatan masyarakat, dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Meskipun demikian, kenyataan memberikan kesaksian bahwa negara tidak sepenuhnya optimal, jika tidak dapat dikatakan mandul, memerankan diri dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam situasi semacam ini, kekuatan-kekuatan masyarakat sipil dan masyarakat politik menjadi mungkin dan niscaya terlibat di dalamnya. Membiarkan negara bekerja sendiri sama dengan apatisisme dan pemasabodohan atas kondisi sebagian warga negara ini dalam deprivasi dan penderitaan sosial yang terus menggejala. Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, khususnya Islam, yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU, dan kekuatan-kekuatan masyarakat politik yang diwakili oleh organisasi-organisasi politik Islam dapat berbagi peran yang signifikan dan bekerjasama dengan negara untuk mengatasi isu-isu kemiskinan dan pemiskinan dalam kerangka mencapai bangsa yang makmur berkeadilan, dan adil yang berkemakmuran.

NU-Muhammadiyah: Sinergi Kapital, Manajemen, dan Gerakan Sosial

Tidak bekerjanya organ-organ negara dalam menghadapi isu-isu kemiskinan dan pengentasannya secara maksimal telah menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, seperti dikemukakan Marpuji Ali, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, masih ada secercah harapan yang dapat disandarkan pada partisipasi proaktif kekuatan-kekuatan masyarakat sipil Islam. Utamanya dua organisasi massa terbesar Muhammadiyah dan NU. Dua organisasi ini sudah lama berkiprah bahkan sejak negara ini belum terbentuk secara politik. Melalui berbagai lembaga amal usaha baik di bidang pendidikan, kesehatan dan santunan sosial, Muhammadiyah dan NU terus memberi kontribusi bagi negara dan bangsa ini.

Seiring berjalannya waktu, perubahan sosial yang terus terjadi, serta pergeseran-pergeseran peran sosial dan politik dua ormas ini, berbagai kritik internal dan eksternal mulai bermunculan. Kritik-kritik itu secara umum berkisar pada kecenderungan-kecenderungan wacana dan gerakan mereka. Antara lain dapat disebutkan: 1) sebagai dua ormas Islam terbesar di negeri ini, Muhammadiyah dan NU ikut serta memberikan andil terhadap kantong-kantong kemiskinan yang melanda warga umat Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Junaedi Hasan dari Cirendeui. Dalam situasi semacam ini muncul pertanyaan apakah Muhammadiyah dan NU pantas memikul beban pengentasan kemiskinan padahal sebagian warganya juga miskin; 2) munculnya kekecewaan terhadap peran NU dan Muhammadiyah dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya berkaitan dengan isu dan gerakan pengentasan kemiskinan. Menurut Zulfa (salah seorang peserta), sepertinya, dua organisasi ini sibuk dengan rutinitas mengurus amal usaha mereka sendiri yang jumlahnya tidak dapat dibilang sedikit; 3) NU dan Muhammadiyah juga menghadapi kendala dalam penegakkan *good governance* karena transparansi dan akuntabilitas belum

sepenuhnya diterapkan dalam berbagai aksi dan aktivitas organisasi. dan 4) pasca reformasi, semakin menggejala bahwa NU dan Muhammadiyah telah terkooptasi oleh negara, keduanya makin kurang kritis apalagi berani berhadapan dengan negara; dan 5) kemesraan hubungan NU dan Muhammadiyah hanya sebatas pada tingkat elit, dan masih “bergejolak” di tingkat akar rumput. Menurut Nandang Suherman ini merupakan kendala dalam kerjasama pengentasan kemiskinan, karena secara nyata kemiskinan sangat dirasakan pada level ini.

Bangsa ini, umat Islam khususnya, sedang mengalami kebingungan dalam dilema antara pesimisme dan optimisme. Mungkinkah nasib bangsa ini dapat menjadi lebih baik di masa akan datang, sementara para penggede Muslim dalam dua ormas itu sendiri tidak luput dari masalah kemiskinan moral? Menyesali apa yang telah terjadi absah adanya, namun berkubang dalam penyesalan tanpa akhir bisa membuat bangsa ini frustrasi. Berpikir positif dan mulai bekerja membenahi problem sesungguhnya yang kini hadir di depan mata - kemiskinan dan pemiskinan - menuntut dua ormas Islam ini melakukan berbagai perubahan krusial berkaitan dengan peran sosial dan politik mereka.

Dalam bidang sosial, NU dan Muhammadiyah memiliki cukup peluang dan kesempatan bagus untuk melakukan reorientasi perannya sebagai bagian dari *civil society*. Reorientasi ini bermaksud untuk menyadarkan kembali pada visi dan spirit gerakan sipil kedua ormas ini dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Mengurus amal usaha dari pesantren, masjid, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain itu penting, namun bukan untuk terjebak pada rutinitas. Semangat membela dan memberdayakan masyarakat tetap harus dijaga dan selalu diperbarui dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang baru. Dengan cara ini, organisasi makin hidup, ekspresi aksinya terus membangkitkan, dan gerakannya menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan-gerakan serupa di tengah-tengah masyarakat.

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid, dan kini tajdid itu tampak pada pengorganisasian kapital dan manajemen amal usaha, meskipun terlihat agak usang dalam wacana keislaman. Sementara itu, NU bergerak satu langkah lebih maju dalam wacana keislaman dan pengembangan model-model baru gerakan sosialnya. Secara potensi, dua organisasi massa Islam ini memiliki modal yang dapat dipertemukan untuk melahirkan aksi baru pengentasan kemiskinan. Kekuatan kapital dan manajemen Muhammadiyah bisa disinergikan dengan kekuatan wacana dan gerakan sosial NU. Melalui sinergi ini, demikian ungkap Sudibyo Markus, Ketua PP Muhammadiyah. Dua ormas ini sangat layak diandalkan untuk mengembangkan program-program gerakan sosial yang inovatif dan kreatif, baik pada skala advokasi maupun pemberdayaan masyarakat dhuafa di perkotaan maupun pedesaan.

Untuk menjaga sinergi ini, Muhammadiyah dan NU, sebagaimana anjuran Azyumardi Azra, perlu memberi peluang bagi kiprah dan kepemimpinan kaum muda yang dinamis dan progresif. Belakangan dalam dua ormas ini muncul suara-suara vokal dari anak-anak muda dengan pemikiran yang terbuka, dan pergaulan lintas kultural. Meski muncul reaksi berlebih dengan stigma “liberal” kepada kaum muda NU dan Muhammadiyah - seperti JIL dan JIMM sekadar menyebut contoh - percikan-percikan pikiran dan aksi mereka bisa menjadi pangkal perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Di kalangan mereka, muncul kegelisahan intelektual yang merepresentasikan pemikiran keagamaan transformatif dengan keberpihakan yang sangat jelas kepada kaum mustadh`afin. Pemikiran keagamaan transformatif ini bisa menjadi modal bagi pengembangan fiqh advokasi dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana diusulkan oleh Sumiati, Ketua PW Aisyiyah Jawa Timur.

Reorientasi gerakan praksis sosial juga dapat berlaku pada skala pengembangan filantropi untuk keadilan sosial. NU dan Muhammadiyah terang saja memiliki kapital yang cukup besar untuk penguatan lembaga-lembaga filantropi sosial mereka. Sayangnya, lembaga-lembaga semacam ini, meski telah didukung oleh legislasi negara melalui berbagai undang-undang tentang zakat dan wakaf, namun mereka umumnya masih menghadapi beberapa kendala antara lain: perihal kemandirian organisasi sipil ini dalam hal sumber pendanaan (kecilnya dukungan sumber-sumber dana lokal dan ketergantungan pada donasi asing) yang dapat menjamin keberlanjutan aktivitas dan prakarsa perubahan sosial - pengentasan kemiskinan - yang diembannya; problem mobilisasi, manajemen dan pemanfaatan sumber dana lokal untuk inisiatif pengentasan kemiskinan dan penegakkan keadilan sosial; dan pengembangan program-program pengentasan kemiskinan.

Pada aras teologis, NU dan Muhammadiyah tentu saja memiliki otoritas, tanpa harus menjadi otoritarian, keagamaan untuk membuat keputusan-keputusan dan fatwa-fatwa menyangkut pentingnya perlawanan terhadap korupsi, penegakkan *good governance* dan pemberantasan kemiskinan. Yang pertama dan kedua telah digalang kerjasama NU-Muhammadiyah di bawah Partnership. NU dan Muhammadiyah juga sudah melahirkan pandangan-pandangan keagamaan, semacam fiqh anti-korupsi melalui Majelis Tarjih dan Bahsul Masail. Namun, pada masalah pengentasan kemiskinan NU dan Muhammadiyah belum menunjukkan keberanian dan terobosan dalam pandangan-pandangan keagamaan mereka, lebih-lebih dalam aksi nyata. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi dua ormas Islam ini untuk melahirkan sebetulnya ijtihad tentang Teologi dan Fiqh Jihad Memerangi Kemiskinan, yang oleh Zulfa dipandang sebagai jihad memerangi pemertadan.

Sejalan dengan kritik kemandulan relasi sosial di tingkat bawah, sudah saatnya Muhammadiyah dan NU melakukan kerjasama akar rumput dalam pemberdayaan sosial untuk pengentasan kemiskinan. Akar rumput di sini

meliputi masyarakat kedua ormas ini pada level ranting dan masjid. Ranting itu penting, meminjam Mustofa W. Hasyim, karena bersentuhan langsung dengan problem sosial masyarakat miskin. Masjid juga penting karena hampir dapat dijumpai di setiap tingkat Rukun Tetangga. Bila ranting dan masjid bisa diberdayakan sebagai basis gerakan pro-*mustadh'afin*, maka program-program dan agenda pengentasan kemiskinan akan berjalan efektif, usul Musthofa Zuhud, Ketua PB NU.. Mungkin ke depan perlu digagas “Masjid untuk orang miskin”, agar orang-orang Islam yang shalat dapat diselamatkan melalui solidaritas dan kepedulian atas kaum papa dan dhuafa, sebagaimana menjadi semangat eksistensial Muhammadiyah dalam kerangka teologi al-Maun.

Jihad Politik: Sinergi Peran Negara, Ormas dan Orpol

Sebagaimana diurai di muka, negara melalui pemerintah memiliki keniscayaan tanggung jawab mendistribusikan kesejahteraan umum dan memelihara (baca: bukan mempertahankan kemiskinan) orang-orang miskin dan anak-anak terlantar. Kritik atas kemandulan peran negara sudah banyak disampaikan para pakar dan cendekiawan. Regim neo-liberalisme bertanggung jawab atas pelucutan peran negara melalui deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi yang dipaksakan melalui bantuan-bantuan finansial asing. Dalam percaturan globalisasi, memang ada upaya-upaya sistematis untuk mengurangi keterlibatan negara di satu sisi. Di sisi lain, tujuan-tujuan milenium yang sangat krusial dalam pengentasan kemiskinan, tidak terelakkan menghendaki peran negara, dan negara tidak dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab utamanya ini, sesuai dengan amanat konstitusi, demikian ungkap Azyumardi Azra.

Peran negara tidak lain dalam rangka advokasi sosial untuk menciptakan tatanan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Peran negara yang dituntut dalam proses pengentasan kemiskinan adalah meredistribusi kekayaan dan pendapatan; memastikan agar dalam proses distribusi tidak satu pun dari faktor-faktor produksi ditekan pembagiannya dan mengeksploitasi faktor lainnya. Sumber daya termasuk tanah, pekerja dan modal sama-sama berharga. Karenanya pemilik tanah, pekerja dan pemilik modal harus berbagi bersama dalam hasil-hasil produksi. Negara juga berperan mendistribusikan sebagian hasil produksi kepada mereka yang tidak dapat memberikan kontribusi dalam produksi karena alasan-alasan seperti cacat sosial, fisik dan ekonomi.

Di samping itu, peran dapat ditunjukkan melalui regulasi pasar. Peran ini di satu sisi merupakan antitesis terhadap Prinsip Libertarian, yang karena alasan hak-hak absolut atas pembagian dunia yang tidak proporsional, maka kepemilikan pribadi sangat layak dan pasar bebas dalam kapital dan pekerjaan secara moral dikehendaki. Peran negara dalam kaitan ini harus bersifat *komplementer* atas peran pasar untuk menjamin alokasi dan distribusi sumber

daya yang adil melalui persaingan etis. Karena itu batasan peran negara yang melengkapi itu adalah untuk menjaga rasa keadilan dan kesejahteraan umum.

Pada skala lokal, otonomi daerah perlu dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk menunjukkan *political will* dan kebijakan-kebijakan yang pro orang miskin. Perumusan dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat lebih fokus untuk program-program dan agenda pengentasan kemiskinan, bukan malah kisruh memperebutkan sumber daya di kalangan segelintir elit lokal. Peran politik ormas Islam - Muhammadiyah dan NU - dapat mendorong advokasi anggaran daerah yang pro orang miskin, usul Sumiati. Advokasi anggaran dalam kerangka good governance bertujuan untuk realokasi anggaran pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Program semacam ini, dilakukan oleh Maarif Institute di Gunung Kidul DIY, Metro Lampung, dan Boyolali Jawa Tengah. Program-program serupa dapat dikembangkan Muhammadiyah dan NU di berbagai daerah.

Sejauh apa yang dapat dimainkan negara dapat dipertanggung jawabkan menurut konstitusi, masyarakat sipil dan masyarakat politik mengimbangnya dalam hubungan resiprokal. Namun, ketika tanggung jawab negara mendekati kegagalan, masyarakat sipil dan masyarakat politik berperan ambil bagian.

Selama ini kekuatan masyarakat sipil Islam - melalui representasi Muhammadiyah dan NU — menunjukkan kontribusi positif untuk menjawab masalah-masalah kemiskinan, meski keduanya mengambil cara berbeda dalam relasinya dengan negara. Muhammadiyah yang sejak lama berkiprah dalam pusat-pusat kekuasaan karena memiliki cukup kapital budaya berupa teknokrat dan birokrat dalam pemerintahan, mengambil peran sebagai mitra yang kritis terhadap negara. Pada saat yang sama, NU mengambil jalan *counter vis a vis* negara. Ketika bandul sejarah memungkinkan kekuatan-kekuatan sipil itu berkontribusi melalui partai politik - PKB dan PAN tentu saja dengan keunikan masing-masing - Muhammadiyah dan NU sepertinya terperosok dalam jerat kooptasi negara. Muhammadiyah dan NU tetap menunjukkan gerakan solidaritas yang memadai saat menghadapi bencana alam tsunami di Aceh dan gempa DIY dan Jawa Tengah. Namun, keduanya sama-sama kurang bersemangat menyuarakan kepentingan kaum tertindas dalam kasus Lapindo Brantas, karena melibatkan pemilik perusahaan besar yang aktif dalam kabinet pemerintahan.

Dalam situasi semacam ini, terbetik harapan Azyumardi Azra agar Muhammadiyah dan NU tetap dapat menjaga jarak sebagai mitra pemerintah yang kritis dan tidak terjerumus dalam tarikan politik praktis yang mengaburkan determinasi etis. Melalui kemitraan kritis ini, kita masih bisa berharap Muhammadiyah dan NU melalui sumber dayanya yang tersebar, dapat

menjadi kekuatan penekan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memihak rakyat miskin. Melalui kemitraan kritis ini juga, dua ormas Islam ini dapat melakukan gugatan atas peran pemerintah pusat dan daerah dalam memerangi kemiskinan, bukan memerangi orang-orang miskin, membela orang-orang miskin, bukan mempertahankan mereka agar tetap miskin, demikian ungkap Nur Hamidah.

Ada wilayah yang sebetulnya sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat politik - organisasi-organisasi politik - untuk menjembatani kesenjangan antara kepentingan rakyat dan negara/pemerintah, yang agak sulit dimainkan oleh masyarakat sipil. Organisasi-organisasi politik dalam hal ini memiliki nilai tambah dalam hal memengaruhi pengambilan keputusan. Sayangnya orpol lebih sibuk dengan urusan masing-masing. Egosentrisme orpol juga menonjol saat lepas dari pemilu dan kursi sudah diperoleh. Namun mereka mendekati rakyat dengan sejuta rayuan dan janji pada masa kampanye. Habis manis sepah dibuang, layak untuk melukiskan hubungan orpol dan rakyat. Interpelasi kasus Lapindo harus berujung kegagalan karena interpelasi hanya dimainkan untuk kepentingan keseimbangan kekuasaan di kalangan orpol sendiri, dan bukan merupakan sikap kepedulian terhadap nasib ribuan rakyat yang termiskinkan.

Meskipun demikian, kita masih berharap agar orpol Islam cepat sadar diri dan taubat dengan cara ambil peranan yang signifikan. Mereka sebetulnya memiliki dua kaki: satu kaki berada di basis massa akar rumput, dan satu kaki lagi berada di dalam pusat-pusat kekuasaan negara baik legislatif maupun eksekutif. Satu kaki orpol dapat menyerap kepentingan-kepentingan massa akar rumputnya, dan satu kaki lagi bisa menyalurkannya melalui kanal-kanal pengambilan keputusan penting di tingkat legislatif dan eksekutif. Hanya orpol yang bisa memiliki fasilitas semacam ini. Dengan cara ini, orpol sangat mungkin mewakili suara rakyat, yang berarti juga suara Tuhan (*vox populi vox dei*), menjembatani kepentingan rakyat dan negara, bukan sebaliknya memanipulasi suara rakyat untuk kepentingan kekuasaan mereka sendiri.

Jadi, pengentasan kemiskinan pada hakikatnya juga merupakan jihad politik yang di dalamnya mengandaikan keniscayaan keterlibatan peran negara/pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator dan redistributor kesejahteraan dan keadilan sosial; peran ormas Islam sebagai mitra kritis atas negara dalam advokasi sosial dan pemberdayaan; serta peran orpol sebagai penyerap suara rakyat dan penyalur kepentingan mereka ke dalam saluran-saluran keputusan legislatif dan eksekutif. Pengentasan kemiskinan tidak akan mungkin terjadi bila relasi antara negara, ormas dan orpol bertepuk sebelah tangan.*** **(Editor)**

ORPOL DAN ORMAS ISLAM, GOOD GOVERNANCE, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Organisasi politik (Orpol) dan organisasi massa (Ormas) Islam memainkan peran penting dalam *good governance*. Dalam perspektif *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi dominasi dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Sebaliknya, konsep dan praktek *good governance* meniscayakan partisipasi Orpol dan Ormas. Karena itu, posisi Orpol dan Ormas sangat strategis dalam penciptaan dan penguatan *good governance* dan pemberantasan kemiskinan serta advokasi sosial lainnya.

Posisi mereka dalam konsep dan praktek *good governance* tidak hanya sebagai *stakeholders* dari kebijakan-kebijakan publik, tetapi mereka juga tak kurang pentingnya terlibat dalam *decision making process* untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Mereka tentu saja tidak mengambil keputusan-keputusan publik yang merupakan wewenang dan otoritas lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi mereka dapat menjadi kekuatan penekan (*pressure groups*) dan sekaligus sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang dapat mempengaruhi proses, hasil, dan pelaksanaan kebijakan publik (*public policies*) tersebut.

Pada satu pihak, era globalisasi yang terus meningkat momentumnya mengakibatkan lembaga-lembaga pemerintahan semakin mengalami kemerosotan dan pembatasan peran dan fungsi. Di Indonesia, kemerosotan peran itu—khususnya pemerintah pusat—berganda dengan berlangsungnya program desentralisasi dan otonomisasi daerah. Akibatnya kekuasaan pusat tidak lagi memiliki peran dan fungsi sebesar di masa lalu dan bahkan pemerintah pusat kian kehilangan kapasitasnya pula untuk mampu melakukan advokasi sosial khususnya.

Di tengah terjadinya proliferasi kabupaten/kota sebagai hasil pemekaran yang masih terus berlangsung sampai sekarang, proses desentralisasi tidak serta merta dapat meningkatkan peran publik pemerintah kota/kabupaten dalam menyelenggarakan berbagai program advokasi sosial, khususnya pengentasan masyarakat miskin dari kemiskinan. Bahkan pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten juga belum memberikan tanda-tanda yang meyakinkan bahwa mereka dapat mengembangkan *good governance*. Sementara negara—sekali lagi, pemerintah pusat—tidak lagi sepenuhnya bisa diharapkan melakukan program-program seperti itu. Pemerintah daerah (propinsi) dan kota/kabupaten kini seharusnya berada di lini terdepan dalam jajaran pemerintahan untuk melaksanakannya. Namun kecenderungan dan

realitas menunjukkan bahwa mereka masih bergulat dengan berbagai masalah pemerintahan dan publik.

Orpol —sebagaimana lazimnya- bergerak terutama dalam kerangka politik, khususnya, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan mempengaruhi publik untuk mendukung mereka. Lebih dari itu, hingga kini, orpol sibuk dengan urusan-urusan internalnya; konsolidasi merupakan masalah serius yang mereka hadapi, karena persoalan-persoalan internal yang tidak terselesaikan, yang sering berujung pada friksi, perpecahan, dan pemisahan menjadi orpol baru. Jadi orpol lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri.

Karena itu, sulit diharapkan bahwa parpol dapat memainkan peran signifikan dalam penciptaan *good governance* dan advokasi sosial, khususnya pengentasan masyarakat miskin dari kemiskinan. Jika mereka terlibat dalam advokasi sosial, maka itu sifatnya sangat insidental, misalnya menjelang Pemilu atau Pilkada, atau pada waktu bencana. Dan semua ini dilakukan lebih untuk kepentingan politik daripada kepentingan kemanusiaan. Bukan tidak jarang, bagi mereka yang lebih penting mengibarkan bendera parpolnya masing-masing daripada mengadvokasi masyarakat secara serius dan terarah.

Berbeda dengan Orpol, Ormas Islam pada dasarnya —seperti saya kemukakan dalam makalah-makalah lain— adalah *religious-based civil society organization*, organisasi masyarakat madani (atau masyarakat sipil/masyarakat kewargaan). Ormas-ormas Islam pada dasarnya *self regulating* dan *self financing*, yang membuatnya independen *vis-à-vis* negara. Dengan demikian begitu mereka tidak bisa terkooptasi oleh negara dan dengan begitu mereka bisa memainkan *mediating* dan *bridging role* antara negara dan masyarakat umum. Karena itulah ormas-ormas Islam cocok dengan pengertian dan cakupan *civil society* yang bukan merupakan *die-hard* oposisi atau bahkan menjadi alternatif bagi pemerintah. Sebaliknya mereka bergerak sebagai “*critical partners*”, mitra kritis pemerintah; dan bekerja untuk pengaturan masyarakat secara lebih baik (*for better ordering of society*).

Dengan posisinya yang distingtif tersebut, ormas Islam sebagai *Islamic-based Civil Society* memiliki potensi besar untuk mendorong penciptaan dan penguatan *good governance* dan pemberdayaan sosial, khususnya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Hal ini mengingat, pertama; karena ormas Islam memiliki jangkauan dan pengaruh yang luas sampai ke tingkat akar rumput; kedua, mereka *self-financing*, tidak tergantung pada pendanaan pemerintah dan *funding agencies* asing; ketiga, mereka memiliki *religious-social leverage*, yang membuat mereka memiliki kredibilitas di mata masyarakat.

Sebagai perbandingan, organisasi atau kelompok *civil society* dalam bentuk LSM atau NGO advokasi dalam berbagai bidang, umumnya bersifat elitis,

dengan lingkup pengaruh yang terbatas, dan tak jarang sangat tergantung pada *foreign funding* yang membuat mereka sering dianggap hanya menjalankan agenda pihak-pihak asing. Karena itu, membuat kredibilitas dan *leverage* mereka lemah vis-à-vis masyarakat umumnya.

Potensi ormas Islam yang dikemukakan diatas, tidak bisa diwujudkan secara maksimal oleh ormas-ormas Islam karena beberapa alasan. Faktor pertama, kecenderungan tradisional dan konvensional mereka untuk lebih banyak bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, pelayanan sosial (khususnya melalui rumah sakit dan panti asuhan) daripada pada bidang-bidang “baru” seperti penciptaan *good governance* dan pemberantasan kemiskinan. Secara teologis dan *fiqhiyyah*, kedua bidang terakhir juga tidak menjadi wacana pokok. Karena itu sementara kalangan mengkritik mereka sebagai lebih “peka susila” daripada “peka sosial”—dalam hal ini khususnya kemiskinan.

Oleh karena itu, ormas-ormas Islam sebagai kekuatan *civil society* harus mengembangkan dan memperluas wawasan teologis dan *fiqhiyyah*-nya dan sekaligus juga merambah orientasi baru pada bidang-bidang yang menuntut peran dan partisipasi mereka, semacam penciptaan *good governance* dan pemberantasan kemiskinan. Bahkan, ormas-ormas Islam semestinya mengambil bidang-bidang seperti ini sebagai prioritas baru.

Faktor kedua, ormas-ormas Islam yang sangat besar terperangkap dalam struktur pengelolaan yang membuat mereka lambat bergerak dalam bidang-bidang atau *current issues* yang mendesak untuk mereka respon. Akibatnya, mereka sering ketinggalan dan terlambat dalam memberikan respon, sehingga cenderung terlihat pasif dan lamban. Agaknya, untuk mengatasi hal tersebut, ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah mengembangkan lembaga-lembaga otonom yang lebih *fleksible* dalam gerakannya. Selain itu, baik dalam kerangka organisasi maupun tokoh-tokoh tertentu di lingkungan NU dan Muhammadiyah juga berdiri pusat-pusat kajian dan bahkan LSM lainnya. Ini merupakan langkah sangat strategis tetapi masih diperlukan penguatan manajemen dan kredibilitas serta *leverage*-nya.

Faktor ketiga adalah bahwa ormas-ormas Islam terserap dalam kegiatan dan program-program rutin. Rutinitas inilah yang membuat ormas-ormas Islam seakan-akan telah kehilangan élan (hakikat)-nya. Kritik baik dari dalam maupun dari luar tentang rutinitas yang membelenggu ini telah menjadi wacana dari muktamar ke muktamar tetapi nampaknya belum ada terobosan-terobosan baru untuk mengatasinya. Jika tidak, ormas-ormas Islam terus mengalami kejumudan dan stagnasi, khususnya dalam program-program advokasi untuk pemberdayaan sosial, seperti penciptaan dan penguatan *good governance* serta pemberantasan kemiskinan.

Ormas-ormas Islam sudah waktunya mengembangkan fikih advokasi sosial yang lebih tegas. Dalam konteks itu, filantropisme yang sudah relatif mapan

dalam ormas-ormas Islam ini seyogyanya diarahkan tidak hanya secara konvensional —sesuai dengan fikih konvensional— tetapi juga secara berbarengan juga ditujukan untuk pemberdayaan *good governance* dan advokasi sosial dalam pengertian seluas-luasnya. Ini mencakup juga misalnya pengentasan masyarakat miskin dan terpinggirkan dari kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya, seperti pengangguran, pelacuran, penggunaan narkoba, dan banyak penyakit-penyakit sosial lainnya.***
(Azyumardi Azra)

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2007, “Religious-based Civil Society and anti-Corruption Campaign: The Indonesian Experience in the Creation of Good Governance”, in Helen James (ed), *Civil Society and Global Governance*, London: Routledge.
- Azra, Azyumardi, 2007, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Development*, Bandung: Mizan International.
- Azra, Azyumardi, 2006, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context*, Jakarta & Singapore: ICIP, TAF, Equinox-Solstice.

GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH: STRATEGI DAN AGENDA PENGENTASAN KEMISKINAN

*Tahukah engkau orang yang mendustai agama,
Mereka lah orang yang mentelantarkan anak yatim,
dan tidak menuruh memberi makan orang miskin.
(Q.S. Al maa'un:1-3).*

Kemiskinan dan Rangkaian Program Eksperimen

Kemiskinan sudah akab dengan masyarakat Hindia Belanda sejak jaman penjajahan, khususnya sesudah kultur stelsel atau tanam paksa. Juga di awal kemerdekaan, pengentasan kemiskinan sudah menjadi agenda nasional. Namun upaya pengentasan kemiskinan di awal kemerdekaan ketika penduduk Indonesia masih berjumlah 70 juta, tak kunjung memberikan hasil yang memuaskan, sampai pada saat ini ketika jumlah penduduk Indonesia sudah membengkak menjadi tiga kali lipat.

Program pengentasan kemiskinan, yang selalu tampil dalam pendekatan “proyek” dengan berbagai “judul” yang berbeda, sudah dilaksanakan, minimal sejak kita kenal dengan istilah REPELITA pada tahun 1970. Repelita demi Repelita, hingga dikenal program khusus berjudul Inpres Desa Tertinggal (IDT), kemudian program Takesra/Kukesra sampai ke Bantuan Tunai Langsung, hingga kini menjadi Program Keluarga Harapan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Namun program panjang tersebut tak pernah memberikan “*lessons learned*” atau pengalaman dan pembelajaran yang berarti kepada para perencana program. Setiap “judul” baru selalu dimulai dengan kriteria dan sumber data dasar yang berbeda, karenanya diikuti dengan tehnik operasional yang berbeda.

Data BPS yang dijadikan basis perencanaan, selalu berbeda dengan data lapangan yang dikumpul berdasar kriteria yang berbeda oleh pihak RT, RW, desa atau kelurahan. Susenas BPS 2006 mencatat 39,05 juta atau 17,75% penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Angka ini akan jauh membesar jika kriteria Bank Dunia dipakai, dimana kemiskinan diukur dengan penghasilan di bawah US \$ 2/hari.

Tepat Sasaran, *Trust*, dan Percaya Diri

Teramat panjang sudah program “uji coba” penanggulangan kemiskinan. Setiap tahapan tak dapat dilepaskan dari berbagai kisah aneh tentang penyimpangan. Sejak perbedaan kriteria antara BPS dengan instansi sektoral sampai berbagai bias data lapangan oleh RT/RW atau desa setempat. Paket bantuan, kecuali Bantuan Tunai Langsung, juga program Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan bersamaan dengan PNPM Mandiri, hampir selalu diberikan dalam bentuk barang, misalnya ternak atau alat produksi.

Justru penyaluran paket bantuan yang harus disalurkan oleh pihak ke tiga inilah, sumber dari segala bentuk keanehan. Masyarakat miskin hampir selalu menerima bantuan yang dibawah nilai nominal bantuan yang sebenarnya, karena berbagai potongan resmi maupun tidak resmi. Praktek semacam ini justru semakin mencekik warga masyarakat miskin. Apalagi bilamana paket bantuan tersebut disyaratkan sebagai bantuan bergulir, maka keluarga miskin harus mengangsur lebih besar dari nilai nominal bantuan yang mereka terima. Masyarakat miskin justru harus mensubsidi masyarakat yang lebih kaya.

Masyarakat sudah banyak dikecewakan oleh berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan berbagai “judul” program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, masalah utama yang mesti dibangun adalah bagaimana memilih sasaran keluarga miskin yang tepat, dilanjutkan membangun kepercayaan masyarakat, membangun TRUST kembali bahwa program PNPM Mandiri dan PKH akan benar-benar dilaksanakan secara profesional dan dengan akuntabilitas maksimal. Semangat “jangan ada dusta diantara kita”, harus dipegang teguh oleh semua jajaran program. Tahap berikutnya adalah membangun rasa percaya diri pada warga masyarakat, menanamkan semacam “virus *n Ach*”, semangat untuk kerja keras mencapai taraf hidup yang lebih baik, ke arah tataran kehidupan yang lebih berkemajuan.

Sektor Riil dan Jaringan

Setetes bantuan kemanusiaan, apapun judul dan pengorganisasiannya, tidak akan pernah membawa manfaat berkelanjutan kalau tidak didukung oleh “*enabling environment*”, situasi lingkungan sosial ekonomis yang kondusif. Apalagi dewasa ini, selama roda perekonomian nasional kita masih berjalan dengan mesin sebelah, dari mesin konsumtif berupa biaya pembangunan pemerintah dari APBN/APBD dan tanpa dukungan perkembangan sektor riil yang dipacu oleh investasi dan kemampuan ekspor, selama itu pula berbagai upaya pengentasan kemiskinan akan tetap merupakan setetes air di padang pasir dan tidak akan mampu mencapai tahap kemandirian yang berkelanjutan.

Minimal, upaya pengentasan kemiskinan tersebut harus didukung secara kuat oleh jaringan sosial ekonomi pedesaan dan oleh berbagai kelompok akar rumput yang bergerak diberbagai sektor kehidupan, seperti bidang agama, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan yang dijiwai oleh semangat kearifan lokal. Kelompok-kelompok akar rumput tersebut akan bersinergi dalam membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat lokal. Paling tidak, hasil dan dampak program pengentasan kemiskinan tersebut tidak serta merta lenyap diserap kemiskinan struktural laten yang sudah mereka derita dari generasi sebelumnya.

Kebijakan Pro Kaum Miskin

Program pengentasan kemiskinan akan mengalami kegagalan bilamana tidak ada konsistensi antara segenap upaya penanggulangan kemiskinan struktural tersebut dengan berbagai kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat pro kepada kaum miskin. Namun apabila penguasa (*super power*) dan pengusaha (*super market*) sudah bersatu dan bersinergi, program penanggulangan kemiskinan itu sendiri tak lebih merupakan lahan bisnis antara penguasa dan pengusaha. Bagaimana kemandirian para kelompok usaha tani dari petani-petani gurem akan berkelanjutan kalau jerih payah mereka selalu dipermainkan oleh meningkatnya biaya produksi dan rendahnya nilai jual produk tani. Bagaimana harga beras akan pernah memuaskan petani kalau ketika panen raya berlangsung justru pemerintah melakukan impor beras dengan berbagai alasan yang berbau rekayasa.

Slogan Indonesia sebagai negara agraris tidak pernah sepenuhnya didukung oleh kebijakan yang mendukung laju pertumbuhan sektor pertanian, terutama bagi para petani kecil. Pertanian organik yang ternyata bukan hanya sangat produktif tapi juga ramah lingkungan sudah lama dicanangkan tapi tak kunjung digerakkan karena Pemerintah, dalam dominasi sistem ekonomi kapitalis dan paham neo-liberal, lebih senang memaksa petani mengkonsumsi pupuk urea sebanyak mungkin.

Semenjak berdirinya negara bangsa di jaman Aristoteles, dunia ini diatur oleh dua kekuatan raksasa, penguasa atau birokrat, dan pengusaha yang mampu mempermainkan pasar. Apalagi bilamana penguasa kurang desisif, dan gurita pengusaha telah mencengkeram birokrasi, maka hukum palu godam kapitalislah yang akan berlaku.

Muhammadiyah: Dari Gerakan Al Ma'un hingga Gerakan Masyarakat Madani

Prof. James L. Peacock mengatakan bahwa diluar dunia Kristen, Muhammadiyah dengan hampir 500 lembaga amal usaha kesehatan, 15.000 lembaga pendidikan dasar dan menengah, 197 lembaga pendidikan tinggi, dan 325 panti asuhan adalah gerakan kemanusiaan Islam terbesar di dunia. Sejarah panjang Muhammadiyah selama hampir satu abad, di mulai K.H. A. Dahlan dengan menempakan semangat Al Ma'un, berbuat sesuatu yang nyata dan sekarang, bagi kaum *dhu'afa*. Namun semangat tersebut, yang diawali dengan semangat pembaharuan pemikiran Islam, kini mengalami distorsi dan pelemahan.

Rumusan tujuan Muhammadiyah: “*Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud **masyarakat Islam yang sebenar-benarnya***”. Sebagai tujuan misi profetik Muhammadiyah, seharusnya dibaca dan diterjemahkan, bahwa perkembangan misi profetik tersebut dilaksanakan melalui tahapan berturut-turut sebagai:

- (i) gerakan karitatif,
- (ii) gerakan pemberdayaan masyarakat,
- (iii) gerakan pemberdayaan modal sosial,
- (iv) gerakan ketahanan sosial masyarakat atau *community resilience*, dan
- (v) gerakan *Islamic civil society*.

Tidak dapat disangkal peranan dari berbagai lembaga amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dasar dan menengah, lembaga pendidikan tinggi, serta lembaga amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan sebagai gerakan karitatif terbesar tersebut, dalam pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Seluruh lembaga amal usaha di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial Muhammadiyah harus mengusung semangat Al Ma'un, semangat pro-*dhu'afa*, serta menjadi ujung tombak upaya pengentasan kemiskinan. Semangat “berbuat sesuatu yang nyata, sekarang”, harus menjadi komitmen pro-*dhu'afa* gerakan Muhammadiyah.

Prinsip *da'wah* dan *amar ma'ruf nahi munkar* juga menjadi pedoman utama dalam melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan. Gerakan pengembangan pertanian organik yang belakangan digerakkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, adalah contoh pengenerapan prinsip *da'wah* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Gerakan pertanian organik, bukan hanya meningkatkan produksi pertanian tapi juga meningkatkan pendapatan petani yang menjadi bagian terbesar dari keluarga miskin di Republik yang sudah berusia 62 tahun ini.

Sebagian besar kegagalan petani miskin untuk bangkit dari keterpurukannya selama ini adalah kegemaran menggunakan pupuk anorganik secara besar-

besaran, sehingga setiap tahun petani Indonesia menghamburkan tidak kurang dari 97 triliun rupiah untuk belanja pupuk dan peptisida yang menghancurkan dan merusak lingkungan tersebut. Sehingga gerakan da'wah *bil hal* yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah di bidang pertanian organik tersebut, juga sekaligus merupakan gerakan advokasi dalam gerakan kembali ke pupuk organik.

Namun masih tersisa agenda strategis yang masih gamang dan kurang lugas dimasuki oleh Muhammadiyah, yakni agenda pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan modal sosial, membangun ketahanan masyarakat, dan ujung-ujungnya adalah pemberdayaan "civil Islami" atau masyarakat madani di Indonesia. Muhammadiyah harus menjadi pelopor dari gerakan pemberdayaan masyarakat dan gerakan modal sosial, sehingga segenap upaya pengentasan kemiskinan benar-benar akan dapat lebih dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang membaca kegamangan tersebut. InsyaAllah, dengan Visi Muhammadiyah 2025, yang menjadi pewujudan "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" atau masyarakat madani sebagai visi abadi Muhammadiyah, diharapkan berbagai kelemahan struktural, distorsi, dan kegamangan Muhammadiyah dalam memasuki agenda strategis tersebut dapat secara sistematis dan terencana diatasi dan dikembalikan ke jalurnya yang benar kembali.*** **(Sudibyo Markus)**



MENUJU LAYANAN KESEHATAN PRO MUSTADH'AFIN

Ketidakadilan ekonomi global telah memperluas kehadiran orang-orang miskin dan tertindas (termiskinkan) seperti gelandangan, pengangguran, dan kaum marjinal lainnya. Ini semua tidak hanya menunjukkan krisis politik dan ekonomi, namun juga krisis spiritual. Dalam sebuah masyarakat yang terobsesi dengan kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan material, kaum mustadh'afin telah terstigma sebagai manusia yang secara moral mengalami degenerasi, tidak berdaya dan penuh kegagalan.

Populasi kaum *mustadh'afin*, yang merupakan produk dari kecenderungan politik dan ekonomi struktural selama tiga dekade terakhir, akan terus tumbuh dan meningkat lebih-lebih setelah periode krisis ekonomi yang meluas. Keadaan semacam ini membuat populasi mereka akan menjadi subkultur yang menyebar, yang dapat mengakibatkan berbagai macam hal, mulai dari krisis perumahan dan pekerjaan, penyusutan besar dalam belanja sosial, perubahan-perubahan pada level makro ekonomi, strategi pembangunan kembali potensi lokal, dan sejumlah hal lain.

Intinya, kemiskinan dan ketertindasan itu meliputi tiga hal: kelangkaan (*scarcity*), ketidakpastian (*contingency*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Kelangkaan berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) yang sangat penting agar manusia tetap bertahan hidup. Ketidakpastian berhubungan dengan ketiadaan harapan dan kesuraman masa depan masyarakat miskin karena kurangnya pendidikan dan keterampilan hidup. Dan ketidakberdayaan berkenaan dengan masalah kehampaan kekuasaan dan otoritas yang membuat orang miskin tidak memiliki cukup akses, peluang, partisipasi, perlindungan hukum, kontrol atas kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.

Kemiskinan berupa kesulitan dalam akses dan mutu pelayanan kesehatan termasuk ke dalam kategori kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar. Di samping sandang, pangan dan papan, kesehatan merupakan kebutuhan primer. Orang sakit terancam tidak dapat bertahan hidup lama, jaminan hidupnya semakin pendek, kematian seolah menjelang, produktivitasnya menurun, dan bisa menjadi beban bagi orang lain. Kelangkaan pemenuhan kesehatan juga berakibat fatal terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang bisa diukur melalui Human Development Index (HDI). Salah satu

kriteria HDI terkait dengan masalah kesehatan, seperti kemudahan akses air bersih dan jaminan hidup, kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak, penyakit HIV/AIDS maupun penyakit menular lainnya. Ini pula yang kemudian menjadi kepedulian MDGs.

Sama kompleksnya dengan masalah kemiskinan, kesehatan juga erat hubungannya dengan pendidikan dan tingkat pendapatan ekonomi. Setidaknya ada 6 problem utama kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari kesadaran dan perekonomian masyarakat antara lain: kesulitan akses terhadap layanan kesehatan, mutu layanan kesehatan yang tidak memadai, perilaku hidup bersih, kesehatan reproduksi, konsumsi makanan bergizi, dan penyakit menular. Tingkat ekonomi yang mapan dapat mengatasi masalah akses, mutu layanan, kesehatan reproduksi, konsumsi makanan bergizi, dan penyakit menular. Sedangkan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran pentingnya hidup bersih dan sehat, makanan bergizi, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penyakit menular.

Enam problem utama itu tentu saja mendesak berbagai pihak untuk peduli dan berupaya untuk mengatasinya. Pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan, pihak swasta dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk mencari jalan keluar mengurangi dan mengentaskan masalah-masalah kesehatan semua penduduk negeri ini.

Terobosan Pemerintah Daerah

Umum diketahui bahwa alokasi anggaran belanja kesehatan dalam APBN jauh dari memadai. Upaya pemerintah pusat meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan semua warga negara sebenarnya telah mengalami peningkatan, meski belum memenuhi harapan dan ekspektasi yang selama ini didambakan semua orang. Ini memang bukan tugas yang mudah, lebih-lebih berbagai faktor dan krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 telah menambah kuantitas masyarakat miskin, yang makin hari cenderung meningkat. Dengan jumlah penduduk sekitar 223 juta jiwa, upaya pemerintah mengatasi masalah akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan menjadi pekerjaan rumah khusus. Banyak program untuk mengatasi masalah akses meliputi: Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Sehat, Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan, Jaring Pengaman Kesehatan Masyarakat Miskin, Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin, dan lain-lain.

Bersamaan dengan meningkatnya program pemerintah untuk mengatasi akses kesehatan bagi masyarakat miskin, kendala-kendala lama yang seringkali muncul juga tidak sulit untuk ditemukan, seperti salah sasaran dalam identifikasi masyarakat miskin, kekurangan pembiayaan, kapasitas layanan

kesehatan, macetnya dana asuransi kesehatan masyarakat miskin dan kelambatan dalam penerbitan ASKESKIN dan SKTM.

Dalam keterbatasan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan situasi darurat semacam ini, masyarakat sangat berharap peran proaktif dan progresif dari pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih memerhatikan pertumbuhan daerah dan kesejahteraan warganya dalam berbagai aspek, termasuk bidang kesehatan. Sayangnya, ada banyak pemerintah daerah yang masih sibuk dengan urusan kekuasaan. Keruwetan birokrasi adalah masalah lain yang dapat menghambat identifikasi masyarakat miskin. Di Sumedang misalnya, seperti dituturkan Nandang (B-Trust, Bandung), masih banyak anggota masyarakatnya yang tidak paham administrasi, miskin informasi asuransi kesehatan, dan tidak tahu tentang ASKESKIN.

Terobosan yang digagas pemerintah daerah, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan, patut diacungi jempol. Pemerintah Kota Pekalongan menjalankan beberapa program pengentasan masalah-masalah kesehatan antara lain: upaya secara bertahap meningkatkan anggaran kesehatan dalam APBD, kini anggaran baru mencapai 5,5%; peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; penyemaian program-program kuratif dan rehabilitatif, dan promotif dan preventif; program bebas kawasan rumah kumuh, dan sebagainya. Upaya yang terakhir ini sangat bermanfaat dalam rangka menciptakan kota sebagai habitat yang sehat, bersih dan manusiawi bagi warga kota. Pengalaman serupa dihadirkan oleh Kota Solo yang menjadi proyek percontohan kota habitat dan *citywalk* yang ramah bagi pejalan kaki.

Pengalaman Kota Pekalongan, sebagaimana dikemukakan Dwi Heri Wibawa, menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah dalam hal advokasi anggaran (kesehatan) pro rakyat. Membuka dan memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat, menurut Ibnu Naser Arrohimi, bukan semata masalah kebijakan populis-politis, lebih dari itu adalah cermin kepedulian pemerintah atas masalah pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Bila orientasi pertama yang menonjol, maka kebijakan itu akan mudah terkikis sejalan dengan kekuasaan telah dimenangkan. Karena itu, visi baru pemerintah daerah dalam bidang kesehatan harus dicanangkan sebagai upaya sistematis dan jangka panjang untuk memenangkan sumber daya manusia yang sehat dan handal.

Rumah Sakit untuk Orang Miskin

Prakarsa masyarakat sipil dalam pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda.

Kendala-kendala pengelolaan dan pembiayaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin menuntut tanggung jawab sosial kekuatan-kekuatan masyarakat sipil.

Partisipasi masyarakat sipil, seperti yang ditunjukkan tanpa putus oleh Muhammadiyah dengan berbagai amal usaha dan layanan sosialnya, adalah dalam kerangka amanah teologis dan sosial sekaligus, demikian pendapat Ibnu Naser Arrohimi. Muhammadiyah sejak awal kebangkitannya didorong oleh semangat memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh umat manusia. Ini tercermin dari terbentuknya suatu lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), yang kini bermetamorfosis menjadi PKU. Landasan teologis lahirnya lembaga ini adalah bahwa Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*. Yakni risalah yang ingin menebarkan kasih sayang kepada seluruh penduduk alam semesta. Kata "Oemoem" mengisyaratkan sikap egaliter dalam memberikan bantuan dan layanan kepada semua manusia, tanpa membeda-bedakan agama, etnik, ras dan kebudayaan. Diilhami oleh pesan teologis ini, Muhammadiyah juga bercita-cita luhur untuk berbagi layanan kesehatan untuk semua umat manusia, bukan umat dalam arti sempit Muslim, apalagi golongannya sendiri.

Pesan teologis pertama ini diperkokoh oleh semangat pemberdayaan yang terkandung dalam surat al-Maun, sebuah surat dalam al-Qur'an yang sering diajarkan secara berulang-ulang oleh KH. Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya. Ajaran ini yang kemudian berkembang melembaga menjadi amal usaha dalam tiga ranah: pendidikan, santunan sosial, layanan kesehatan.

Berkaitan dengan layanan kesehatan, Muhammadiyah telah melahirkan ratusan rumah sakit, klinik, poliklinik, rumah bersalin, dan semacamnya dan tersebar di seantero negeri ini. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi, spirit al-Maun ini mengalami krisis. Sebagian amal usaha layanan kesehatan itu terjebak menjadi lembaga profit semata. Merespon masalah ini, sudah agak lama terjadi perdebatan mengenai reposisi dan revitalisasi layanan kesehatan Muhammadiyah. Ada pandangan mengenai perlunya lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah, termasuk di bidang kesehatan, untuk menyeimbangkan antara orientasi profit dan orientasi sosial. Yang pertama dimaksudkan agar lembaga layanan kesehatan dapat berkesinambungan dan membiayai dirinya sendiri; dan yang kedua menjaga dan memelihara agar lembaga kesehatan Muhammadiyah tidak kehilangan semangat awalnya dalam menebarkan kasih sayang bagi semua.

Sebagaimana pengakuan Ibnu Naser Arrohimi sendiri, ada persepsi bahwa rumah sakit Muhammadiyah adalah rumah sakit mahal, sehingga yang dapat mengakses layanan kesehatan hanya mereka yang berasal dari keluarga mampu secara ekonomi. Persepsi ini tentu saja menempatkan rumah sakit

PKU Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan rumah sakit umum lainnya, yang dikelola untuk mencari keuntungan finansial.

Berangkat dari realitas semakin banyak masyarakat miskin, dan keprihatinan menipisnya spirit berbagi kasih sayang dan membantu kaum mustadh'afin, pengurus PKU Muhammadiyah Gombong mengambil inisiatif untuk melakukan transformasi visi dan misi layanan kesehatan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, layanan kesehatan bersandarkan pada kepentingan substansial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Layanan kesehatan harus terjangkau oleh mereka yang pendapatan perkapitanya berada pada level bawah, baik yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan, miskin, dan hampir miskin. Karena itu pada tahap pelaksanaan di lapangan dibuat pembayaran dan kluster tarif menurut kemampuan pasien.

Kedua, layanan kesehatan untuk semua (*health for all*). Akses terbuka untuk semua orang, termasuk mereka yang miskin. PKU Gombong juga memberikan kuota untuk layanan klinik secara cuma-cuma. Dengan kata lain, kesehatan untuk semua dimaknai kesehatan untuk orang miskin.

Ketiga, agar rumah sakit tetap *sustainable* maka pengelola melakukan pengembangan usaha non-kesehatan yang tujuannya untuk memberikan kontribusi subsidi silang bagi layanan masyarakat miskin. Keuntungan yang diperoleh dari layanan kesehatan terhadap masyarakat mampu disisihkan sebagian untuk membantu program kesehatan bagi orang miskin.

Keempat, visi tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan cerdas para pengelola mengatur program klinik cuma-cuma sebagai bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*). Ini merupakan inisiatif baru dalam mana CSR selama ini berkisar pada tiga hal yang dilakukan secara parsial. Pertama, CSR adalah peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*). Secara sukarela perusahaan membantu mengatasi problem sosial dan lingkungan. Perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Kedua, di samping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian laba untuk *filantropi* sosial. Tujuannya untuk pemberdayaan sosial dan atau perbaikan lingkungan yang rusak sebagai akibat eksplorasi dan eksploitasi. Dan ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Peran-peran CSR konvensional semacam ini rupanya dibingkai oleh paradigma *nobless oblige* bahwa para bangsawan (baca: pengusaha) menunjukkan sifat kedermawanan kepada orang-orang di luar diri atau kelompoknya. Kedermawanan ini bersifat *sukarela*, tidak ada satu institusipun yang berhak memaksa para pengusaha untuk melakukannya termasuk negara.

Kedermawanan adalah *bantuan (oblige)* dari pengusaha untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ada beberapa kekurangan dari peran-peran CSR di muka. Pertama, CSR lebih memperlihatkan tindakan reaktif daripada responsif dan antisipatif. Perusahaan memainkan peran sosialnya setelah kemiskinan, pengangguran, wabah penyakit, dan kerusakan lingkungan terjadi dan banyak korban berjatuh. Misalnya, kasus Newmont dan penyakit minamata di teluk Buyat. Kedua, CSR dibingkai dalam kerangka *trickle down effect*. Artinya, kedermawanan yang sukarela itu merupakan bentuk limpahan keuntungan yang menetes ke bawah. Diasumsikan setelah pundi-pundi perusahaan penuh, masyarakat akan memperoleh luberan laba dari pundi-pundi itu. Pada praktiknya, pundi-pundi itu sangat elastis dan terus dapat menampung laba yang makin menggelembung. Ketiga, CSR yang dimaknai sebagai kewajiban atau tuntutan bagi perusahaan untuk ambil peran sosial, adalah niscaya namun belum cukup. Ketiadaan mekanisme kontrol pada akhirnya dapat mengambang kembali CSR sebagai *noblesse oblige* yang sukarela itu. Dan ini berujung pada sikap suka-suka perusahaan.

Dari sudut pandang konvensional, pengembangan CSR rumah sakit PKU Gombong menggabungkan ketiga aspek sekaligus – kedermawanan, kesukarelaan, dan kewajiban – serta melengkapinya dengan tanggung jawab yang mencakup peran-peran sosial yang responsif dan antisipatif. Pihak rumah sakit menyadari sejak awal dampak sosial dan lingkungan yang akan dan pasti terjadi. Tidak menunggu ada korban lebih dulu, baru kemudian berlagak dermawan seperti sinterklas.

Kelima, motivasi spiritual dan nilai-nilai keagamaan memandu visi dan misi rumah sakit pro orang miskin. Mengentaskan kemiskinan itu bukan dengan menerimanya sebagai sunnatullah, takdir Tuhan. Menurut Nandang, agama semacam ini bisa menjadi candu bagi orang miskin dengan iming-iming kesabaran dan balasan dari Tuhan. Sebaliknya, kaum Muslim perlu meletakkan semangat keagamaan sebagai daya dukung jihad memerangi kemiskinan dan memajukan tingkat kesehatan masyarakat agar menjadi produktif. Barangkali gabungan dari semua inilah yang menjadikan tekad dan itikad baik menemukan jalan lurus dalam praksis sosial, spirit al-Maun yang melembaga dalam layanan kehidupan dan keselamatan semua umat manusia.

Tentu saja, model rumah sakit pro orang miskin semacam ini masih jarang dijumpai di negeri ini, bahkan di dalam Muhammadiyah sendiri. Namun, setidaknya kita dapat belajar dari teladan dan prakarsa manajemen rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong ini, dan dengannya akan muncul prakarsa-prakarsa serupa di banyak tempat dan oleh banyak pihak.*** **(Editor)**

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Siapa Masyarakat Miskin?

- Kriteria keluarga miskin (PKPS-BBM BIDKES):
 - ▶ Keluarga tidak bisa makan dua kali sehari
 - ▶ Keluarga tidak mampu membayar pengobatan/pelayanan kesehatan anak/anggota keluarga yang sakit.
 - ▶ Kepala keluarga terkena PHK masal, serta
 - ▶ Keluarga dengan anak yang “drop-out” sekolah karena masalah ekonomi
- Seseorang yang berpenghasilan sama atau kurang dari US \$ 1 per hari (WB)
- Kriteria kemiskinan (BPS, 2006) :
 - ▶ Penghasilan Rp.120 rb/bln, 1900 kkal/hr sangat miskin
 - ▶ Penghasilan Rp.150 rb/bln, 2100 kkal/hr miskin
 - ▶ Penghasilan Rp. 175 rb/bln, 2300 kkal/hr hampir miskin

Penduduk Miskin

	Susenas Februari 2005	Susenas Maret 2006
Total Jumlah Penduduk	220 Juta	222 Juta
Jumlah Penduduk Miskin	35,10 Juta (15,97%)	39,05 Juta (17,75%)
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)*		
Perkotaan	Rp. 150.799	Rp. 175.324
Perdesaan	Rp. 117.259	Rp. 131.256
Kota+Desa	Rp. 129.108	Rp. 152.847

*) Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. SUMBER : BPS 2006

Kriteria Rumah Tangga Miskin (Penerima Bantuan Langsung Tunai)

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal < 8 m² per orang
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan tetangga lain
5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan rumah tangga adalah : petani dgn luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya di bawah Rp. 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dgn nilai minimal Rp.500.000, seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Masalah Kesehatan Maskin

- ▶ Rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin
- ▶ Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar
- ▶ Rendahnya mutu layanan kesehatan dasar
- ▶ Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat
- ▶ Kurangnya layanan kesehatan reproduksi

Sumber: SDKI 2003

- ▶ AKB dan AKABA kelompok miskin selalu diatas AKB dan AKABA kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.
- ▶ Persalinan oleh tenaga kesehatan pada miskin, hanya sebesar 21,3% dibandingkan 89,2% pd masyarakat kaya.
- ▶ Status kesehatan miskin diperburuk dng masih tingginya penyakit menular seperti malaria, tb paru, HIV/AIDS.
- ▶ Pemanfaatan RS masih didominasi oleh kelompok mampu, sedangkan miskin memanfaatkan pelayanan Puskesmas.
- ▶ 48,7% kendala merupakan biaya, jarak dan transportasi.

Mengapa Fokus pada Pelayanan Kesehatan Miskin ?

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, mempunyai arti yg sangat penting. Paling tidak ada tiga alasan pokok yang mendasarinya: Alasan keadilan social, alasan politis, alasan empiris.

Alasan Keadilan Sosial

Untuk menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi miskin. Pelayanan kesehatan bagi miskin mutlak perlu dilaksanakan, mengingat:

- ▶ Kematian bayi miskin > tinggi dari masyarakat tidak miskin.
- ▶ Kematian balita miskin > tinggi dari masyarakat tidak miskin.
- ▶ Kematian ibu bersalin miskin >tinggi dari masyarakat tidak miskin.
- ▶ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi miskin, dapat mencegah kesakitan dan kematian .

Alasan Politis

Untuk kepentingan politis internasional/nasional, pelayanan kesehatan bagi miskin perlu diprioritaskan, karena :

- ▶ Internasional : agar tidak tersingkir dari pergaulan internasional, mengingat banyak komitmen global yang menekankan pentingnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi miskin.
- ▶ Nasional : untuk menjaga keutuhan integrasi, bangsa perlu meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah tertinggal (miskin).

Alasan Empiris

Secara empirik terbukti apabila kesehatan penduduk baik, pertumbuhan ekonomi akan baik pula, dan ini berarti upaya mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil.

- ▶ Pertumbuhan ekonomi negara dengan tingkat kesehatan yang baik tumbuh lebih baik dibandingkan dengan negara yang tingkat kesehatannya buruk.
- ▶ Produktivitas pekerja yang sehat lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang sakit.
- ▶ Dari tiga alasan mengenai pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dapat disimpulkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan, upaya meningkatkan status kesehatan maskin mutlak harus dilaksanakan. Apabila kesehatan maskin semakin baik, maka bukan saja dapat meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka.

Strategi Pelayanan Kesehatan Maskin

1. Meringankan beban biaya berobat bagi penduduk miskin

Salah satu hambatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin adalah tidak tersedianya biaya berobat dan transportasi. Oleh karena itu, diperlakukan mekanisme surat keterangan tidak mampu, kartu sehat, program JPS-BK/PKPS-BBM BK, JPKM-M serta rencana JKN yang merupakan bagian dari SJSN, yang pada dasarnya bermaksud meringankan biaya berobat bagi penduduk miskin.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, program JPKM-M pada masa yang akan datang diintegrasikan dalam JKN. Premi untuk penduduk miskin ditanggung oleh negara.

2. Mengutamakan penyelesaian masalah kesehatan/ penyakit yang banyak diderita oleh maskin

Yang dimaksud dengan penyakit/masalah kesehatan maskin antara lain TB, Malaria, Kurang Gizi, PMS/HIV/AIDS, pelbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan lingkungan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maskin, penanggulangan berbagai masalah tersebut perlu diprioritaskan.

3. Meningkatkan penyediaan serta meningkatkan efektifitas upaya kesehatan masyarakat

Pelayanan ini termasuk penyuluhan kesehatan, pengawasan kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan fortifikasi makanan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk obat. Untuk kepentingan masyarakat miskin upaya kesehatan masyarakat ini harus dilaksanakan.

4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi maskin

Pelayanan kesehatan yang dimaksudkan disini adalah yang bersifat dasar yang diselenggarakan oleh PUSKESMAS dan jaringan.

5. Memprioritaskan alokasi pelbagai sumber daya yang tersedia pada daerah miskin

Daerah miskin berkorelasi positif dengan masyarakat miskin. Untuk melindungi masyarakat miskin perlu diprioritaskan alokasi sumber daya pada daerah miskin.

6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin

Masalah kesehatan masyarakat bukanlah masalah pemerintah saja melainkan masalah masyarakat itu sendiri. Sehingga, untuk memperoleh hasil yang optimal, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat peduli masyarakat miskin di Propinsi/Kab/Kota.

Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Maskin

Pemenuhan hak dasar maskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan melalui program a.l. :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Sumber Daya Kesehatan
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Pemenuhan Akses Yankes Maskin

Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesehatan maskin telah dilaksanakan program antara lain :

- ▶ Surat keterangan tidak mampu (SKTM)
Disini keluarga miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan cuma-cuma dari sarana pelayanan kesehatan pemerintah apabila membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah. Pada bentuk ini biaya pelayanan kesehatan keluarga miskin ditanggung oleh masing-masing sarana pelayanan kesehatan melalui sistem subsidi silang.
- ▶ Kartu sehat
Mekanisme surat keterangan tidak mampu tidak praktis (harus mengurus setiap kali berobat dan ada perasaan malu) kemudian diperkenalkanlah mekanisme kartu sehat. Setiap keluarga miskin diberikan kartu sehat. Kartu tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan cuma-cuma dari sarana pelayanan kesehatan pemerintah.

Sama halnya dengan SKTM, biaya pelayanan ditanggung oleh masing-masing sarana pelayanan melalui sistem subsidi silang.

- ▶ **Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)**
Ketika terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin, mekanisme kartu sehat yang biayanya ditanggung sendiri oleh masing-masing sarana pelayanan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk meringankan beban sarana pelayanan, pemerintah memberikan bantuan dana yang disalurkan langsung ke masing-masing sarana pelayanan. Mekanisme kartu sehat dengan bantuan dana dari pemerintah ini dikenal dengan nama JPS-BK.
- ▶ **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat Miskin (JPKM-M)**
Menyadari pentingnya penanganan berlanjut terhadap kesehatan penduduk miskin sebagai upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 1 dan 2, dan menyongsong implementasi SJSN Menkes RI melalui Keputusan Nomor 1241/Menkes/XI/2004, menetapkan pemeliharaan kesehatan penduduk miskin melalui pihak ketiga (PT Askes) sebagai penyelenggara untuk bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelayanan kesehatan (RS Pemerintah/Swasta, Puskesmas dan jaringannya).

Program JPKMM-ASKESKIN

- ▶ Program ASKESKIN merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- ▶ Program ASKESKIN merupakan terobosan yang sangat tepat guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- ▶ Program ASKESKIN merupakan dasar yang kokoh untuk pengembangan jaminan kesehatan nasional sebagai implementasi awal SJSN.
- ▶ Program ASKESKIN merupakan upaya untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan yang optimal.

Tujuan dan sasaran

Tujuan: meningkatnya akses dan mutu yankes bagi masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal

Sasaran: masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia

Kebijakan umum

1. Penyelenggaraan Program ASKESKIN secara nasional serentak di seluruh Indonesia.
2. Program ASKESKIN diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dengan prinsip portabilitas dan ekuitas.
3. Manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin bersifat komprehensif, berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis
4. Pengelolaan dana Program ASKESKIN ditugaskan pada pihak ketiga sebagai Dana Amanah dengan prinsip Nirlaba, Transparan, Akuntabel, Kehati-hatian, Efisien dan Efektif.

Kebijakan kepesertaan

1. Peserta Program ASKESKIN adalah masyarakat miskin dan tidak mampu (selanjutnya disebut maskin) yang ditetapkan pemerintah (Menteri Kesehatan).
2. Jumlah peserta ditetapkan pemerintah sejumlah 76,4 juta (BPS 2006).
3. Nama dan alamat maskin per Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Untuk setiap maskin, sesuai daftar nama yang disahkan Bupati/Walikota, diterbitkan Kartu Askeskin.
5. Selama belum memiliki Kartu Askeskin, Maskin dapat menggunakan SKM.

Kebijakan pelayanan kesehatan

1. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif dan berjenjang sesuai kebutuhan medis.
2. Penyelenggaraan program berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya (*Managed Care*) → standar.
3. Pelayanan kesehatan dilaksanakan di sarana kesehatan pemerintah/swasta.
4. Pelayanan obat menggunakan obat generik dan formularium RS yang jenis dan harganya ditetapkan dengan keputusab Menkes.
5. Ketersediaan obat di RS merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi RS.

Kebijakan pendanaan

1. Sumber dana berasal dari APBN Depkes.
2. Kebutuhan dana dihitung berdasarkan jumlah peserta yang akan dicakup dan besaran iuran per peserta selama satu tahun.
3. Alokasi dana untuk UKP (DIPA DITJEN BINA YANMEDIK) dan UKM (DIPA DITJEN BINA KESMAS) bagi masyarakat miskin.
4. Dana untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas disalurkan langsung ke Puskesmas melalui PT POS.

5. Dana untuk pelayanan kesehatan di RS di salurkan melalui PT Askes berdasar klaim tarif plafond yang ditetapkan oleh Menkes.

Pengorganisasian

A. Pusat

Tim Koordinasi Pusat + Tim Safeguarding

- Arah kebijakan
- Pembinaan dan pengendalian
- Sosialisasi, Monev (pengelolaan laporan), Penanganan keluhan

B. Propinsi

Tim Koordinasi Propinsi + Tim safeguarding

- Pembinaan dan pengendalian
- Sosialisasi, Monev (pengelolaan laporan), Penanganan keluhan

C. Kab/Kota

Tim Koordinasi Kab/Kota + Tim safeguarding

- Pembinaan dan pengendalian
- Sosialisasi, Monev (pengelolaan laporan), Penanganan keluhan

Indikator keberhasilan

1. Penerbitan dan distribusi kartu peserta 100%.
2. Angka utilisasi (*visit rate*) rata-rata 15% per bulan.
3. Angka rujukan dari PPK I rata-rata 12% per bulan.
4. Rata-rata lama perawatan di RS (los) 7 hari.
5. Tingkat kepuasan konsumen minimal 70%.
6. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4(100%), persalinan nakes (100%), perawatan bayi baru lahir KN2(100%) oleh nakes.

Dampak strategis

Dampak penyelenggaraan program Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Dampak umum:

- ▶ Merupakan fondasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- ▶ Mendorong terwujudnya “*Single Identity*” dalam SJSN.
- ▶ Sebagai “*Natural Entry Barrier*” menghadapi Era Perdagangan Bebas.
- ▶ Mengurangi “*Supply Induced Demand*” dibidang medis.
- ▶ Regulasi Pemerintah efektif dan menjadi “*Price Leader*” dengan adanya standar pelayanan, alat kesehatan dan obat.
- ▶ Status kesehatan akan meningkat.
- ▶ Kualitas SDM akan meningkat.
- ▶ Produktivitas SDM meningkat.

Dampak khusus :

- ▶ Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat
- ▶ Adanya ekuitas dan portabilitas dalam pelayanan kesehatan
- ▶ Adanya jaminan bagi kasus katastrofik
- ▶ Peningkatan upaya promotif dan preventif khususnya oleh Pemda
- ▶ Efisiensi, efektifitas dan pengendalian dalam pembiayaan

Masalah yang dihadapi

1. Perbedaan persepsi *stakeholders* terhadap Program ASKESKIN.
2. Belum sepenuhnya memenuhi amanat UU 40/2004 (PP) → Akuntabilitas, Sustainability Program.
3. Belum terselenggaranya Asuransi Kesehatan Sosial Nasional (*Universal Coverage*) beban berat Pemerintah untuk pendanaan ASKESKIN karena jumlah yang senantiasa meningkat (76,4 juta – 2007) tidak ada “*law of the large numbers*” untuk subsidi silang.
4. Penetapan nama masyarakat miskin oleh Pemda belum seluruhnya mengacu data BPS Tahun 2006.
5. Belum adanya standarisasi pelayanan medis, terapi dan pola tarif di RS.

Solusi

1. Sosialisasi untuk membangun *Political Will & Political Commitment* yang sama untuk seluruh Stakeholders.
2. Mempercepat Penyelesaian PP UU SJSN No.40/2004.
3. Menyelaraskan produk-produk hukum terkait.
4. SJSN (Askesosnas/Askeskin) sebagai persepsi Nasional → melalui sosialisasi berkesinambungan.
5. Pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
6. Sinkronisasi data masyarakat miskin secara lintas sektor.
7. Mempercepat penyusunan standar pelayanan medis, standar terapi & standar pola tarif di RS secara Nasional.
8. Perlu mempersiapkan Jaminan Sosial bagi sektor informal dan dapat dimulai dari Jaminan Kesehatan.

Kontribusi daerah

- ▶ Sosialisasi, *monev, utilisation review*, penanganan keluhan (*safeguarding*).
- ▶ Penanggulangan selisih tarif.
- ▶ Transportasi pendamping rujukan.
- ▶ Pendamping pasien di rawat inap.

- ▶ Menanggung selisih harga obat diluar OG/formularium RS.
- ▶ Maskin yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan ASKESKIN.

Hasil pelaksanaan program ASKESKIN tahun 2006

1. Pencapaian Kartu Peserta Tahun 2006

- ▶ Entri Data 86,83 %, Kartu Terbit 69,21 %, Distribusi Kartu 65,81 %.
- ▶ Proses Penerbitan Kartu Ditunda Menunggu Sinkronisasi Data Bps Pelayanan Kesehatan Maskin Tetap Berjalan.

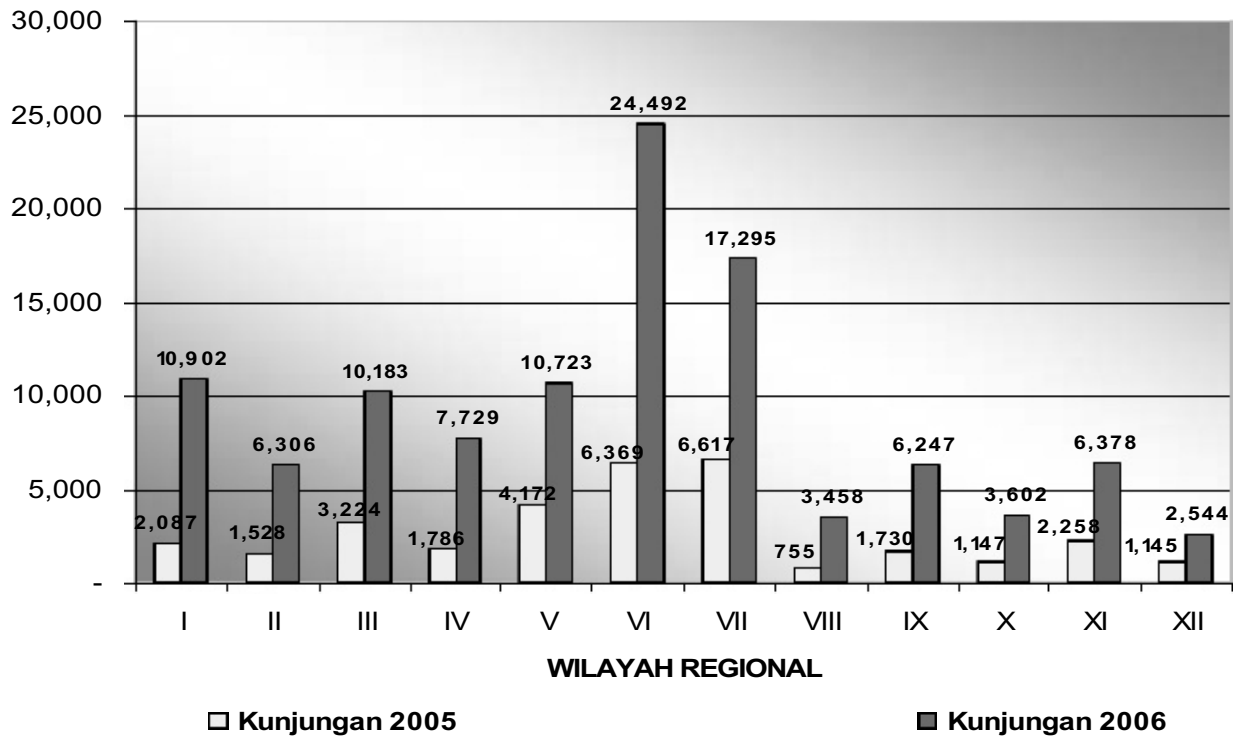
2. Akurasi Eligibilitas, Balitbangkes 06

3. Kepuasan Pasien ASKESKIN

No.	Aspek	Jumlah	Persentase
1.	Reliabilitas		
	Puas	473	88,7
	Tidak Puas	60	11,3
2.	Assurance		
	Puas	512	96,1
	Tidak Puas	21	3,9
3.	Tangible		
	Puas	465	87,2
	Tidak Puas	68	12,8
4.	Emphaty		
	Puas	479	89,9
	Tidak Puas	54	10,1
5.	Responsiveness		
	Puas	510	95,7
	Tidak Puas	23	4,3

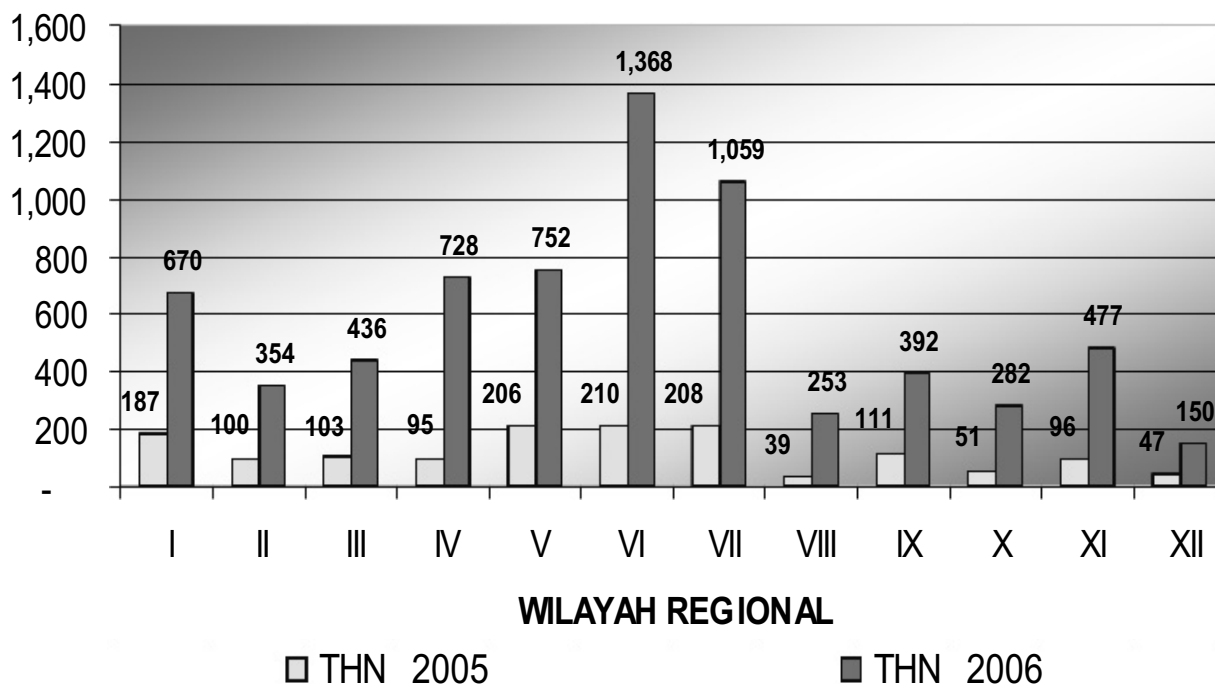
(Sumber: Chalidyanto, CS: Unair 2006)

4. Perbandingan Data Kunjungan Di Puskesmas Peserta ASKESKIN Tahun 2005 - 2006

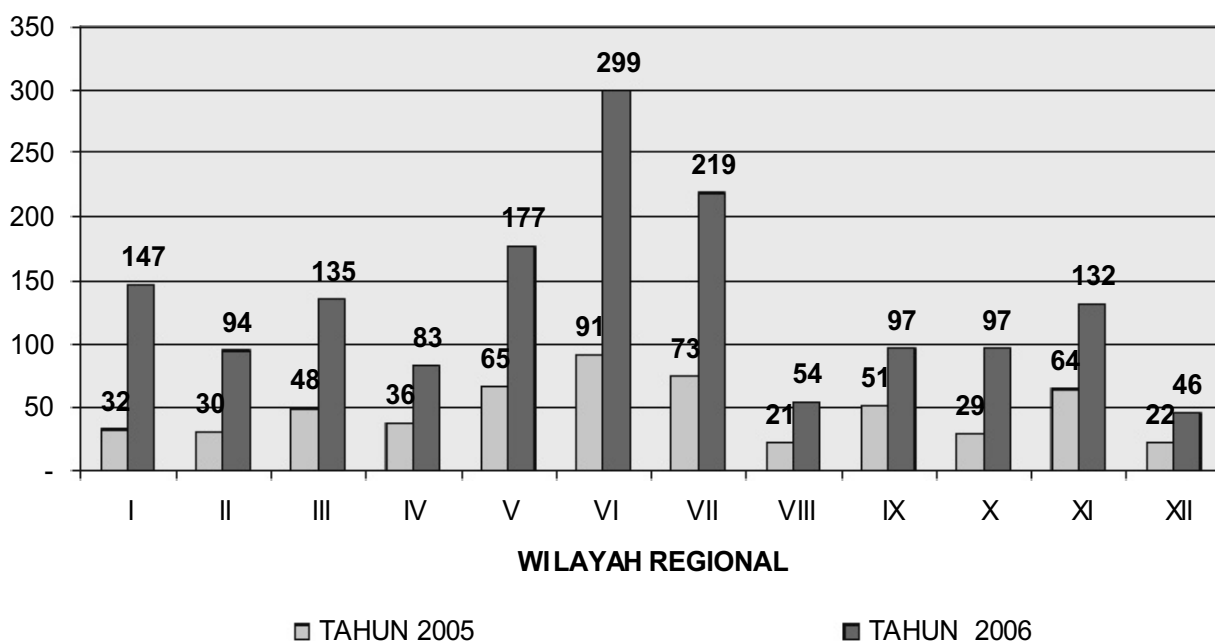


5. Perbandingan Data Rujukan Peserta ASKESKIN Tahun 2005 - 2006

6. Perbandingan Pemanfaatan RJTL di Rumah Sakit Program ASKESKIN Tahun 2005 - 2006



7. Perbandingan Pemanfaatan RITL di Rumah Sakit Program ASKESKIN Tahun 2005 - 2006



8. Rujukan Lintas Daerah (Portabilitas)

No.	Tempat tinggal pasien	2003	2004	2005
1.	Kota Cirebon	1.383	1.495	1.993
2.	Kabupaten Cirebon	459	147	1.776
3.	Kabupaten Kuningan	31	8	97
4.	Kabupaten Indramayu	107	14	235
5.	Kabupaten Majalengka	56	19	205
6.	Luar Wilayah III	30	25	7
	Luar Kota Cirebon	683	313	2.320
	Kenaikan		-52%	+700%
TOTAL		2.066	1.708 -15%	4.313 +256%

Sumber: Susilawati, LA. FKMUI, 2006

9. Pencapaian Indikator Keberhasilan

Penutup

Sebagai akibat berbagai faktor dan gejala ekonomi, jumlah masyarakat miskin cukup besar dan cenderung meningkat. Untuk mengatasi kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan maskin, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program dan program yg khusus untuk mengatasi masalah akses a.l. seperti SKTM, Kartu Sehat, JPS-BK/PKPS-BBM Bidang Kesehatan, dan mulai tahun 2005 pemerintah telah menyelenggarakan Program JPKMM - ASKESKIN. Keberhasilan program ASKESKIN sangat ditentukan oleh kerjasama dan dukungan semua pihak.*** **(Sri Astuti S. Suparmanto)**

PENGALAMAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Kondisi geografis

Kota Pekalongan berada didataran rendah jalur Pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian + 1-2 meter dari permukaan air laut.

Secara Administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan: Kabupaten Pekalongan-Batang

Dengan Luas Wilayah : 45,25 km², secara administratif Kota Pekalongan terbagi dalam 4 Kecamatan dengan 46 Kelurahan dengan Luas wilayah 4.525 ha atau sekitar 0,14 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254.000 Ha). Jarak yang membentang Kota Pekalongan dari Utara ke Selatan + 9 km, dari Barat ke Timur + 7 km.

Penduduk

Berdasarkan Data SUSENAS Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan Tahun 2006, Jumlah Penduduk Kota Pekalongan tahun 2006 adalah 268.470 Jiwa. Sementara tahun 2005 adalah 267.574 Jiwa, sehingga terjadi penambahan penduduk sebesar 0.34 %. Sedangkan jumlah Rumah Tangga juga mengalami penambahan dari 66.556 pada tahun 2005 menjadi 66.778 pada tahun 2006 atau naik 0.33%, dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga adalah 4 Jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Pekalongan cukup kecil (48,06), yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun lebih besar dari penduduk usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh pada sektor industri batik, industri tekstil dan sektor perikanan.

Pendidikan Penduduk

Pada tahun 2006, tingkat pendidikan penduduk laki-laki yang berusia 10 tahun keatas di Kota Pekalongan yang terbesar adalah SD/MI (32,07%) dan jumlah terkecil adalah D3 (1,62%). Sedangkan tingkat pendidikan penduduk perempuan berusia 10 tahun keatas yang terbesar yaitu SLTA/MA (30,48%), terkecil D3 (0,77%).

KONDISI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN PENDUDUK

Permasalahan kesehatan yang dihadapi di Kota Pekalongan antara lain adalah: Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2006 tercatat sebesar 118,27/100.000 Kelahiran Hidup (KH) menurun dibandingkan tahun 2005 yang angkanya sebesar 128,72/100.000 KH, namun secara kuantitas jumlah ibu melahirkan yang meninggal sama yaitu sebanyak 8 orang. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sebesar 6,11/1000 KH menurun dibandingkan tahun 2005 yang angkanya sebesar 14,16/1000 KH. Secara kuantitas jumlah bayi yang meninggal mengalami penurunan dari 88 bayi pada tahun 2005 menjadi 44 bayi pada tahun 2006. Pada tahun 2006 ditemukan sebanyak 7 balita gizi buruk. Semua balita gizi buruk tersebut telah mendapatkan pengobatan sesuai dengan penyakit yang diderita dan perawatan baik di RS maupun perawatan pemulihan di rumah.

Kejadian (*Incident Rate*) penyakit DBD pada tahun 2006 tercatat sebesar 1,24/10.000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 46 kasus sedangkan pada tahun 2005 angka *Incident Rate*-nya sebesar 0,84/10.000 penduduk atau terjadi sebanyak 23 kasus. Namun demikian angka ini masih berada dibawah target SPM maupun IIS 2010 sebesar < 2/10.000 penduduk. Penyakit menular lainnya yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah tingginya penderita penyakit Kusta, TBC dan Filariasis.

Kondisi kesehatan lingkungan masih perlu ditingkatkan, ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang belum mencapai target minimal 85% yaitu ketersediaan jamban/MCK baru 70,85%, Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) keluarga 77,80% dan Rumah Sehat baru 77,50%. Mayoritas masyarakat miskin menyumbang prosentase yang besar terhadap kurangnya capaian indikator kesehatan lingkungan tersebut.

Apabila dikaji maka masalah kesehatan diatas terkait dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat, perilaku masyarakat yang kurang mendukung terciptanya kondisi lingkungan bersih dan sehat, pelayanan kesehatan yang masih harus ditingkatkan dalam arti mutu dan jangkauan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta belum optimalnya sistem manajemen pembangunan kesehatan.

KONDISI SARANA PRASARANA KESEHATAN

JENIS SARANA PELAYANAN	KECAMATAN PEKALONGAN				TOTAL
	BARAT	TIMUR	UTARA	SELATAN	
I. PEMERINTAH					
- Puskesmas Perawatan	1	-	1	-	2
- Puskesmas Non Perawatan	2	3	1	2	8
- Puskesmas Pembantu	8	5	7	7	27
- Pusling	3	3	2	2	10
- Labkesda	1	-	-	-	1
- BP UMUM	1	-	1	-	2
- BP PARU-PARU	-	-	1	-	1
- Apotik (BUMN)	1	-	-	-	1
II. SWASTA					
1. Rumah Sakit	1	2	1	-	4
2. Rumah Bersalin	2	3	1	1	7
3. BP. Umum	5	7	4	2	18
4. Klinik Bedah	2	-	1	-	3
5. Klinik Kecantikan	1	2	-	-	3
6. Apotik	17	14	6	4	41
7. PBF	1	-	-	-	1
8. Industri Alkes	1	-	-	-	1
9. Laboratorium Klinik	3	-	1	-	4
10. Praktek Dokter Umum	36	26	13	9	84
11. Praktek Dokter Spesialis	16	17	8	0	41
12. Praktek Dokter Gigi	7	4	3	0	14
13. Praktek Bidan	19	12	17	9	57

Kota Pekalongan belum memiliki RSUD sendiri, baru mulai tahun ini akan merealisasikan pembangunan Rumah Sakit.

PENDUDUK MISKIN DAN PERMASALAHAN KESEHATAN

Penduduk miskin di Kota Pekalongan menurut data terakhir tahun 2006, sebanyak 100.212 jiwa (22.902 keluarga) atau 37,32%. Sebagian dari mereka masih menempati rumah yang kurang layak huni atau rumah kumuh sebanyak 5.068 rumah.

Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta rendahnya kemampuan masyarakat miskin terhadap layanan reproduksi meliputi Keluarga Berencana dan kehamilan/persalinan. Disamping itu kemampuan ekonomi yang rendah akan berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat miskin, akibatnya konsumsi makanan bergizi rendah sehingga berpotensi menderita gizi kurang, mudah terpapar penyakit-penyakit menular.

STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Salah satu misi Pemerintah Kota Pekalongan periode tahun 2005-2010 adalah: **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.** Misi tersebut telah dijabarkan dalam strategi pendekatan bagi masyarakat miskin sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan gratis di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang ditunjuk.
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui penambahan jumlah dan kualitas sarana pelayanan kesehatan termasuk mutu pelayanannya.
3. Memprioritaskan penyelesaian masalah kesehatan/penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat miskin.
4. Memprioritaskan alokasi pelbagai sumber daya yang tersedia pada daerah miskin.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program pro rakyat miskin.
6. Mengintegrasikan program Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara lintas sektoral.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Program/kegiatan sebagai upaya yang bersifat kuratif dan rehabilitatif

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Kegiatan Bantuan Biaya Rawat Jalan dan Rawat Inap bagi Penduduk Miskin dan Fasilitasi JPKMM ditujukan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat miskin akan kebutuhan dasar layanan kesehatan. Disamping anggaran dari pusat melalui program JPKMM atau ASKESKIN, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan Anggaran Pendamping untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Penyediaan dana pendamping tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin atau tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan **secara gratis** di Puskesmas, Rumah Sakit, BP4, BKMM, maupun di sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ini dapat dilayani di Puskesmas dan jaringannya, Bidan Praktek Swasta, BP4, RSUD Kabupaten Pekalongan dan 5 Rumah Sakit Swasta yang ada serta RS rujukan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaannya PT. Askes (Persero) hanya menanggung biaya pelayanan kesehatan selama pelaksanaannya sesuai dengan prosedur, obat-obatan sesuai formularium dan jenis pelayanannya sesuai pedoman. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat obat-obatan dan pelayanan lain diluar jaminan PT. Askes (Persero), maka diperlukan biaya tambahan. Untuk itulah dana pendamping di anggarkan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu biaya yang disediakan Pemerintah Kota Pekalongan dapat dipergunakan untuk

biaya akomodasi atau transportasi pada saat mengantar pasien dan biaya hidup keluarga yang mendampingi pasien yang sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Rujukan yang lebih tinggi di luar Kota sesuai dengan kebutuhan.

Prosedur atau syarat utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau dijamin oleh Askeskin maupun Dana Pendamping bagi masyarakat miskin yaitu pasien/keluarga pasien secara nyata harus dapat menunjukkan Kartu Askeskin, Kartu Sehat Maskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan .

Adapun rincian dana pendamping yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Pekalongan mulai tahun 2003 – 2007 adalah sebagai berikut :

No.	TAHUN	JUMLAH ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.	2003	75.000.000
Program/Kegiatan sebagai upaya yang bersifat promotif dan preventif		
2.	2004	125.000.000
3.	2005	350.000.000
4.	2006	600.000.000
5.	2007	1.550.000.000

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dengan mencanangkan bebas rumah kumuh tahun 2008 dan bebas kawasan kumuh tahun 2010, yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Program Percepatan pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan. Salah satu sektor yang terlibat adalah sektor Kesehatan.

Beberapa kegiatan untuk perbaikan lingkungan adalah Kegiatan Fasilitasi Rumah Sehat berupa rehab rumah kumuh, bantuan plesterisasi rumah, bantuan Pembangunan Jamban Keluarga, Rehab dan Pembangunan Sumur

Gali serta Rehab dan Pembangunan Fasilitas MCK bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2006, melalui kegiatan yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan pemberian bantuan jamban keluarga, perbaikan sumur gali, dan rehabilitasi MCK sebagai berikut :

- ▶ Jamban Keluarga sebanyak 427 unit di 39 Kelurahan.
- ▶ Perbaikan sumur gali sebanyak 234 unit di 40 Kelurahan
- ▶ Perbaikan sebanyak 2 unit MCK di 2 Kelurahan.

Sedangkan pada tahun 2007, telah dialokasikan anggaran untuk pemberian bantuan jamban keluarga, Perbaikan sumur gali, dan Rehabilitasi MCK bagi masyarakat miskin sebagai berikut :

- ▶ Jamban keluarga sebanyak 1047 unit.
- ▶ Perbaikan dan Pembangunan sumur gali sebanyak 407 unit.
- ▶ Perbaikan dan pembangunan MCK sebanyak 10 unit.

Jumlah Rumah Kumuh yang ada di Kota Pekalongan tercatat sebanyak 5.068 buah dan pada tahun 2006 telah berhasil dilaksanakan rehab dan perbaikan terhadap 1.698 rumah sedangkan sisanya sebanyak 3.370 ditargetkan selesai pada tahun 2008. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin agar penyakit-penyakit yang disebabkan oleh buruknya kualitas lingkungan perumahan pada masyarakat miskin dapat dikurangi, sehingga pada akhirnya derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat miskin umumnya bersifat klasik antara lain :

1. Masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan penempelan Stiker KK Miskin di rumah Keluarga Miskin dan melaksanakan validasi data secara berkala.

2. Kurangnya dana yang disediakan.

Ketidaktepatan sasaran dan *Moral Hazard* sebagian maskin salah satunya menyebabkan penggunaan dana menjadi lebih besar sehingga dana yang telah dialokasikan menjadi kurang.

3. Kapasitas tempat tidur pasien miskin yang kurang.

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah (RSUD). Di Kota Pekalongan terdapat

sebuah RSUD namun status kepemilikannya adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena RSUD tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan serta sekitarnya, sehingga daya tampung yang ada sering kurang dan tidak mampu menampung pasien Askeskin. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui kerjasama dengan 5 Rumah Sakit Swasta yang ada di Kota dan Kabupaten Pekalongan.

4. Kurang lancarnya pembayaran dana dari PT Askes (Persero).

Kurang lancarnya pembayaran klaim Rumah Sakit oleh PT Askes dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelayanan khususnya di RS Swasta, sedangkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk memberikan dana talangan karena terikat dengan aturan-aturan yang ada.

5. Lambatnya penerbitan kartu Askeskin oleh PT Askes berdampak pada tidak terkendalinya penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

PENUTUP

Demikianlah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani kesehatan bagi masyarakat miskin.*** **(Dwi Heri Wibawa)**

METAMORFOSIS PENOLONG KESENGSARAAN OEMOEM Lesson Learned Klinik Cuma-cuma 1 Juta Dhu'afa

*Memelihara dan menjaga MUHAMMADIYAH itu bukan pekerjaan mudah.
Oleh karena itu tetaplah berusaha dan berdoa setiap saat,
agar MUHAMMADIYAH tetap maju, berbuah dan memberi manfaat
bagi umat sepanjang masa (Pesan KH Dahlan)”*

Latar Belakang

- ▶ Hasil Muktamar 45 di Malang, pada rekomendasi internal point 1 menyatakan : “ mengaktifkan kembali kerja-kerja kemanusiaan”
- ▶ Kondisi laporan Keuangan RS PKU Muhammadiyah Gombong 2004-2005 besaran rekening pemutihan pasien tak tertagih 250 juta/ tahun ; Program MKKM dan *Governing Board* (Dewan Pengampu) mereduksi besaran dana tersebut
- ▶ *Branded image* sebagai RS swasta termahal di Kab. Kebumen
- ▶ Hampir 70 % konsumen RS dari masyarakat pinggiran dan desa; bangsal kelas III BOR 90% dan VIP 95%; Maka proyeksi pengembangan difokuskan untuk masyarakat kelas bawah dan atas (Rekomendasi Master Plan RS).

Langkah Progresif

Melakukan study banding dengan RS berbasis Carity sosial PERDHAKI; Rumah Zakat; RS Sanbe Sentosa Bandung; RS Pondok Indah Jakarta. Inti mengembangkan layanan *charity* sosial adalah :

1. Keberanian menuangkan konsep “*Corporate Sosial*” dalam kebijakan perusahaan/institusi (Visi dan Misi)
2. Harus memiliki akses dana mandiri/abadi sosial
3. Tidak tergantung dari institusi induk
4. Tidak mengembangkan basic layanan subsidi dalam 1 usaha
5. Mengkaitkan/bekerja sama pihak ketiga.
6. Strategi layanan terkonsep; terpublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Aktualisasi Konsep

1. Melakukan Perumusan terhadap Visi dan Misi Majelis KKM PCM Gombong, periode 2005-2010 dan RS dengan “*to Build the Dream of Healt Giant; Visi Muhammadiyah 2010*” dengan icon baru layanan RS “*Committe to Kaum ‘dhuafa*”
2. Membuat Blue Print (baca: master plan) perencanaan layanan masyarakat miskin dalam “*Konsep keberpihakan layanan kesehatan pada musta’dh ‘Afin*”; diresmikan Menkes 21 Juni 06
3. Menerjemahkan tolok ukur program dalam kemasan *Grand Design Bina Sosial 2006-2007* isi: “ Pengobatan gratis sepuluh ribu pasien; Khitan gratis seribu anak sholeh; OP Katarak Gratis 500 pasien; gerakan Paket “Sembako–Emie” lima ribu kantong;
4. Mengembangkan konsep Zakat Profesi yang dikelola, sebagian berpulang pada konsep *da’wah bi hal* institusi, membangun rumah zakat.
5. Merumuskan dana abadi kemanusiaan yang diambilkan dari jumlah tagihan rekening pasien.
6. Menanamkan gerakan gemar beramal dengan membentuk relawan klinik Cuma Cuma 1 juta dhuafa pada seluruh karyawan; dosen dan mahasiswa dgn kontrak hibah waktu sekali/bulan gratis melayani dhuafa.
7. Menginstitusionalisasi Klinik Cuma Cuma 1 juta dhu’afa lepas dari Institusi berada dibawah MKKM.

Langkah dan Keterlibatan Persyarikatan

1. Menyiapkan Policy kebijakan dan SK tentang gerakan keberpihakan Mustad’ Afin dilingkungan Persyarikatan Gombong.
2. Instruksi Persyarikatan untuk mengaktifkan gerakan2 kemanusiaan menjadi bagian dari program kerja seluruh AUM dan lintas Majelis.
3. Menganggarkan secara proporsional RAB Persyarikatan untuk aktivitas gerakan-gerakan kemanusiaan. (Cth.Subsidi Klinik Cuma Cuma tiap bulan).
4. Anjuran untuk mengalokasikan 15 % RAB Institusi AUMKES untuk dana2 kemanusiaan dan melaporkan keseluruhan aktivitas pada persyarikatan.
5. Bersama Governing Body RS merintis kerjasama dengan pihak III dalam pengembangan konsep keberpihakan layanan masyarakat miskin.

Kerjasama dengan Unsur Lain

1. Membuat MOU dengan PDM Banjarnegara; Cilacap; Purbalingga; Purwokerto-Banyumas dan Kebumen (inti MOU: memprioritas permintaan layanan klinik cuma-cuma)
2. Melakukan beberapa kesepakatan/ MOU dengan beberapa PCM dilingkup Kab. Kebumen.
3. MOU dengan Depkes (Dinas Tingkat I Propinsi) terhadap Bufer stok obat untuk klinik Cuma Cuma.
4. MOU dengan beberapa perusahaan farmasi untuk mendukung peran dan aktivitas sosial RS; perusahaan mitra RS lain. Bentuk lain diskon (bahasa kami Zakat) pembelian beberapa alKes alat kesehatan?? untuk Rumah Zakat.

Amanah yang Sudah Berlangsung

1. Suport dana dan kerjasama Program dari LAZIS PP. Muhammadiyah untuk *Grand Design* Bina Sosial
2. Bufer Stok obat 2006 dari Depkes Pusat RI 1 ton dan Makanan Gizi Tinggi 2 Truk Fuso.
3. Bufer Stok Obat 2007 dari Depkes Tingkat I
4. Menyelesaikan rencana pembangunan Rumah Zakat dan *Counter* Amal dipusat Pasar Gombang kerjasama PCM Gombang
5. Melayani masyarakat miskin dalam bangunan bangsal khusus MASKIN swasta pertama di Indonesia.
6. Diberi AMANAH oleh PP.Muhammadiyah dan TBF PP (Team Penanggulangan Flu Burung Muhammadiyah) untuk menjadi RS Swasta pertama rujukan flu burung. Pembangunan bangsal Flu burung swadana. Pertimbangan bencana flu burung mengkondisikan masyarakat menjadi *mustadh'afin* (dijajaki kerjasama dgn WHO,CIBAC,AUSAID)

Mengapa Klinik Cuma – cuma?

1. Sejarah munculnya PKO sebagai sebuah konsep *rohmatan lil 'alamin*, Fakta yang harus dikembang suburkan kembali.
2. *Muhammadiyah For All*, kata kuncinya adalah menebar kemanfaatan dimana mana pada siapapun juga (peniadaan eksklusivitas).
3. Konsep *qoriyah toyibah* mendekatakan idealita dakwah pada sasaran dakwah paling real yg dibutuhkan masyarakat.
4. Membangun strategi *da'wah bi hal* yang terencana guna mengimbangi dan membangun *barrier* terhadap misi da'wah agama lain.
5. Mendekatkan Muhammadiyah pada gerakan “akar rumput”, membuat hidup & maraknya cabang, ranting di daerah terpencil.

Visi dan Misi PKO KCC 1 Juta

Visi

Kembali menjadi Gerakan Penolong Kesengsaraan Omoem;
Mengembangkan citra diri persyarikatan menuju profil ideal Corporate
Sosial Responsibility AUMKES

Misi:

- ▶ Membangun jati diri gerakan persyarikatan, melalui aktivitas sosial kemanusiaan yang terencana; terstruktur berkesinambungan dan terukur.
- ▶ Menjadi wadah aktualisasi bagi kerja kerja kemanusiaan dan aktivitas *humanity care*.
- ▶ Menjadi alat dakwah Persyarikatan memerangi misi penyimpangan dan pertukaran aqidah.
- ▶ Manjadi gerakan pendorong bagi terciptanya gerakan *qoriyah toyibah* dan *civil Society*.
- ▶ Membangun sebuah tataran ideal bagi Corporate Sosial Responsibility RS PKU Muhammadiyah Gombong.

Falsafah

“BEREMPATI; BERSIMPATI dan BERBUAT demi kemanusiaan dengan penuh kasih sayang.”

Kenapa bernama PKO KCC 1 juta?

- ▶ Nama depan *PKO* adalah satu nama yang memiliki perjalanan sejarah panjang; memiliki makna filosofis dan telah akrab ditelinga masyarakat. Gerakan ini sesungguhnya adalah metamorfosis dari gerakan “Penolong Kesengsaraan Oemoem”.
- ▶ *Klinik Cuma Cuma* lain dengan klinik gratis karena tidak ada hal gratis didunia ini, apa yang para masyarakat miskin terima memang sesungguhnya adalah hak mereka, KCC hanya membuat konsep yang memudahkan para *muzaki* mengaktualisasikan dana zakat mereka.
- ▶ *Angka 1 juta* adalah angka idealita dan parametrik jumlah cakupan yang ingin dicapai.

Luas daerah cakupan

- ▶ Dengan semboyan “Jayalah dakwahku di Pesisir; Pedesaan dan Pegunungan”; harapannya layanan terkonsentrasi di 3 daerah basis kemiskinan dan potensi

kemungkinan. Sehingga telah terproteksi dan tercakup dengan baik: pesisir pantai, pedesaan terpencil dan daerah pegunungan.

- ▶ Geografis BARLINGMASCAKEP (Purbalingga, Banyumas-Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen sendiri); tambahan PDM Wonosobo
- ▶ Bergerak di 6 daerah Kabupaten dan 34 Cabang di Kebumen dan ratusan ranting; semoga dapat mengimplementasikan “*Muhammadiyah For All*”.

Susunan Organisasi

Contoh pelayanan kesehatan Muhammadiyah: *saving private Muhammadiyah*

- ▶ Klinik Cuma-Cuma di PCM Ambal
Hasil kerjasama Pemerintahan Kec. Ambal; GP-Anshor dengan PCM Ambal rangkaian kegiatan Pengobatan, Sunatan dan pembagian 1000 Paket sembako
- ▶ PKO Klinik Cuma-Cuma di PDM Kab. Cilacap

Kegiatan ini bagian dari “Road Show Pengobatan” bekerjasama dengan perhimpunan 7 Klinik Cemara Medika Jakarta. Selama 1 minggu dengan target peserta 10.000. Dana subsidi bantuan 100 Juta

- ▶ PKO Klinik Cuma-Cuma di desa Kenteng Sempor (daerah pegunungan; jumlah pasien 500 orang)
Kegiatan juga dilakukan di 4 daerah terisolir di kecamatan Sempor (a.n Desa Kedungwringin) daerah rawan Kristenisasi. Kegiatan disertai pembagian paket sembako dan kupon operasi gratis dari 10 *Muzaki* untuk 10 kasus OP Gratis di PKU Gombong.
- ▶ Klinik Cuma-Cuma Di Desa Kalitengah
Dalam rangka peringatan Milad Muhammadiyah Tema: “*Muhammadiyah For All*”. Keseluruhan Kegiatan dalam rangka Milad Muhammadiyah: 1) pengobatan massal; 2) Khitanan Masal; 3) gerak jalan santai; 4) pembagian paket sembako; 5) Wayangan Ala Muhammadiyah
- ▶ PKO Klinik Cuma-Cuma di PDM Tasikmalaya dan Pengandaran
Kerjasama dengan Pem.Kab Tasikmalaya; PCM Pengandaran, dan tokoh masyarakat setempat baik pasca bencana; maupun fase rehabilitasi tercatat melayani + 2.500 Pasien (Data Laporan Binsos).
- ▶ Klinik Cuma-Cuma di Kecamatan Gombong
Dalam rangka peringatan tahun baru Hijriyah. Kegiatan diadakan oleh Forum Ukhuwah ORMAS Se-karesidenan Kedu Salatan (NU, PERSIS, AL IRSYAD, FTJ, LDII). Kegiatan ini difasilitasi dan dimediasi oleh Pemuda Muhammadiyah dan RS PKU Muhammadiyah Gombong.
- ▶ Sunatan Masal Di Kecamatan Sempor. PKO Klinik Cuma-Cuma di Kecamatan Puring.
Kegiatan ini bertempat di daerah pesisir pantai; kantong kemiskinan.
- ▶ Klinik Cuma-Cuma di Ranting Wonokriyo
Acara Resepsi Maulid nabi ranting Wonokriyo yang disemarakan dengan festival dongeng anak se-kecamatan. Gombong. Acara juga disertai dengan penandatanganan MoU Kerjasama dengan seluruh ranting Muhammadiyah? di Gombong tentang layanan PKO klinik Cuma-Cuma.
- ▶ PKO Klinik Cuma-Cuma Di Kabupaten Wonosobo Kerjasama PDM Wonosobo
- ▶ PKO KCC 1 JUTA di Kab.Cilacap kerjasama Pemda Cilacap dan PDM Kota Cilacap.
- ▶ PKO KCC Kerjasama PCM Kuwarasan.*** **(Ibnu Naser Arrohimi)**



MEMAKNAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA, MEMPRIORITASKAN PENDIDIKAN UNTUK KAUM MISKIN

Di tengah berbagai persoalan yang mendera negeri ini, pendidikan diharapkan bisa menjadi tumpuan harapan sebagai titik berangkat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. Bukankah pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*), namun lebih dari itu juga merupakan modal kebudayaan dan modal ekonomi. Lewat pendidikan semangat berkompetisi bisa dibangun, berbagai ketrampilan bisa diasah, dan sekaligus jalan menuju demokrasi yang sehat pun dapat dikembangkan.

Sejatinya, di tengah keterpurukan bangsa, lembaga pendidikan formal (persekolahan) bisa menjadi tulang punggung bagi upaya bangsa keluar dari krisis. Sayangnya, pada kenyataannya impian ideal itu masih jauh panggang dari api. Sementara di sisi lain, keberadaan pendidikan nonformal dan informal yang banyak mengajarkan kepada kita bagaimana hidup mandiri justru belum mendapat tempat sebagaimana mestinya. Keberadaannya memang telah diakui, namun masih diperlakukan seperti anak tiri, tak lebih dari sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan nasional.

Pada saat yang sama, kita tahu bahwa pemenuhan hak atas pendidikan telah menjadi komitmen pemerintah. Demikian juga upaya penyatuan berbagai komitmen global untuk mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*). Kerangka Kerja Aksi Dakar mempertegas bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menekankan peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berbasis HAM.

Agar hak atas pendidikan dapat dipenuhi, pemerintah perlu menjamin pendidikan tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak. Pemerintah juga dituntut menghargai kebebasan para orang tua untuk memilihkan anak-anaknya dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Dua hal yang dipaparkan di atas - perlunya pengakuan dan perluasan pendidikan nonformal-informal dan pemenuhan hak atas pendidikan - memiliki kaitan yang sangat erat. Meskipun pemerintah telah menaikkan anggaran pendidikan hingga 11,8% (2007), dan pada tahun yang akan datang (2008) mencapai 12% dari total APBN, pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun karena situasi angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, ada keterbatasan dalam akses pendidikan bagi mereka yang serba kekurangan. Walaupun mereka masih bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke SD dan SMP, namun fasilitas belajar

yang dapat mereka peroleh masih jauh dari memadai. Akibatnya, anak-anak belajar dengan buku ajar dan buku bacaan lain yang sangat terbatas. Sementara itu, harga buku pelajaran dan buku bacaan lainnya sulit dijangkau oleh anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan.

Dalam konteks semacam ini, perlu adanya upaya memberikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi kesempatan mengakses pendidikan murah. Jika masalah tidak segera diatasi, satu hal pasti akan dihadapi bangsa ini adalah kehilangan satu generasi (*lost generation*) karena kebodohan dan keterbelakangan. Kemiskinan semakin menonjol karena mereka kehilangan harapan (*hopeless*) dan masa depan yang tidak menentu, sebagai akibat langsung dari keserbatidakmemadaan dalam kapasitas - pendidikan dan ketrampilan hidup.

Tiga Problem Utama Pendidikan untuk Semua

Kemiskinan dalam pendidikan bukan semata persoalan ketidakmampuan secara ekonomi. Ia juga meliputi ketiadaan akses karena geografi yang sulit dijangkau atau problem politik yang mendera masyarakat; ketidaklayakan dalam layanan pendidikan; dan adanya hambatan kultural yang membuat warga masyarakat enggan untuk belajar dan sekolah, demikian diungkapkan oleh Suyanto, Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI.

Mengingat kompleksnya kemiskinan dalam pendidikan ini, bangsa Indonesia memerlukan perangkat dan instrumen yang komprehensif agar dapat keluar dari keterbelakangan. Mengikuti Kerangka Kerja Aksi Dakar, dan komitmen global Pendidikan untuk Semua, pemenuhan akan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak bangsa harus melukiskan empat karakteristik utama: yaitu menyediakan pendidikan formal, nonformal dan informal murah bagi semua warga negara (*available*); mempermudah dan memperluas daya jangkauan warga negara terhadap pendidikan (*accessible*); menerima hak-hak asasi manusia dalam proses pendidikan (*acceptable*); dan penyesuaian pendidikan menurut minat utama setiap individu (*adaptable*).

Untuk memenuhi kerangka kerja dan komitmen di atas, problem utama yang dihadapi pemerintah dan warga negara Indonesia dapat dipetakan ke dalam tiga ruang lingkup. *Pertama*, masalah *political will* dan kebijakan negara dalam bidang pendidikan. Secara normatif dan konstitusional, Pembukaan dan pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 menggariskan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setiap warga berhak untuk menerima pendidikan. Jelas, tanggung jawab pemenuhan pendidikan ada di tangan negara yang mandatnya dipegang oleh pemerintah. Undang-undang Sisdiknas juga menggarisbawahi wajib belajar 9 tahun (*basic education*), yang dalam visi pendidikan akan dapat dicapai secara menyeluruh pada 2025. pemerintah

melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga mencanangkan tiga kebijakan Pendidikan Nasional meliputi: peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar, khususnya bagi masyarakat miskin, pedalaman, perbatasan dan terpencil; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Kehendak baik untuk memperbaiki dunia pendidikan nasional pada hakikatnya sudah tercermin dari sejumlah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Namun pada tingkat pelaksanaan masih banyak tersisa beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebagai misal, kebijakan peningkatan akses bagi masyarakat miskin belum seutuhnya menampakkan keberpihakan. Meski angka partisipasi pada tingkat sekolah dasar mencapai sekitar 95%, namun angka putus sekolah pada tingkat SLTP dan SLTA masih cukup besar. Belum lagi jumlah buta aksara yang juga merupakan problem serius negeri ini. Perluasan kesempatan belajar juga sering terkendala oleh penyebaran sekolah yang belum merata, atau ketersediaan tenaga guru di daerah terpencil dan pedalaman yang sangat minim.

Kedua, masalah pembiayaan. UUD 1945 hasil amandemen menyatakan secara eksplisit kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan di luar gaji pegawai. Anggaran pendidikan yang katanya naik menjadi 12% pada tahun anggaran 2008, pada faktanya terlihat bahwa belanja tidak langsung lebih tinggi dibanding belanja langsung. Pos belanja langsung alokasi dana yang lebih besar justru pada belanja pegawai. Hal serupa terjadi hampir di seluruh daerah, ungkap Mashab.

Skema dan sistem pembiayaan pendidikan berupa bantuan operasional sekolah — BOS, BOS Buku, hibah langsung, dan *imbal swadaya*, masih dikeluhkan banyak pihak manajemen dan pendidik di sekolah. Utamanya pada sekolah-sekolah swasta, dana BOS belum mencukupi untuk menutupi biaya operasional sekolah yang cukup besar, sementara jumlah siswa terbatas dibandingkan sekolah-sekolah negeri. Kasus seperti ini bahkan juga dirasakan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, keluh Jaena Zane.

Ada beberapa keluhan di beberapa daerah mengenai perubahan regulasi. Seperti telah disampaikan, sejak tahun 2002 telah diketahui bahwa ketika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dana pendidikan, yang terjadi di lapangan justru pemerintah daerah tidak berbuat apa-apa. Bahkan anggaran dari pusat untuk sekolah yang diberikan melalui pemerintah daerah bukan makin bertambah bahkan ada yang dihilangkan sama sekali. Menurut Hamid Muhammad, fenomena ini tentu sangat kontradiktif dengan kepedulian kita terhadap dunia pendidikan. Sekadar mengungkap contoh, dana BOS yang tercatat, hanya 10% yang memenuhi standar. Kebutuhan sekolah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun,

berimbang pada banyaknya pungutan biaya pendidikan, dan ini memberatkan bagi keluarga miskin.

Pada tahun 2004-2005 banyak sekolah protes karena tidak memiliki dana operasional yang cukup. Ketika BOS diturunkan, BOP yang seharusnya menjadi partner BOS di daerah justru dicabut. Biaya SPP yang sebenarnya tidak seberapa dan ditanggung lewat BOS, sekolah dan pemerintah daerah malah sibuk mencari cara lain untuk memperoleh dana cadangan. LKS tidak wajib bagi siswa tetapi buku wajib yang dahulu kebijakannya satu buku untuk dua anak per satu mata pelajaran, sekarang satu buku satu anak untuk per satu mata pelajaran. Harapannya dengan diberikannya dana BOS, alokasi buku dapat ditanggulangi. Pada faktanya, banyak sekolah mencari akal bagaimana bisa dapat memungut dana tambahan dari orang tua, dan celakanya lagi ini dilakukan dengan meminta regulasi dari pemerintah daerah sehingga pungutan itu menjadi legal.

Biaya pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana perintah undang-undang. Ketika dana BOS tidak mencukupi, maka pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan subsidi, meskipun BOS dan BOP sudah optimal, masih saja ditemukan slot untuk menarik sumbangan padahal masyarakat miskin seharusnya bebas biaya, apapun alasannya. Biaya buku dan transport saja yang harus ditanggung oleh orang tua.

Tentang skema pembiayaan pendidikan, Suhirman mengusulkan agar biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya pendidikan masing-masing sekolah, dibagi jumlah siswa dan hasilnya adalah jumlah biaya yang ditanggung siswa di dalam sekolah termasuk biaya transport. Biaya total pengeluaran untuk pendidikan adalah gabungan dari biaya untuk seragam, buku dan lain-lain, bukan hanya SPP. Dengan kata lain, biaya pendidikan bukan hanya komponen SPP, bahkan komponen-komponen di luar SPP nominalnya justru lebih besar. Untuk memenuhi kebutuhan total biaya pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari pusat. APBD juga harus menunjukkan keberpihakan alokasi anggaran pendidikan (khususnya untuk masyarakat miskin), sebagai investasi di bidang sumber daya manusia dengan mencerdaskan anak-anak bangsa.

Dalam hal tanggung jawab pembiayaan pendidikan untuk masyarakat miskin, kita juga sering menghadapi apatisme korporasi dan masyarakat. Menurut paparan Rudi, pengeboran minyak oleh Exxon di Blok Cepu yang sangat kaya itu, ternyata tidak memberi dampak bagi peningkatan akses pendidikan. Keprihatinan muncul ketika melihat kondisi sebuah SD tetangga Exxon yang kondisinya sangat memprihatinkan dan mau roboh.

Ketiga, masalah kelembagaan. Peningkatan akses dan perluasan layanan pendidikan tidak mungkin dapat tercapai jika mengandalkan lembaga-

lembaga pendidikan formal, dan mengesampingkan pendidikan non-formal dan informal. Sayangnya lembaga-lembaga pendidikan non-formal dan informal belum mendapat tempat yang layak di mata pemerintah. Pendidikan alternatif seperti SMP dan SMA Terbuka, Paket A,B,C, masih dinomorduakan. Memberikan pendidikan layanan khusus bagi anak daerah terpencil, anak jalanan, anak daerah kumuh, anak daerah konflik, dan pekerja anak juga masih jauh dari harapan. Persoalan yang terakhir ini mendesak partisipasi masyarakat secara lebih luas. Ada secercah harapan ketika inisiasi sekolah rumahan terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat. Berharap bahwa sekolah rumahan ini tidak kalah kualitasnya dari sekolah formal yang penuh dengan disiplin tubuh. Namun program inovatif semacam ini menghadapi kendala pembiayaan. Anggaran daerah tidak serta merta dapat menunjang program yang bersifat inovatif ini karena anggaran di luar pos yang telah ditetapkan harus mendapat ijin dari pusat.

Prinsip-prinsip Kemandirian dalam Pendidikan

Ada sejumlah pilihan untuk menjawab problem ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas dan adaptabilitas pendidikan untuk masyarakat miskin. Pilihan ini dihadirkan oleh lahirnya beragam pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh masyarakat. Rupanya lembaga-lembaga pendidikan formal yang sudah mapan jarang menawarkan pilihan semacam ini, sebagaimana terjadi dalam Muhammadiyah misalnya. Meski pengalaman Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah dan ratusan pendidikan tinggi sudah terbilang lama, namun pendidikan alternatif tidak banyak muncul dari rahim ormas Islam ini.

Kritik atas kemandulan lembaga pendidikan Muhammadiyah melakukan inovasi misalnya, dikemukakan oleh Rudi. Ia melihat Muhammadiyah tidak komunikatif memberikan *statement* untuk inovasi pendidikan ke depan dengan cara memberikan contoh dan alternatif. Kader Muhammadiyah yang duduk sebagai menteri pendidikan sudah banyak, namun dalam konteks pendidikan alternatif Muhammadiyah masih ketinggalan.

Untuk kasus pendidikan alternatif, kita bisa belajar dari siapa pun. Muhammadiyah selalu terbuka untuk mengambil hikmah dari manapun datangnya. Kisah pengembangan pendidikan alternatif model Qoryah Toyyibah yang dimotori oleh Bahruddin di Kalibening, Salatiga misalnya, memberikan teladan bagaimana pendidikan dibangun di atas prinsip-prinsip kemandirian, baik dari segi kebijakan, pembiayaan maupun kelembagaan.

Beberapa prinsip kemandirian dapat disarikan dari pengalaman pengelolaan pendidikan alternatif antara lain: *Pertama*, pendidikan sebetulnya bukan mengajarkan anak, tetapi menemani anak dalam proses menjadi diri sendiri,

bukan menjadikan anak dengan mencetaknya. Metode konvensional ini harus diubah dengan membangun kemandirian berpikir anak untuk mendapatkan nilai lebih. Dengan cara ini akhirnya mereka dapat berpikir untuk menjadikan dirinya lebih baik.

Kedua, belajar bukan sekolah. Pendidikan untuk anak-anak miskin yang terlantar di jalanan sebetulnya sama saja polanya. Jangan berpikir pendidikan untuk mereka adalah pendidikan sekolah yang formal. Tujuannya sebetulnya adalah belajar bukan sekolah. Yang paling penting adalah tidak masalah jika anak putus sekolah, tapi jangan sampai putus belajar. Seringkali terjadi putus belajar justru di sekolah-sekolah formal, seperti contoh pada saat guru tidak hadir justru mereka senang jadi tidak belajar.

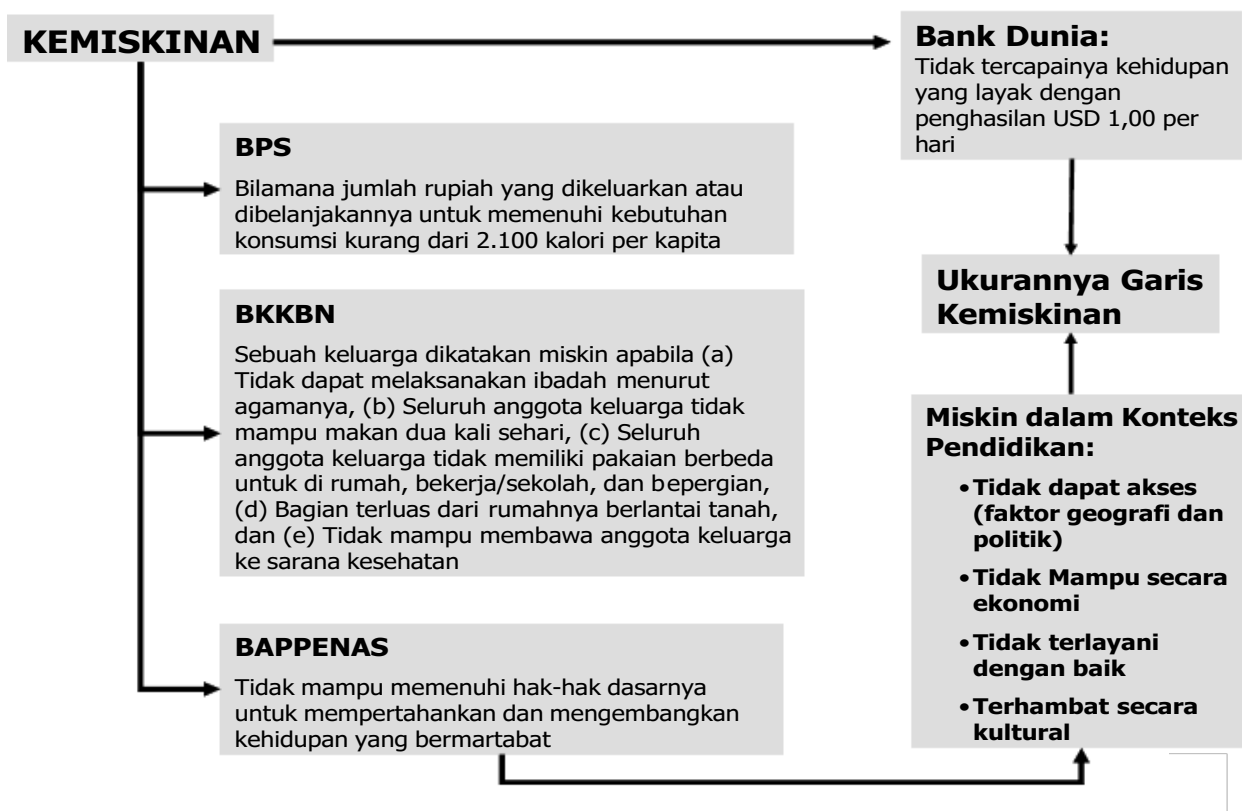
Ketiga, adaptasi kurikulum sesuai heterogenitas anak, bukan penyeragaman. Pendidikan kita sampai hari ini masih berbentuk penyeragaman, bahkan kurikulumnya pun cenderung berorientasi produk, bukan proses. Contoh kasus, di sekolah ada pelajaran menggambar, padahal tidak semua siswa senang menggambar. Berarti siswa yang tidak suka atau tidak bisa menggambar termasuk korban yang kemudian mendapatkan nilai jelek dan dicap sebagai anak yang bodoh. Tentu saja cara seperti ini melanggar prinsip adaptabilitas, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Keempat, swadaya dan tidak bergantung pada pembiayaan negara, juga tidak berhutang kepada pihak luar negeri. Dengan segala keterbatasan, kita tetap maju dalam kemandirian. Kita tidak *bergantung pada apa pun dan siapa pun!* Bahwasannya negara harus bertanggungjawab untuk pembiayaan, tetap niscaya dituntut karena itu hak semua warga negara. Merebut hak atas pendidikan dari pemerintah hukumnya wajib, meski kita tidak boleh bergantung pada pemerintah.

Kelima, pendidik yang berkualitas. Pendidik sejati adalah mereka yang mampu membangun semangat belajar anak didik tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Mereka bisa bebas belajar kapan dan di manapun, dari siapa pun.

Akhirnya, pendidikan untuk semua, dalam konteks keterpurukan dan krisis berkepanjangan, harus dimaknai sebagai pendidikan untuk orang miskin. Dengan demikian, semua modalitas kebijakan, pembiayaan dan kelembagaan harus menempatkan masyarakat miskin sebagai sasaran utama program-program pendidikan. Saatnya APBN/APBD merealokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan secara sungguh-sungguh.*****(Editor)**

KEBIJAKAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

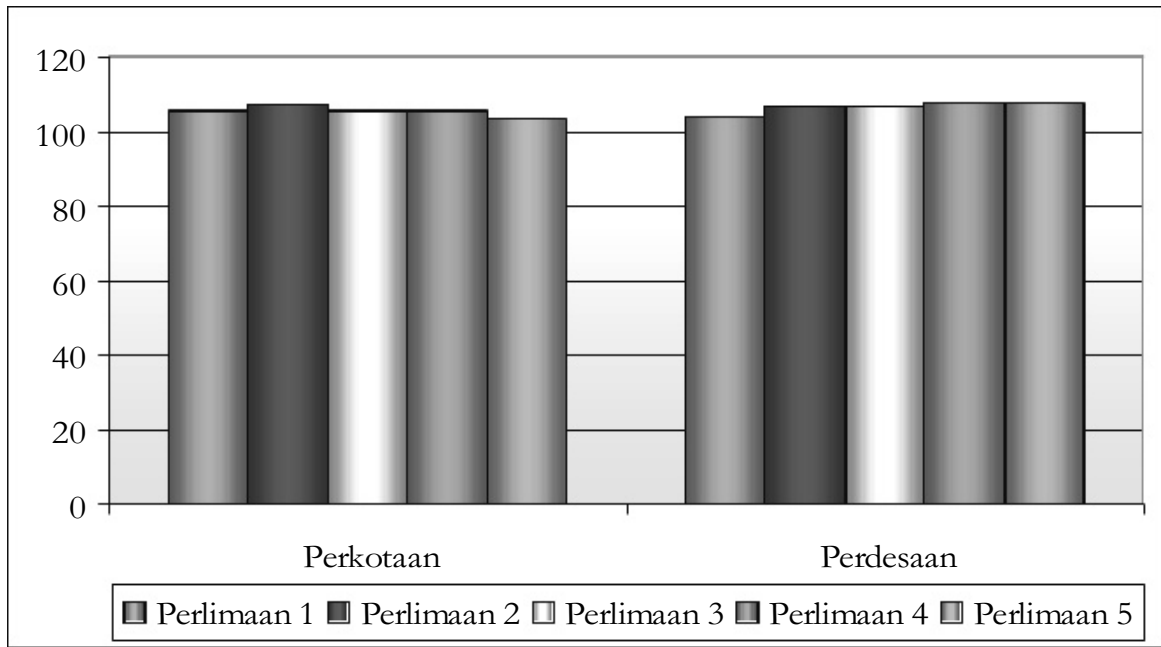


Akses Terhadap Pendidikan Dasar

Angka partisipasi kasar SD/MI menurut tingkat pengeluaran keluarga, tempat tinggal dan jenis kelamin

Tingkat Pengeluaran	Perkotaan			Perdesaan			Perdesaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Perlimaanan 1	105,61	105,84	105,72	103,73	104,46	104,08	104,51	105,03	104,76
Perlimaanan 2	107,22	107,20	107,21	106,05	107,18	106,59	106,53	107,19	106,84
Perlimaanan 3	105,99	104,41	105,24	106,48	106,38	106,43	106,28	105,58	105,94
Perlimaanan 4	106,95	103,71	105,39	107,50	108,00	107,74	107,27	106,21	106,76
Perlimaanan 5	103,20	103,37	103,28	107,34	108,08	107,69	105,67	106,12	105,89
Rata-rata	105,96	105,10	105,55	106,01	106,61	106,30	105,99	105,99	105,99

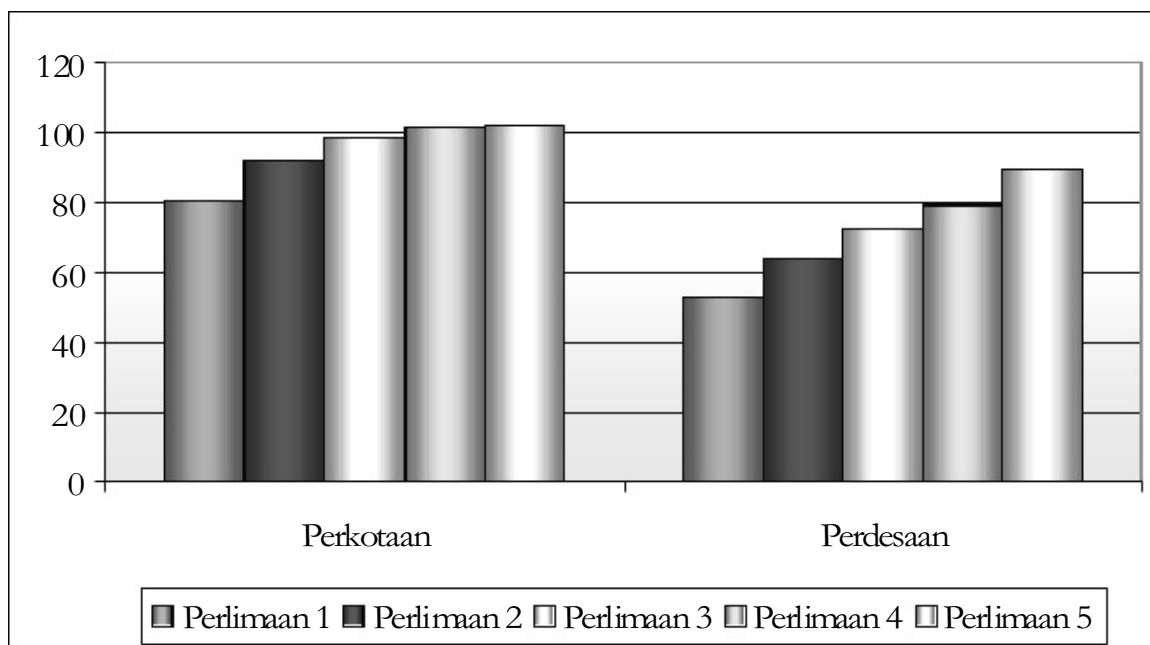
APK SD/MI menurut kemampuan ekonomi di perdesaan dan perkotaan:



Akses Terhadap Pendidikan Dasar

Angka partisipasi kasar SMP/MTs menurut tingkat pengeluaran, tempat tinggal dan jenis kelamin:

APK SMP/MTs menurut kemampuan ekonomi di pedesaan dan perkotaan:



Kebijakan Pendidikan Nasional

- ▶ Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar, khususnya bagi masyarakat miskin, pedalaman, perbatasan dan terpencil.
- ▶ Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- ▶ Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

Peningkatan Akses

- ▶ Membangun unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) bagi daerah yang membutuhkan.
- ▶ Mengembangkan pendidikan dasar terpadu (SD-SMP satu atap) dan pendidikan menengah terpadu (SMP-SMA; SMP/SMK) di daerah-daerah terpencil, kepulauan dan terisolasi.
- ▶ Memberdayakan pendidikan alternatif: SMP/SMA Terbuka, Paket A,B,C; Pesantren Salafiyah (Ula, Wustha, Ulya), dsb.
- ▶ Memberikan pendidikan layanan khusus bagi: anak daerah terpencil, anak jalanan, anak daerah kumuh, anak daerah konflik, pekerja anak.
- ▶ Menekan jumlah anak mengulang kelas dan putus sekolah melalui: beasiswa, pemenuhan kondisi minimal untuk belajar, dan peningkatan efektivitas pembelajaran.
- ▶ Penataan dan standarisasi sistem pembiayaan pendidikan (bantuan operasional sekolah- BOS, BOS Buku; hibah langsung; *imbal swadaya*).

Peningkatan Mutu Pendidikan

- ▶ Pengangkatan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi tenaga kependidikan.
- ▶ Pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar (termasuk rehabilitasi sekolah tidak layak pakai), buku dan alat pembelajaran minimal.
- ▶ Peningkatan proses pembelajaran yang efektif (berbasis kompetensi, kecakapan hidup, belajar tuntas, mendorong kreativitas).
- ▶ Pelaksanaan sistem penilaian pendidikan yang meliputi: *penilaian berbasis kelas* dan *ujian nasional* untuk mengukur kompetensi siswa.
- ▶ Pelaksanaan akreditasi sekolah untuk menentukan tingkat kelayakan suatu lembaga dan program pendidikan.
- ▶ Pelaksanaan kompetisi akademik dan non akademik tingkat lokal, nasional dan internasional.

Peningkatan Efisiensi Manajemen dan Akuntabilitas Publik

- ▶ Meningkatkan sistem manajemen informasi, perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi program di semua tingkatan manajemen: pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
- ▶ Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya pendidikan (orang, dana, fasilitas, dsb).
- ▶ Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya dewan pendidikan dan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- ▶ Meningkatkan pengawasan dan transparansi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka akuntabilitas publik.
- ▶ Mendorong efektivitas penyelenggaraan otonomi pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota.

*** **(Suyanto)**



MEMBERDAYAKAN SI KECIL, MENEGAKKAN OTORITAS KAUM MISKIN

Kemiskinan bisa bermakna ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan orang miskin bukan semata disebabkan mereka tidak memiliki kapasitas – pendidikan dan keterampilan hidup – namun juga minimnya otoritas yang mereka punyai. Bahkan meningkatnya angka kemiskinan di negeri ini, dan juga di banyak negara-negara dunia ketiga – lebih menonjol dilahirkan oleh sejumlah problem struktural. Sebagian mereka terdidik dan terampil, namun tidak cukup daya dukung struktural yang membuat mereka terpinggirkan, dan mengalami hambatan-hambatan sistematis dari berbagai kebijakan pembangunan untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Inilah yang kemudian biasa disebut sebagai pemiskinan (*impoverishment*).

Proses marjinalisasi terhadap masyarakat miskin ini sangat mudah ditemukan dalam berbagai peristiwa penggusuran perumahan, penggusuran pedagang kaki lima, pembakaran secara sengaja pasar-pasar tradisional di banyak tempat. Semua itu dilakukan atas nama pembangunan. Padahal pedagang kaki lima dan pasar tradisional adalah sentra sektor informal dan ekonomi mikro yang sangat fleksibel dalam menampung jumlah pengangguran dan menawarkan banyak lapangan pekerjaan. Pembakaran pasar tradisional yang dilakukan oknum tertentu secara sengaja, menurut Ramadhan, sama artinya ancaman bagi usaha skala mikro. Penggusuran PKL juga merupakan penistaan bagi mereka. Sementara itu, ketika negara mengalami krisis ekonomi, terbukti sektor ini tetap mampu survival meski tidak pernah dibela, bahkan lebih sering menderita *dikuyoh-kuyoh* penguasa dan pengusaha skala besar, dan sangat jarang memperoleh perhatian apalagi bantuan dana pemerintah. Inilah nasib tragis suatu segmen yang disebut ekonomi mikro.

Pemiskinan “Otoritas” Ekonomi Mikro

Menurut Joko Widodo (Walikota Solo), pemberangusan otoritas masyarakat miskin dalam segmen ekonomi mikro juga terjadi karena ketidakpedulian pemerintah dan DPR/D untuk mengorganisir para pedagang kaki lima. Penggusuran PKL sering terjadi tanpa adanya relokasi yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan manusiawi. Pembakaran pasar tradisional sebagian karena desakan kepentingan para pedagang dan atau pengusaha

besar, melalui kolusi dengan penguasa, dan menggantinya dengan bangunan-bangunan pasar swalayan, mall, retail, dan pusat-pusat perdagangan modern-kontemporer.

Problem otoritas atau struktural yang biasa dihadapi usaha ekonomi skala mikro, menurut Achmad Suud (Manager Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa, Pekalongan.), meliputi dua hal: kesulitan mereka mengakses kredit mikro; dan tiadanya perlindungan dan jaminan atas modal bagi usaha mereka. Orang-orang kecil dengan usaha skala kecil ini seringkali tidak tahan dengan kerumitan dan jalan panjang urusan kredit dari perbankan. Pada saat yang sama perbankan juga sama sekali tidak tertarik untuk melirik mereka sebagai pangsa pasar untuk penyaluran kredit, apalagi peduli memberikan bantuan kredit yang berorientasi sosial tanpa bunga. Jangkauan perbankan kepada usaha skala mikro sangat terbatas. Akses mereka menjadi tidak mungkin ketika mensyaratkan agunan untuk pengambilan kredit. Di samping itu, perlindungan dan jaminan pemerintah atas eksistensi mereka dan bantuan modal sangat lemah, jika tidak dikatakan nihil.

Situasi semacam ini seringkali dimanfaatkan oleh “bank titil” (renternir) dengan sistem ijon, yang pada akhirnya tidak pernah dapat memutus mata rantai kemiskinan di kalangan usaha ekonomi mikro. Ini merupakan tantangan nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan sektor ekonomi mikro.

Pemberdayaan Otoritas

Dua problem utama ekonomi mikro sebagaimana dipaparkan di muka, membutuhkan jawaban konseptual dan praktis yang bijak dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan keberdayaan sektor ini. Kelangkaan akses kredit mikro di perbankan adalah peluang bagi lahirnya sejumlah lembaga keuangan masyarakat yang mampu memberikan bantuan modal, kemudahan akses, dan fleksibilitas layanan. *Baitul Maal* wa Tamwil adalah jawaban konkret atas masalah ini. Meskipun secara legal, lembaga-lembaga semacam ini belum memperoleh payung hukum yang kokoh, dengan tanpa mau kehilangan peluang, ribuan BMT berdiri dengan menyiasati payung hukum koperasi.

Secara lebih sistemik, pemberdayaan otoritas ekonomi mikro dapat meliputi berbagai aspek sebagai berikut: *Pertama*, membuka akses seluas-luasnya bagi kredit usaha mikro. Ini berkaitan dengan ketersediaan lembaga-lembaga keuangan masyarakat dalam hal pendanaan. Partisipasi masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah, NU, dan banyak pihak dalam pendirian BMT di berbagai wilayah, patut dihargai. Dibandingkan lembaga-lembaga keuangan

masyarakat konvensional semacam koperasi, BMT memiliki kelebihan dalam bidang pembiayaan. Secara umum, menurut Achmad Suud, akad bisnis dalam sistem ekonomi syariah meliputi: pembiayaan sosial (*tabarru*) dan pembiayaan komersial (*tijarah*). Perbedaan akad bisnis ini memberikan keuntungan bagi usaha mikro. Menggunakan skema pembiayaan sosial, BMT dapat memberikan bantuan kredit mikro tanpa bagi hasil. Debitor hanya diwajibkan mengembalikannya pokok modal. Tentu saja skema ini diberikan bagi mereka yang baru memulai usaha, atau terkena musibah bencana alam, kebakaran dan sebab lainnya yang membuat mereka kehabisan atau bahkan defisit modal. Skema ini dibiayai oleh zakat, infak, dan sadaqah sebagai fungsionalisasi baitul maal. Sementara itu, pembiayaan yang berorientasi profit melalui bagi hasil diperuntukkan bagi mereka yang telah mulai mapan usahanya, dan memiliki niat untuk mengembangkan usahanya. Ini merupakan fungsionalisasi *baitut tamwil*. Nilai tambah lain adalah bahwa visi BMT berpihak kepada masyarakat kecil dan menjunjung tinggi kebersamaan dan musyawarah mufakat. Dengan demikian, sistem syariah lebih memiliki keluasaan dan keluwesan dalam menjawab problem ekonomi mikro daripada Koperasi Jasa Simpan Pinjam misalnya, ungkap Dumairi Noor, pengurus koperasi pesantren di Sidogiri.

Pendanaan secara tidak langsung bisa diwujudkan dalam bentuk revitalisasi pasar-pasar tradisional sebagai tempat usaha ekonomi mikro. Tentu saja peran ini dapat diambil oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan DPRD, menurut Joko Widodo, membuat keputusan tentang pembiayaan pembangunan kembali pasar tradisional yang dialokasikan dalam APBD. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah bisa melibatkan partisipasi investor, koperasi, dan perbankan atau BUMN.

Kedua, perlindungan hukum atas dua hal: aset ekonomi dan tempat untuk usaha. Sampai saat ini belum ada ketetapan hukum yang pasti untuk memberikan jaminan legalitas atas BMT dan lembaga keuangan semacamnya. Baru undang-undang koperasi yang ada, dan ini dimanfaatkan untuk membuat terobosan bagi legalitas BMT. Perlindungan hukum atas aset usaha ekonomi mikro perlu memperoleh penekanan dari pemerintah dan legislatif. Selama ini, para pelaku usaha ekonomi mikro – PKL dan sektor informal umumnya – hanya ditarik pajak retribusi oleh pemerintah setempat untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah. Namun pada saat yang sama, keberadaan mereka selalu jadi kambing hitam kesemrawutan dan kekumuhan kota, diusir, digusur dan dirampas hak-hak ekonominya. Belum ada satu pemerintah daerah dan DPRD pun yang melakukan terobosan untuk melegalisasi aset ekonomi mikro, seperti hak guna bangunan di mana mereka

berusaha, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sebagai agunan untuk mengakses kredit perbankan.

Ketiga, partisipasi pelaku ekonomi mikro dalam proses pengambilan keputusan. Program-program pembangunan yang melibatkan pelaku usaha ekonomi mikro perlu dilibatkan dalam diskusi dan proses *decision making*. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo dalam proses relokasi PKL ke pasar Klithikan misalnya, dapat dijadikan contoh. Menurut Joko Widodo, setiap gagasan dan isu yang berhubungan dengan program pembangunan demi kemajuan daerah selalu dikomunikasikan dan disosialisasikan melalui koran daerah. Berbagai komentar dan masukan ditampung. Pihak-pihak pemangku kepentingan diundang untuk membahas dan merumuskan program. Para PKL dalam hal ini terlibat dalam proses negosiasi untuk menemukan kompromi bersama.

Keempat, kontrol dan pengawasan atas keputusan yang sudah diambil. Pada tahap ini memang sering dijumpai kesulitan, bagaimana pengusaha ekonomi mikro bisa terlibat untuk mengawasi kesepakatan yang sudah dicapai. Bagaimanapun keberpihakan kepada ekonomi mikro itu pada akhirnya mesti memasuki wilayah politik. Alangkah makin mantap bila pelibatan pelaku ekonomi mikro tidak berhenti dalam menentukan kebutuhan dan kepentingan mereka, memutuskan kebijakan secara bersama-sama dengan kelompok kepentingan lain. Sesudah partisipasi dapat diraih, usaha berikutnya adalah memosisikan mereka sebagai bagian dari pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau keputusan penting bagi mereka. Partisipasi dalam pengambilan keputusan saja belum cukup. Melakukan kontrol (*controlling*) atas bagaimana implementasi kebijakan itu berjalan memungkinkan para pelaku ekonomi mikro dapat menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan sosial-ekonomi mereka.

Jika empat strategi di atas dijalankan secara simultan dan komprehensif, pemberdayaan ekonomi mikro menjadi lebih dari sekedar meningkatkan kesejahteraan yang merupakan pemenuhan atas hak-hak ekonomi para pelaku. Strategi ini juga dapat mengangkat harkat dan martabat mereka. Hak-hak sipil dan politik mereka diakui karena diakomodasi dalam proses partisipasi dan kontrol atas kebijakan pembangunan. *Partisipasi* dan *kontrol* membuat mereka memiliki otoritas dan kekuatan tawar di hadapan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.*** **(Editor)**

AKSES DAN PROTEKSI UNTUK MASYARAKAT MISKIN TERHADAP MODAL

Pengalaman Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa Pekalongan

Pengantar

Salah satu masalah struktural yang harus segera diatasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi mikro adalah memberikan akses permodalan yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas, mudah, dan murah.

Akses terhadap permodalan ini sangat diperlukan karena pada umumnya usaha mikro tidak *bankable*. Pengusaha mikro biasanya mengalami kesulitan untuk memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan. Hal itu, antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan, seperti menyediakan *collateral* yang memadai, serta perijinan usaha guna mendukung fasilitas kredit yang diminta. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut akan menggiring mereka dengan terpaksa mencari alternatif permodalan dari sumber-sumber informal yang relatif mudah namun berbiaya tinggi. Dengan mengambil dana berbiaya tinggi, maka keuntungan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga peluang untuk melakukan usaha pempukan modal nyaris tertutup. Akibatnya, mereka terjebak dalam kondisi ketidakberdayaan secara permanen.

Di pihak lain, lembaga perbankan sendiri pada kenyataannya juga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan modal pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah, karena berdasarkan pertimbangan efisiensi tidak mungkin lembaga perbankan akan membuka kantor pelayanan yang bisa menjangkau ke seluruh pelosok di mana pengusaha mikro berada. Di samping itu, lembaga perbankan juga akan mengalami kesulitan dalam melayani pengusaha mikro karena kecilnya skala kredit, serta jumlah pengusaha mikro yang sangat besar dan menyebar

Sementara itu, penyaluran kredit program skala kecil secara massal juga tidak bisa diandalkan sebagai model pembiayaan untuk seluruh usaha mikro di masa depan, karena pada program tersebut volume dana yang tersalur relatif kecil dibandingkan dengan jumlah pengusaha mikro yang ada, jenis usaha mikro yang sangat beragam. Selain itu, prospek serta dinamika jenis usaha

yang diprogramkan seringkali berubah lebih cepat dari pada perubahan kebijakan kredit yang diberlakukan, sehingga resiko kredit menjadi besar dan secara empiris kinerjanya dalam pengembalian kredit dan penguatan lembaga keuangan lokal tidak memuaskan.

Bertolak dari fenomena di atas, maka untuk mengangkat pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah diperlukan lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan pelayanan dalam penyediaan modal secara fleksibel dan dapat diakses secara mudah dengan biaya relatif murah, sehingga memungkinkan mereka dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menghimpun permodalan yang pada gilirannya nanti diharapkan mereka menjadi berdaya.

Peranan Lembaga Keuangan Mikro.

Di negara kita, sekarang ini telah berkembang berbagai jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kehadiran lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta kelompok pengusaha mikro yang selama ini tidak terjangkau oleh pelayanan jasa keuangan perbankan. LKM ini keberadaannya cukup strategis, karena memiliki keunggulan yang relatif tidak dimiliki oleh bank umum, seperti lokasi yang mudah dijangkau, keluwesan dalam memberikan pelayanan serta kemampuan pengelola LKM dalam memahami kebutuhan dan budaya masyarakat setempat karena kedekatannya secara psikologis dan kekeluargaan antara pengelola LKM dengan nasabahnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LKM mampu menembus kantong-kantong kemiskinan melalui berbagai jenis pembiayaan yang disalurkan. Di berbagai tempat, keberadaan LKM ini dapat menempatkan dirinya sebagai mitra pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan usaha-saha produktif. Peranan yang dimainkannya dalam memberikan akses dan proteksi masyarakat miskin terhadap modal di banyak tempat, telah menempatkan LKM sebagai salah satu agen dalam pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, di balik keunggulannya yang sangat strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut, keberadaan LKM dalam menjalankan usahanya masih menghadapi berbagai kendala, sehingga tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal. Secara internal kendala yang paling menonjol biasanya berupa minimnya permodalan yang dimiliki dan terbatasnya dana yang harus disalurkan, serta lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kemudian muncul anggapan sebagian orang, bahwa lembaga yang berbasis kerakyatan seperti LKM dikelola secara tidak profesional, sehingga sulit untuk berkembang dan tidak dapat dipercaya. Kesan demikian muncul akibat secara empiris pengalaman yang ada menunjukkan tidak sedikit LKM yang kurang berjalan dengan baik, bahkan ada yang kemudian merugikan anggota dan masyarakat.

Untuk menghapus kesan tersebut, maka secara internal LKM perlu memperbaiki diri dengan menerapkan pendekatan manajemen modern. Agar dapat menjalankan usaha LKM secara profesional, paling tidak ada 2 (dua) unsur yang harus dibenahi. *Pertama*, sistem organisasi yang meliputi sistem operasi, manajemen dan hal-hal lain yang terkait harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin keamanan operasional organisasi secara baik. *Kedua*, pengelola sebagai pengoperasi sistem harus memiliki moral yang baik (*akhlaqul-karimah*), karena sistem tidak akan dapat berarti apa-apa, bila berada (dioperasikan) oleh mereka yang bermoral rendah.

Kemudian secara eksternal meskipun peran dan fungsi LKM secara riil dapat dirasakan oleh masyarakat luas, namun secara struktural keberadaannya belum mendapat perhatian dan perlindungan dari penyelenggara negara secara proporsional.

Secara kelembagaan, sebagian besar LKM yang ada sekarang ini berbadan hukum koperasi. Pilihan untuk menjadikan koperasi sebagai payung hukum LKM sesungguhnya merupakan suatu keterpaksaan yang tidak dapat dihindari, karena sementara ini hanya itulah yang tersedia. Dengan berbadan hukum koperasi, ruang gerak LKM banyak berhadapan dengan berbagai keterbatasan, sehingga dalam praktek tidak sedikit LKM yang dengan terpaksa melanggar *grey area* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk melindungi keberadaan LKM diperlukan adanya kepastian hukum dalam masalah kelembagaan yang lebih spesifik sesuai peran dan fungsi LKM. Karena itu, adanya undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan sesuatu yang mendesak kehadirannya.

Selanjutnya untuk lebih memberdayakan keberadaan LKM, perlu adanya pembinaan serta fasilitas yang berkelanjutan. Selama ini memang ada sebagian departemen yang mengalokasikan bantuan dan fasilitas pemerintah melalui LKM. Namun hal itu baru terbatas pada kebijakan departemen yang bersangkutan-kebetulan pejabat yang ada di sana mengetahui dan peduli terhadap keberadaan dan peran yang dapat dimainkan oleh LKM. Belum ada kebijakan pemerintah yang terstruktur dan terencana.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, perlu dibangun hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan LKM. Di satu pihak pemerintah

berkepentingan untuk mengurangi beban sosial, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta meringankan rakyat dari kemiskinan. Sementara di pihak lain, keberadaan LKM secara riil dibutuhkan namun perkembangannya terkendala, baik secara finansial maupun struktural. Selama ini berbagai sumber daya dan dana telah mengalir kepada masyarakat lewat berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah, namun efektivitas penyaluran dan pengawasannya banyak diragukan.

Dengan menempatkan keberadaan LKM sebagai salah satu ujung tombak dalam penyaluran berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah, insya Allah fasilitas dan bantuan tersebut akan lebih tepat sasaran karena pengelola LKM berdasarkan pengalaman sehari-hari lebih memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dan budaya masyarakat setempat, serta memiliki parameter yang selama ini cukup teruji dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan menempatkan LKM sebagai salah satu ujung tombak penyaluran fasilitas dan bantuan pemerintah, maka keberadaan LKM akan lebih berdaya, sehingga mampu menjalankan fungsinya lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan yang relatif murah.

Lebih dari itu, hendaknya juga dapat dikembangkan kerja sama yang lebih luas antara pemerintah dengan LKM. Kerja sama tersebut dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain berupa penempatan dana, pinjaman subordinasi, maupun berupa penyertaan. Melalui kerja sama ini pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif, karena selain berkepentingan terhadap keselamatan dana yang disalurkan, juga dalam rangka memberdayakan keberadaan LKM agar lebih fungsional.

Sekilas tentang Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Wiradesa didirikan tanggal 5 Januari 1996. Pada saat didirikan kelembagaannya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan berada di bawah binaan Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah (YBMM). YBMM sendiri adalah merupakan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Dengan adanya UU 29/1999, PHBK kemudian dihapus, sehingga keberadaan LPSM juga ikut terhapus dan semua KSM yang berada dibawah binaan LPSM harus mengusahakan Badan Hukum. Sekarang ini Badan Hukum BTM Wiradesa berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Modal awal BTM Wiradesa sebesar Rp 25 juta dan berasal dari hibah. Sesuai amanah pemberi hibah, dana tersebut kemudian semuanya disalurkan untuk pemberdayaan golongan ekonomi lemah melalui fasilitas Pinjaman Kebajikan

(*qordhul hasan*). Penerima pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman, dan apabila mampu mereka disarankan untuk berinfaq.

Agar keberadaan BTM Wiradesa bisa mandiri, pengurus BTM Wiradesa memandang perlu untuk melakukan pengembangan usaha. Selain mengelola dana hibah, BTM Wiradesa kemudian diarahkan menjadi lembaga mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan atau membutuhkan dana. Tanpa melakukan pengembangan usaha, BTM Wiradesa akan kesulitan untuk membiayai kegiatan usahanya, karena pendapatannya hanya berasal dari infaq yang sifatnya sukarela dan jumlahnya relatif kecil.

Dengan menjadi lembaga mediator, keberadaan BTM Wiradesa diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat lebih optimal, sebab selain bisa berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pilihan untuk menjadi lembaga mediator juga didasari oleh suatu pertimbangan, agar dana yang ada di tengah masyarakat dapat bermanfaat lebih optimal bagi masyarakat yang bersangkutan, karena selama ini dana-dana dari daerah yang dihimpun oleh bank-bank umum pada kenyataannya kurang memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang bersangkutan, sebab sebagian besar dana tersebut lari ke pusat.

Secara umum kegiatan usaha yang dijalankan oleh BTM Wiradesa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha mikro melalui kegiatan penyaluran pembiayaan, investasi, dan simpanan. Dalam menyalurkan pembiayaan, secara garis besar BTM Wiradesa melakukannya melalui dua jenis pelayanan, yaitu :

1. Pembiayaan untuk Kepentingan Sosial.

Pembiayaan untuk kepentingan sosial ini disalurkan melalui fasilitas Pinjaman Kebajikan (*qordhul hasan*), yaitu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, karena dari penyaluran pinjaman ini, secara ekonomis BTM Wiradesa tidak mendapatkan keuntungan.

Pinjaman *qordhul hasan* ini diarahkan sebagai stimulus bagi pemberdayaan golongan ekonomi lemah dan masyarakat miskin. Bentuknya antara lain berupa modal awal bagi mereka yang akan memulai usaha. Sehubungan dengan penyaluran pinjaman ini, pengelola BTM Wiradesa mengalokasikan dana dalam jumlah tertentu dari portofolio pembiayaan yang disalurkan untuk pinjaman *qordhul hasan*.

Melalui penyaluran pinjaman *qordhul hasan* ini diharapkan penerima pinjaman dapat memberdayakan dirinya melalui usah-usaha produktif. Setelah mandiri, mereka diarahkan untuk dapat mengembangkan usahanya dengan dukungan modal yang lebih besar yang berasal dari pembiayaan komersial yang lebih berorientasi bisnis.

2. Pembiayaan Komersial.

Dalam menyalurkan pembiayaan komersial yang lebih berorientasi bisnis, BTM Wiradesa mengeluarkan produk pelayanan berupa :

- a. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Jenis pembiayaan ini terdiri dari :
 - Pembiayaan *mudlarabah*, atau penyediaan modal kerja.
 - Pembiayaan *musyarakah* atau penyertaan modal kerja.
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan. Jenis pembiayaan ini ditujukan dalam rangka penyediaan kebutuhan barang modal dan alat-alat produksi dengan sistem pembayaran ditanggihkan. Pembiayaan jenis ini disalurkan melalui fasilitas Pembiayaan *Murabahah*.
- c. Pembiayaan pengadaan alat-alat produksi untuk disewakan atau disewabelikan. Jenis pembiayaan ini dikembangkan melalui produk Pembiayaan *Ijarah* atau penyediaan kebutuhan alat-alat produksi dan sarana kerja yang dibayar dengan cara diangsur dengan sistem sewa beli.

Sebagai lembaga mediator yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, pengelola BTM Wiradesa dalam menyalurkan pembiayaan dituntut untuk selalu berpegang pada prinsip prudensial atau kehati-hatian demi menjaga amanah dari para pemilik dana yang menitipkan dananya di BTM Wiradesa. Implementasi dari prinsip prudensial dalam penyaluran pembiayaan antara lain diwujudkan melalui analisa atau penilaian tentang kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan.

Agar pembiayaan yang disalurkan lebih tepat sasaran, maka sejak awal BTM Wiradesa harus mengetahui penggunaan pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Karena itu, setiap calon nasabah harus menjelaskan secara rinci tentang rencana penggunaan dana ketika mengajukan permohonan. BTM Wiradesa tidak akan melayani dan menyalurkan pembiayaan tanpa mengetahui secara persis penggunaan dana yang dimohonkan oleh calon nasabah. Hal itu dilakukan untuk memastikan, bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan produktif yang pada akhirnya diharapkan mampu memberdayakan mereka.

Dalam melakukan analisa kelayakan usaha, pengelola BTM Wiradesa tidak jarang harus terlibat dalam kegiatan usaha calon nasabah. Hal ini dilakukan, selain untuk memberikan pengarahan dan pembinaan agar usaha yang bersangkutan layak untuk dibiayai, juga dimaksudkan untuk menghindari salah informasi dan tindakan *mark up* yang mungkin dilakukan oleh calon nasabah dalam menginformasikan kondisi usahanya.

Terhadap pembiayaan yang telah disalurkan, pengelola BTM Wiradesa akan melakukan pembinaan dan pengawasan, agar perkembangan pemanfaatan dana dari BTM Wiradesa dapat terpantau dengan baik dan terhindar dari kemungkinan salah urus atau terjadinya penyimpangan penggunaan dana.

Dalam melakukan pembinaan, BTM Wiradesa memberikan pendampingan, baik dalam masalah produksi, manajemen usaha, pemasaran serta sikap amanah dalam mengelola usaha. Selain itu, BTM Wiradesa juga berusaha membangun jaringan bisnis di antara mereka, sehingga apabila ada anggota atau calon anggota yang membutuhkan suatu komoditas tertentu dan hal itu dapat disediakan oleh anggota atau calon anggota yang lain, maka BTM Wiradesa mengarahkan supaya memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sesama anggota dan calon anggota. Dengan demikian keberadaan BTM Wiradesa tidak sekedar sebagai mediator dalam masalah pendanaan, melainkan dalam batas-batas tertentu juga bertindak sebagai fasilitator dan inkubator dalam pengembangan usaha.

Hal ini dilakukan, karena pengelola BTM Wiradesa yakin bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah, tidak cukup apabila kepada mereka hanya diberikan kail. Selain memberi kail, mereka juga harus diajari cara mengail yang benar, ditunjukkan tempat mengail yang memungkinkan mereka mendapatkan ikan, serta kepada mereka hendaknya juga diberi kesempatan yang leluasa untuk mengail.

Artinya, selain diberi bantuan modal, kepada orang miskin juga harus diajarkan cara mengelola modal melalui usaha-usaha yang produktif, mengenalkan mereka dengan manajemen sederhana dan teknologi tepat guna, serta ditunjukkan dan bila perlu dibukakan akses pasarnya. Lebih dari itu, adalah tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin untuk leluasa berusaha melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada pemberdayaan dan kepentingan orang miskin.

Kemudian dalam upaya untuk meminimalisir resiko atas pembiayaan yang disalurkan, BTM Wiradesa berusaha mengembangkan sistem jaminan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi nasabah penerima pembiayaan. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu BTM Wiradesa dapat menerima jaminan non fisik, berupa personal garansi dari para tokoh masyarakat atau mereka yang secara finansial cukup mampu dan bertanggung jawab, bila kenyataannya nasabah yang bersangkutan tidak mampu untuk menyediakan jaminan fisik sementara usahanya cukup *profitable* dan memiliki prospek yang bagus.

Terhadap usaha nasabah yang mengalami kegagalan dan hal itu terjadi bukan karena kecerobohan atau tindakan nakal, maka BTM Wiradesa akan menghapusbukkan pembiayaan yang gagal tersebut dengan dana cadangan

resiko, baik yang dibentuk dari biaya operasional maupun yang didukung oleh lembaga amil zakat.

Untuk mendukung kegiatan penyaluran pembiayaan, BTM Wiradesa selain menjalin kerja sama dengan lembaga perbankan Syariah, juga menerima titipan simpanan dana dari anggota dan calon anggota, serta masyarakat. Kegiatan menerima titipan simpanan ini selain berfungsi sebagai sarana untuk penghimpunan dana bagi pembiayaan yang akan disalurkan, juga berguna sebagai media pendidikan bagi masyarakat miskin penerima pembiayaan, agar secara bertahap mereka mampu mengakumulasi dana bagi pemupukan modal, sehingga pada saatnya nanti mereka mampu mandiri, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Dalam menjalankan kegiatan simpanan, BTM Wiradesa melakukannya melalui produk pelayanan berupa :

1. Tabungan *Mudlarabah*.

Yaitu simpanan atau titipan dana dari masyarakat yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu. Setoran pertama untuk Tabungan *Mudharabah* ini minimal Rp 5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,-

2. Simpanan *Mudlarabah* Berjangka.

Yaitu simpanan atau titipan dana dari masyarakat yang jangka waktu dan besarnya simpanan sudah ditentukan. Untuk Simpanan Berjangka ini, besarnya simpanan ditentukan minimal Rp 1 juta, dan jangka waktu simpanan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sistem yang digunakan untuk Simpanan Berjangka adalah perpanjangan secara otomatis bagi simpanan yang telah jatuh tempo dan tidak dicairkan (*Automatic Roll Over*). *** **(Achmad Su'ud)**

PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DUAFA' & MUSTAD'AFIN

LATAR BELAKANG

Akibat Ekonomi Konvensional

- ▶ Ketidak stabilan terus berlangsung
- ▶ Ketidakpastian berlanjutan
- ▶ Sesudah melalui masa-masa inflasi tingkat tinggi yang menyakitkan,
- ▶ Perekonomian dunia telah mengalami suatu resesi mendalam
- ▶ Laju pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya dibarengi dengan laju suku bunga riil yang tinggi
- ▶ Fluktuasi valuta asing yang tidak sehat
- ▶ Meskipun penyembuhan kini tengah berlangsung, namun ketidakpastian tetap berlanjutan
- ▶ Laju suku bunga riil tetap tinggi & ini diperkirakan akan terus meningkat, sehingga meningkatkan kecemasan adanya penyembuhan yang gagal
- ▶ Krisis ini juga diperburuk oleh adanya kemiskinan di tengah orang-orang kaya di semua negara
- ▶ Berbagai bentuk ketidakadilan sosioekonomi
- ▶ Defisit neraca pembayaran yang besar & ketidakmampuan sebagian negara-negara berkembang untuk mencicil utang mereka

Dr. Mahathir Mohamad Kritik Dunia Islam

- o Dunia Islam tengah mengalami kemunduran yang tak memberi harapan.
- o Dunia Islam kini berada pada titik terendah, sangat lemah & terbelakang.
- ▶ Siapa saja bisa menindas negara Islam yang mana saja, & tidak ada yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa Islam kecuali menjerit & memohon keadilan.
- ▶ Bahkan sebuah ras (bangsa Yahudi) yang hanya terdiri atas 13 juta orang di seluruh dunia, dapat menaklukkan kekuatan dari 1,3 milyad Umat Islam.
- ▶ Tidak satu pun negara Islam masuk ke dalam jajaran negara-negara maju dunia. Tidak ada jalan pintas bagi umat Islam untuk menyelesaikan

persoalannya.

- ▶ Umat Islam membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan satu abad untuk bergerak maju.

(Sumber: Kompas, Sabtu, 20 Juli 2002)

Padahal Kita adalah Umat Terbaik

(QS. Ali ‘Imran : 110)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Dan Agama Islam Rahmat Bagi Semesta Alam

(QS. Al Anbiyaa’ : 107)

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk (menjadi) **rahmat bagi semesta alam.**

Duafa’ & Mustad’afin

- ▶ Duafa’ :
 - ◆ Fakir miskin
 - ◆ Tunawisma
 - ◆ Anak yatim
 - ◆ Pemulung
 - ◆ Janda-janda miskin.
- ▶ Mustad’afin :
 - ◆ Petani dan Buruh tani
 - Ketika hendak tanam membeli benih, pupuk mahal tapi ketika panen hasil panen terjual murah.
 - ◆ Nelayan dan Buruh nelayan
 - Nelayan yang tidak memiliki kapal harus melaut dengan biaya yang cukup mahal yaitu sewa kapal, BBM dan konsumsi melaut ketika pulang hasil tangkapan terbeli murah.
 - ◆ Buruh atau pekerja bangunan, pabrik
 - Buruh dan pekerja pabrik kebanyakan di Indonesia memperoleh upah dibawah UMR dan dipekerjakan secara kontrak hingga bertahun-tahun.

Prinsip kebersamaan

Dalam Islam prinsip kebersamaan selalu ditekankan pada :

- ▶ Saling membantu dan bekerjasama :
 - ◆ *“... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al Maidah : 2)*

- ◆ *Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong sesamanya (HR. Abu Daud)*
- ◆ *Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya (HR. Muslim, Bukhori dan Abu Daud)*
- ▶ Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan atau tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
 - ◆ *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.....” (QS. An Nisa : 29)*
- ▶ Saling bertanggung jawab

Landasan Pemikiran

Berikut landasan pemikiran kita untuk beraksi :

- ▶ *“Mengapa kamu tidak hendak berperang di jalan Allah untuk membela mereka yang lemah, pria, wanita maupun anak-anak padahal mereka telah sama-sama berdo’a : wahai Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini, berilah kami dari sisi-Mu seorang pelindung dan beri pulalah kami dari sisi-Mu seorang penolong” (QS. An Nisa : 75)*
- ▶ *“.....begitu juga mengenai nasib anak-anak yang lemah sengsara. Yaitu supaya kamu mengurus anak yatim perempuan dan anak-anak yang lemah sengsara itu secara adil.....” (QS. An Nisa : 127)*
- ▶ *“Hai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah sebagian harta yang telah kami karuniakan kepadamu di jalan Allah, sebelum datang suatu hari dimana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan dan.....” (QS. Al Baqarah : 254)*
- ▶ *“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, bagaikan menanam sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, setiap tangkainya menghasilkan seratus butir.....” (QS. Al Baqarah : 261)*
- ▶ *“Tahukah engkau orang yang mendustakan Hari Pembalasan itu?, sifat-sifatnya ialah kesatu, yang suka membentak anak yatim kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.....” (QS. Al Maun : 1-3)*

**Maka berangkat dari hal tersebut perlu adanya:
PEMBERDAYAAN EKONOMI**

Pemberdayaan Ekonomi

Adapun Pemberdayaan ekonomi kaum duafa dan mustad’afin merujuk kepada ekonomi islam atau yang sesuai dengan syariah, yaitu :

- ▶ **Pertama**, dibentuknya LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) sebagai pilar pergerakan ekonomi :
 - ◆ BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
 - ◆ KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)
 - ◆ ASURANSI SYARIAH
- ▶ **Kedua**, Adanya Pembinaan Kewirausahaan dan Ketrampilan
 - ◆ Kerajinan tangan, Industri rumahan, Teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- ▶ **Ketiga**, Terciptanya Perniagaan Syariah
 - ◆ Perdagangan, Pemasaran dan Jalur Distribusi
- ▶ **Keempat**, Dana Sosial, Zakat dan Waqaf
 - ◆ Santunan, Pendidikan anak-anak Duafa dan Mustad'afin, Pemukiman Gratis Duafa dan Mustad'afin.

Skema Pemberdayaan

Arah Pencapaian

Arah pencapaian dari pembedayaan ekonomi ini adalah :

- Kesejahteraan Komunitas Duafa & Mustad'afin.
- Menciptakan jembatan, mediasi, transformasi dan komunikasi antara si kaya dan si miskin.
- Memasyarakatkan ekonomi syariah yang masalah dikomunitas Duafa & Mustad'afin.
- Menunjukkan bahwa islam adalah "Rahmat bagi semua".
- Pengembangan Komunitas Duafa & Mustad'afin. *** **(HM. Dumairi Nor)**

TERIMA KASIH



KEWARGAAN DEMOKRATIS-PARTISIPATIF MENGAWAL KEBIJAKAN PUBLIK

Pembangunan yang dijalankan oleh negara (pemerintah) pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah adalah penyelenggara negara, pelaksana mandat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemakmuran dan keadilan menjadi tujuannya, bukan sebaliknya membuat elite pemerintah makin makmur dan rakyat makin *ajur* (hancur).

Berdasarkan mandat konstitusi di atas, ada hubungan erat dan resiprokal antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah adalah pelayan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan seluruh kepentingan publik. Dan masyarakat adalah konsumen sekaligus pengawas implementasi kebijakan publik. Masyarakat berhak menilai, menyatakan puas atau kekecewaan atas semua kebijakan publik yang telah, sedang dan akan dijalankan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas ditegakkan dengan maksud untuk memastikan bahwa proses, prosedur, aktivitas, dan hasil dari kebijakan publik memenuhi capaian dan harapan yang dirumuskan bersama.

Alasan di muka merupakan pertimbangan pentingnya partisipasi seluruh warga masyarakat dalam menentukan ke mana arah pembangunan akan dibawa. Kewargaan di sini bukan hanya dibutuhkan dalam praktik, bahkan juga merupakan proses belajar. Prinsip “saya berpartisipasi karena itu saya ada” harus dilengkapi dengan “saya tahu karena itu saya ada”. Dalam prinsip ini, partisipasi dalam berbagai forum warga merupakan proses belajar bagi warga sendiri untuk menciptakan kewargaan demokratis-partisipatif. Melalui proses belajar forum warga, demokrasi formal menjadi demokrasi sejati. Bukan hanya demokrasi berasas pemilu, namun partisipasi sejati warga kota. Warga perlu mendidik diri mereka sendiri untuk mengenal hak-hak mereka dan cara pemenuhannya, serta mempertahankan kepentingan mereka.

Forum Warga: Lembaga *Check and Balance*

Forum warga, dengan berbagai modus dan bentuknya, adalah bentuk representasi keterlibatan warga dalam mengawal proses pembangunan untuk kemaslahatan umum. Menurut Khairul Anam, Ketua Forum Warga Jepara, forum warga dapat dibentuk berdasarkan pendekatan teritorial. Ada forum warga tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga *vocal point* di tingkat

desa atau kelurahan. Gabungan dari berbagai forum warga membentuk dewan kota.

Forum warga sebagai praktik demokrasi partisipatif dapat menjalankan beberapa fungsi utama antara lain: *Pertama*, menumbuhkan *good will* dan *political will* di kalangan eksekutif dan legislatif untuk menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional. Eksekutif didorong, antara lain menurut Obeng Nur Rosyid, untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai implementator kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, bukan kepentingan proyek. Forum juga memberikan dukungan terwujudnya DPRD yang partisipatif, transparan, dan akuntabel terhadap konstituennya, masyarakat yang diwakilinya, seperti kasus di Sumedang, meskipun tidak mudah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan dokumen-dokumen anggaran. Di sini terlihat DPRD dan pemerintah daerah masih enggan membuka akses kepada masyarakat. Masyarakat pada akhirnya menyiasati dengan jalan akses dokumen melalui Bappeda.

Kedua, menegakkan budaya hukum. Ketika DPRD sibuk dengan perebutan arena bisnis, dan ruh orang-orang yang aktif didalam partai bukan semangat untuk duduk sebagai legislatif yang bisa menyuarakan rakyat, apa yang bisa dilakukan, di Surabaya misalnya, adalah mengorganisir penegakan hukum. Dan dalam dua tahun terakhir banyak eksekutif yang dijerat hukum karena berbagai kasus penyimpangan. *Culture of law* semacam ini, menurut Yuli, tidak terlalu sulit untuk ditegakkan asalkan masyarakat cukup peduli. Namun disadari pula bahwa kultur tersebut masih jauh dari sehat bagi tegaknya *good governance*.

Ketiga, mengusulkan dan mengawal implementasi kebijakan publik. Melihat kasus Sumedang, melalui Dewan Kota (gabungan forum-forum warga), warga dapat mengusulkan kebijakan tentang kesehatan dan pendidikan gratis. Meskipun usulan tersebut belum disepakati oleh anggota dewan karena keterbatasan anggaran, inisiatif warga bermanfaat untuk mengarahkan kebijakan publik. Di samping itu, dewan kota juga tidak sekadar mendesak bahkan juga membuat RAPERDA partisipasi publik, pendidikan dan kesehatan, termasuk kajian dan naskah akademiknya, menurut Obeng Nur Rosyid, Aktivist Fahmina Institute.

Keempat, proaktif mengawal fungsi legislatif. Warga dapat aktif dan secara terus menerus memonitor kerja dan fungsi DPRD. Melalui forum, warga juga dapat menyatu dengan anggota DPRD yang menginginkan perubahan. Memang ada gayung bersambut walaupun tidak semua anggota DPRD menyetujui. Warga masyarakat dapat secara aktif menularkan pengawasan kepada warga-warga lainnya sehingga masyarakat tanpa kenal lelah meng-*complain* DPRD, tegas Doni A. Munir, Wakil Ketua DPRD Kab. Sumedang.

Kelima, mengembalikan anggota dewan kepada konstituennya (rakyat) yang telah memilihnya. Forum warga dapat mendekatkan kembali anggota DPRD kepada konstituennya. Ini penting, ketika fenomena menunjukkan bahwa amanah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat belum sepenuhnya dijalankan anggota dewan. Forum warga dapat menyegarkan kembali ingatan kolektif anggota dewan bahwa mereka dipilih oleh masyarakat.

Keenam, membuat kontrak sosial dengan dewan. Forum MP3 (Masyarakat Peduli Pembangunan Partisipatif) misalnya, menurut Obeng Nur Rosyid, dibentuk pada awal periode kerja anggota dewan. Forum ini mengundang seluruh anggota dewan untuk membuat kontrak dengan masyarakat yang isinya, bahwa anggota dewan akan membantu masyarakat selama menjabat sebagai anggota dewan. Meskipun tidak semua anggota dewan menyepakati kontrak semacam ini, setidaknya forum tetap dapat mengawal melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai contoh, di Cirebon terdapat 22 kelurahan yang LPM-nya tidak mempercayai forum/lembaga bentukan pemerintah yang disebut dengan asosiasi BPD. Dari situlah kemudian mereka membentuk forum LPM. Setelah itu disepakati membentuk tim dua belas yang merumuskan desain kerja DPRD. Tim ini kemudian menghasilkan tim dua puluh dua yang mengawal/mengawasi usulan dari tingkat yang paling rendah (desa/kelurahan) hingga tingkat kota.

Salah satu hasil konkret dari semua itu, APBD Sumedang misalnya, mengalami perubahan berarti. Dari total anggaran sebesar 800 Milyar (tahun anggaran 2007). Dari jumlah tersebut alokasi untuk gaji pegawai sudah sekitar 450 milyar, dan sekitar 60% APBD digunakan untuk membiayai belanja rutin. Untuk belanja langsungnya dari tahun ke-tahun terus diperbesar. Sebagai contoh (anggaran publik) terdapat program kredit usaha mikro sebesar 4 milyar, pengadaan rumah layak huni sebesar 2,4 milyar dan program kesehatan gratis sebesar 13 milyar. Jadi, berkat proses partisipasi warga, anggaran publik mengalami peningkatan. Berkat forum ini pula, masyarakat dapat membuat efisiensi anggaran sebesar 4 milyar dari biaya makan dan minum pegawai dan sebagainya.

Peran Mediasi CSO

Forum warga, bagaimanapun tidak lepas dari kontribusi peran serta organisasi-organisasi masyarakat sipil. CSO dapat memainkan peran mediator dan fasilitator bagi forum warga. Peran yang dapat diterima CSO sejauh pengalaman yang telah dijalankan meliputi antara lain: *Pertama*, CSO memfasilitasi prakarsa partisipasi forum warga dalam pembangunan. CSO tidak mendirikan forum warga, namun memanfaatkan forum yang sudah ada dan diterima keberadaannya oleh warga masyarakat, seperti karang taruna, majelis taklim, dan kelompok pemuda, kata Khairul Anam.

Kedua, CSO memanfaatkan forum-forum tersebut untuk menginkubasi dan menyebarkan ide dan "virus" partisipasi ke dalam forum warga. Dari pertemuan inkubasi ini, CSO membiarkan prakarsa warga sendiri untuk menularkan dan menyebarluaskan ide dan virus partisipasi kepada warga lainnya, yang biasanya melalui *getok tular*. CSO memulai dengan mengajak anggota-anggota dalam forum-forum warga itu untuk memberdayakan mereka sendiri. Kemudian orang-orang yang telah diberdayakan tersebut memengaruhi teman-temannya yang lain. Jadi, CSO tidak masuk ke dalam perkampungan mengajak tiba-tiba warga untuk berpartisipasi.

Ketiga, CSO menyediakan diri sebagai mediator, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, untuk mengantarkan forum warga bertemu dengan pemerintah. Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan, CSO selalu mengajak warga desa untuk bertemu langsung dengan pemerintah, dan menyampaikan sendiri ide dan kepentingan mereka. Jadi, yang menjadi pelaku dan elit forum warga adalah warga sendiri bukan CSO sebagai fasilitatornya.

Keempat, membangun sinergi antar CSO. Ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam membangun sinergi ini, menurut Nandang, yaitu, mulai dengan memilih individu-individu yang menginginkan perubahan; memelihara titik temu spirit perubahan di antara individu-individu CSO; dan membangun jejaring dengan sesama CSO, dengan eksekutif dan legislatif. Di Sumedang misalnya, jejaring dirajut dengan melakukan program bersama, aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak dibiayai *funding* tertentu untuk menjaga hubungan baik dan saling percaya di kalangan CSO sendiri. Yang menjadi perekat dalam melakukan sinergi adalah spirit perubahan agar masyarakat menjadi lebih baik kehidupannya. Jejaring dengan legislatif dan eksekutif pada awalnya dibangun dengan komunikasi informal. Meskipun sekarang telah ada perda yang mengatur partisipasi, komunikasi informal tetap dilakukan.

Fungsionalisasi Peran Eksekutif-Legislatif

Membangun partisipasi warga dalam pembangunan demokratis juga membutuhkan kesediaan peran eksekutif dan legislatif. Kewargaan demokratis-partisipatif yang dengan susah payang diprakarsai oleh warga dan difasilitasi oleh CSO, menjadi kurang bermakna dan efektif bila eksekutif sebagai pelaksana kebijakan publik, dan legislatif sebagai lembaga pembuat dan pengawas kebijakan publik bersikap tertutup.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh eksekutif dan legislatif antara lain: *Pertama*, kerendahan hati eksekutif untuk menerima kehadiran partisipasi warga dalam diskusi dan penilaian kebijakan publik dan menerima perda partisipasi. Pada

saat yang sama, legislatif perlu menyamakan persepsi di antara anggota-anggotanya tentang perlunya partisipasi warga. Menurut Doni A. Munir, di Sumedang misalnya, anggota dewan memulai dengan "ngobrol dari hati ke hati", agar mereka sadar bahwa DPRD sekarang seperti berdiri dalam "kubangan lumpur". Dari forum "hati ke hati" tersebut, mereka sepakat untuk meminimalkan persepsi negatif masyarakat.

Kedua, peningkatan fungsi DPRD dalam legislasi, budgeting dan pengawasan. Secara internal telah diupayakan peningkatan kapasitas anggota DPRD, terutama peningkatan fungsi-fungsi DPRD dalam legislasi, budgeting dan pengawasan. *Outbound*, pelatihan ESQ dan manajemen qolbu yang telah dilakukan di Darut Tauhid, juga bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kepekaan sosial mereka. Secara eksternal, pencitraan diri DPRD mulai dibenahi. Siapa yang akan nyaman jika DPRD selalu menjadi tertuduh, padahal mereka merasa telah berupaya maksimal melakukan tugas dan fungsi DPRD. Dalam konteks ini, mereka mulai mensosialisasikan pandangan-pandangan dan keputusan-keputusan dewan yang berpihak kepada publik.

Selalu ada hambatan yang muncul di kalangan eksekutif maupun legislatif mengenai peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan. Biasanya hambatan yang sering muncul adalah resistensi dari dewan sendiri terhadap perda partisipasi karena menganggap bahwa masyarakat dapat merampas hak dewan. Hambatan dari eksekutif pun besar, karena mereka tidak terlalu sepakat dengan perda partisipatif ini. Namun CSO selalu meyakinkan legislatif bahwa partisipasi ini akan membantu mereka dalam menjalankan hak budget. Jadi, rumusnya adalah kalau anggaran ingin pro publik libatkanlah masyarakat seluas-luasnya.

Rintangan lain yang bisa ditemukan dalam demokrasi-partisipatif ini adalah ketika masyarakat sudah berdaya, lalu apa? Menurut Doni A. Munir, di Cirebon ada fenomena di mana forum PKL yang dibangun dari nol hingga diakui eksistensinya oleh pemerintah, kemudian mereka mendapat bantuan dana dari pemerintah dan legitimasi untuk berjualan melalui peraturan daerah, dan dapat menghidupi sendiri komunitasnya, mereka justru terjebak menjadi elite-elite baru pelaku korupsi. Perkembangan terakhir menyaksikan terdapat 22 kasus di mana elite-elite baru itu terindikasi korupsi dana bantuan program pemerintah. Mereka lupa untuk mensukseskan program dan mengembangkan komunitas-komunitas dan forum warga lain yang belum kuat.

Terakhir, namun tak kalah pentingnya, kita dapat mengambil pelajaran dari banyak kasus di atas tentang perlunya kewargaan demokratis-partisipatif mengisi ruang-ruang publik. Ruang publik adalah tempat untuk berbagi dan bertukar, membuat hubungan-hubungan antara sesama warga, warga dengan pemerintah kota dan dewan perwakilan. Ruang publik harus mendorong

lahirnya komitmen terhadap nilai-nilai kehidupan sipil, menjamin hak-hak sipil dan politik warga. Ruang publik adalah ruang untuk saling tegur sapa, menjembatani satu dengan yang lain, dan membuat penghuninya merasa *at home*. *** **(Editor)**

UPAYA FORUM WARGA MENYEMAI GAGASAN UNTUK PERUBAHAN

*“Aku terpilih bukanlah karena aku orang yang terbaik diantara kamu, maka bantulah aku agar tetap lurus mengurus kamu sekalian.
Jika aku berperilaku baik, maka dukunglah aku.
Jika aku berperilaku buruk, maka luruskanlah aku”.*
(Khalifah Abu Bakar Shiddiq)

Jika benar negara ini milik rakyat, semestinya mereka memiliki hak penuh untuk mengevaluasi penyelenggaraan negara. Sungguh naif, jika sang pemilik tidak diperkenankan mengetahui perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan dilarang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan tersebut. Evaluasi dan pengawasan memang berjalan. Tetapi di sistem yang selama ini ada, evaluasi hanya dilakukan melalui birokrasi yang diciptakan pemerintah sendiri. Seperti Bawasda (Badan Pengawas Daerah) yang dibentuk pemerintah daerah untuk mengawasi pemerintah daerah sendiri. Kepala Bawasda diangkat dan diberhentikan atas restu Kepala Daerah. Mudah dibayangkan. Hasil pengawasan yang muncul biasanya hanya sesuatu yang akan menyenangkan pemerintah sendiri. Sulit untuk bisa muncul evaluasi yang riil dan obyektif. Apalagi yang memihak kepentingan rakyat. *“Masa jeruk makan jeruk”*, adalah ungkapan yang tepat dalam hal ini. Rakyat pun seringkali tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu apa hasil pengawasan dan evaluasi dari pihak Bawasda. Padahal dalam pandangan banyak pihak, instansi publik secara umum masih belum memuaskan kepentingan publik. Belum melaksanakan pelayanan secara prima untuk kepentingan rakyat. Dalam pendengaran dan pembicaraan banyak pihak, perusahaan-perusahaan daerah juga dilaporkan seringkali merugi terus, tidak efisien, mahal operasional dan tidak transparan.

Untuk mengantisipasi kebuntuan ini, di tingkat pusat sebenarnya sudah ada inisiatif untuk membentuk komisi-komisi yang memiliki hak penuh terhadap evaluasi dan reformasi instansi-instansi pemerintahan. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Lembaga Ombudsman dan beberapa yang lain. Sayangnya sekali lembaga-lembaga ini belum sampai ke daerah. Instansi publik dalam pemerintahan daerah hanya diawasi oleh dirinya sendiri. Apalagi jika anggota dewan daerah mudah diajak kompromi. Pada konteks ini, kebuntuan masih saja mengancam perbaikan pelayanan pemerintah di daerah-daerah. Karena itu, kerja-kerja langsung

rakyat untuk mengontrol dan mengevaluasi pemerintah menjadi penting dilakukan.

Kecenderungan *'menutup diri'* yang dilakukan berbagai instansi pemerintah membuat rakyat semakin penasaran untuk melakukan penilaian terhadap mereka. Rakyat justru sangat antusias, jika benar dibuka kesempatan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah, maupun usaha daerah. Pada kenyataannya, rakyat memang banyak mengeluhkan banyak hal; soal informasi beasiswa yang tidak jelas, soal mutu pendidikan negeri, soal bantuan untuk nelayan dan soal-soal lain yang nyata hidup dan terjadi di depan mata mereka sehari-hari. Evaluasi kinerja pemerintah adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses. Karena rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, rakyat juga merupakan pengguna utama dari fasilitas pelayanan pemerintah. Rakyat antri membayar jasa pelayanan pemerintah. Berupa pajak maupun retribusi, atau pembayaran atas pelayanan air minum, kesehatan, pendidikan, pembikinan surat-surat dan yang lain. Rakyat sesungguhnya berhak atas evaluasi tersebut. Dalam dunia usaha saja, evaluasi konsumen itu sangat penting untuk keberlangsungan usaha itu sendiri. Karena itu, evaluasi kinerja secara partisipatif ini penting dilakukan, untuk memotret kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Kepuasan masyarakat –sebagai pengguna dan pemberi mandat– merupakan indikator penting bagi transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Evaluasi langsung dari rakyat merupakan amanat undang-undang. Karena itu, semestinya memperoleh dukungan dari pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat pada UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN, pasal 8 menyebutkan: (1) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Kemudian pada pasal 9, dijabarkan hak masyarakat tersebut. Ada hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; ada hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; ada hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan ada hak memperoleh perlindungan hukum. Hak perlindungan hukum, dinyatakan dalam pasal tersebut, untuk menunaikan hak-hak di atas, ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penggunaan Dana APBD Perlu Dievaluasi?

Seperti termaktub dalam UU No. 17 tahun 2002 tentang keuangan Negara, pasal 3 menyebutkan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Berkaitan dengan APBD misalnya, ada dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Pasal 91 menyebutkan: (3) DPRD wajib mensosialisasikan rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan masukan masyarakat tersebut didokumentasikan dan dilampirkan dalam Perda tersebut; (4) Dalam konteks ini perlu dilakukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam siklus anggaran untuk menjamin bahwa dana APBD yang pada hakekatnya merupakan dana rakyat dikelola dengan baik.

Jadi, dari sisi undang-undang dan peraturan pemerintah, evaluasi rakyat terhadap pemerintah adalah sah dan dilindungi. Bahkan seharusnya pemerintah mendorong secara aktif agar evaluasi rakyat bisa dilaksanakan dengan baik. Karena evaluasi pada hakikatnya ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik. Untuk peningkatan kualitas dan efektifitas birokrasi pemerintah.

Jika kita analogikan rakyat sebagai pengguna layanan atau konsumen, maka kepuasan mereka menjadi sesuatu yang niscaya. Evaluasi mereka menjadi penting untuk mengetahui kepuasan rakyat atas pelayanan yang mereka terima. Apalagi jika rakyat merupakan pemilik sah kedaulatan negara. Penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah daerah harus berpikir untuk dapat menjadi pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik, sebagai pelaksana layanan, tentu harus mengalokasikan sumber daya dan mengelola masalah publik secara efisien, memperbaiki kegagalan pasar (*market failure*), menyusun peraturan yang efektif, dan menyediakan barang publik sesuai kebutuhan. Pemerintah juga dapat redistribusi pendapatan melalui retribusi dan pajak, memberikan kesempatan yang sama untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, mengurangi resiko dengan menyediakan pensiun dan asuransi pekerja.

Menurut Samuel Paul, salah satu prinsip yang telah diterima secara luas tentang karakteristik pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Spektrum pendekatan, mekanisme dan praktek yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk menjamin pemerintahan berada pada tingkat dan tipe kinerja yang diinginkan. Semakin puas masyarakat, berarti kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik semakin dekat atau bahkan melampaui harapan masyarakat. Semakin tidak puas masyarakat, berarti semakin jauh atau bahkan tidak terpenuhinya harapan masyarakat akan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Artinya, hubungan antara pemerintah (sebagai penyelenggara pelayanan publik) dan masyarakat (sebagai konsumen) menjadi nyata. Dengan kata lain, kepuasan masyarakat dapat menunjukkan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas

bertujuan untuk menjamin agar prosedur, aktivitas, dan hasil dari kebijakan pemerintahan memenuhi tujuan dan standar (harapan) yang telah disepakati.

Hal ini lah yang melatarbelakangi pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Upaya kesana bukannya tidak ada, tetapi dengan segala keterbatasan masyarakat peran tersebut seolah tidak berarti sama sekali. Maka diperlukan penguatan bagi masyarakat agar mampu mengisi ruang-ruang untuk penyemaian gagasan. Kata kunci dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kemauan berpartisipasi aktif. Tetapi partisipasi masyarakat, seringkali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah. Bahkan dianggap merecoki dan mengganggu. Partisipasi pun, seringkali dimaknai sebagai keharusan rakyat membantu program pembangunan. Misalnya, dengan merelakan tanah yang akan menjadi obyek pembangunan. Atau dengan membayar pajak, retribusi dan memperbesar PAD. Slogan yang dipasang pun hanya sepihak, 'Rakyat bijak, taat bayar pajak'. Tidak ada slogan yang sebaliknya, dipasang di jalan, "Pemerintah bijak, tidak mengkorup dana pajak". Padahal, sudah menjadi rahasia publik, praktik-praktik penggelapan dana pajak itu kerap kali terjadi. Pemerintah hampir tidak pernah bisa menunjukkan bahwa dirinya bersih dari penggelapan pajak, profesional dan efisien dalam pengelolaan pengumpulan dana pajak.

Dalam konteks lokal (Cirebon) pelaksanaan partisipasi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun kualitas dari partisipasi tersebut ditanyakan, namun masyarakat kota Cirebon relatif lebih terbuka dan sebagian turut berperan dalam setiap pengambilan kebijakan. Apalagi eksistensi LPM dan berkembangnya ruang informal membawa angin segar bagi masyarakat untuk mendorong proses partisipasi ke arah yang lebih baik. Forum-forum ini perlu ditempuh karena acapkali beberapa bagian dari kreativitas dan dinamika masyarakat baru bisa tumbuh dalam sebuah atmosfer yang informal. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa institusi-institusi formal tak jarang teramat sulit untuk berubah karena terlalu penuh dengan kepentingan politik berbagai kalangan yang sulit digeser. Kemunculan sebuah forum informal di luar konstelasi institusi-institusi formal, tampaknya bisa menjadi pengimbang dan alternatif.

Salah satu ruang informal bagi partisipasi publik yang bisa dikembangkan, adalah Forum Warga atau Forum Multi Pelaku. Forum semacam ini bisa diarahkan menjadi forum konsultasi, dialog, penyaluran aspirasi sekaligus negosiasi bagi masyarakat. Berbagai persoalan mengenai pembangunan, kebijakan publik dan pelayanan publik bisa dibicarakan di forum seperti ini. Masyarakat dari berbagai kalangan, bisa duduk bersama untuk merumuskan permasalahan bersama, merumuskan solusi bagi persoalan tersebut, juga untuk mengembangkan langkah-langkah rekonsiliasi di tingkat lokal. Dengan kata lain, forum seperti ini bisa diposisikan sebagai institusi untuk

mengorganisasikan dan mengkonsolidasi suara warga agar mereka dapat terlibat dalam proses tata kelola di tingkat lokal. Semisal forum PKL kota Cirebon, forum pengamen (PSHC), forum buruh (GP-SIPARI), forum Pengajian ibu-ibu PKL (CERMIN), Forum Nelayan, Dewan kota, Forum Sabtu, dan beberapa forum warga lainnya, Kita bisa belajar dari FPKL yang mengorganisir diri untuk meminta legalitas dari pemerintah dengan mengusulkan program penguatan kelembagaan dan usaha pedagang kaki lima, Menariknya, program ini diusulkan, diperjuangkan, dibahas dan diperdebatkan terlebih dahulu di antara para PKL, teman-teman Fahmina dan dari perwakilan pemerintah, BAPPEDA dan Kantor Koperasi, dalam waktu yang cukup lama. Para PKL-pun, bisa belajar bahwa banyak di antara pelaku pemerintahan, juga memiliki keberpihakan. Belajar bahwa hak memang harus dituntut dan diperjuangkan. Bahwa mereka para pedagang kecil, masih tidak lebih ahli dibanding para eksekutif, untuk mengusulkan tuntutan dan kebutuhan. Karena itu, harus belajar lebih banyak dari siapapun. Kita juga bisa belajar dari LPM yang mengorganisir diri melalui forum LPM yang terdiri dari 22 kelurahan, mereka berupaya mengawal proses musyawarah pembangunan dari mulai usulan, penganggaran, penetapan dan pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar usulan masyarakat tidak di pangkas oleh legislatif tetapi diperuntukan bagi masyarakat, termasuk adanya sosialisasi APBD melalui media. Forum ini menganggap bentuk keterbukaan pemerintah adalah dengan menampilkan “angka-angka” yang selama ini ditabukan bagi masyarakat, dan media ternyata terbukti efektif menjadi pemantik untuk mendorong partisipasi warga. Beberapa komunitas di wilayah III Cirebon (Indramayu, Kuningan, Majalengka, kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon) melakukan pengorganisasian menggunakan media (Radio Komunitas) sebagai salah satu alat perjuangan.

Terakhir, agar forum seperti ini bisa menjadi forum yang efektif, faktor representasi dan legitimasi perlu dipertimbangkan. Dari sisi representasi misalnya, pemerintah, kalangan legislatif, perlu terlibat dan duduk bersama dengan kalangan dunia usaha, NGO, akademisi dan masyarakat basis. Sementara dari sisi legitimasi, forum ini perlu diisi oleh mereka yang memang bisa dan dipilih menjadi penyalur aspirasi dari kelompok yang direpresentasikannya.

Di beberapa daerah, seperti dituliskan dalam laporan Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, forum warga bisa menjadi salah satu model partisipasi *extra-parliamentary* yang bisa berfungsi sebagai faktor koreksi terhadap proses politik yang dikembangkan oleh institusi-institusi formal. Sekalipun barangkali belum ada payung hukum yang melegitimasi kemunculan forum warga, tapi karakternya yang pada beberapa hal lebih

mencerminkan inklusivitas, pluralitas dan dinamika masyarakat, membuatnya layak untuk dikembangkan.

Keberadaan forum seperti ini, tampaknya akan mendukung proses peningkatan partisipasi publik yang juga menjadi tujuan pemerintah daerah. Ruang-ruang dan kanal partisipasi publik yang telah disediakan oleh pemerintah akan bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, jika masyarakat terbiasa untuk mengorganisasikan diri dan menyampaikan aspirasinya secara komunikatif. Forum warga bisa menjadi instrumen bagi masyarakat dalam “berlatih” mengorganisasikan diri dan menyampaikan aspirasi.*** **(Obeng Nur Rosyid)**

FORUM WARGA: Jalan Lain Demokrasi

Pengantar

Demokrasi di Indonesia adalah sebuah jalan panjang. Hingga saat ini, harus diakui masih terdapat beragam perdebatan mengenai bagaimana wajah demokrasi di Indonesia. Setidaknya sejak tahun 1945 di Indonesia terdapat sistem demokrasi dengan nama Demokrasi Pancasila, Demokrasi Parlementer, hingga Demokrasi Terpimpin. Jika demokrasi berarti *dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat*, dimanakah rakyat dalam wajah demokrasi Indonesia? Sistem keterwakilan?. Bung Hatta dalam salah satu kesempatan mengatakan bahwa salah satu pra-syarat demokrasi adalah tingkat pendidikan rakyat. Tanpa tingkat pendidikan yang memadai, maka suara rakyat, yang sering disamakan dengan “suara Tuhan” sesungguhnya membuka peluang untuk dimanipulasi. Demokrasi, pada esensi dasarnya memerlukan kesetaraan seluruh rakyat.

Pasca jatuhnya Negara Orde Baru, berbagai upaya untuk membentuk wajah demokrasi di Indonesia yang mengarah pada kesetaraan seluruh rakyat semakin terbuka. Hal ini antara lain nampak pada sistem Otonomi Daerah. Hadirnya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa, dijadikan jalan bagi terbentuknya berbagai aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga Propinsi (pada beberapa kasus berhasil menggulirkan kebijakan di tingkat nasional).

Dalam UU No. 32, Pasal 21 – 23 selain menyebutkan hak untuk mengurus daerahnya sendiri juga ditegaskan bahwa hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya disebutkan: Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan tiga bentuk rencana pembangunan daerah, yakni: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu

tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPMJD, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Senada dengan kedua UU tersebut di atas, PP No.72 tentang Desa juga menuntut dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan.

Tulisan ini berusaha menunjukkan bagaimana demokrasi diterjemahkan oleh Forum Warga Jepara berbasis pada prinsip yang filosofis bahwa demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, yang (sebenarnya sudah 'lumayan') didukung oleh Undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah. Menguraikannya diharapkan mampu menunjukkan Undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah yang ada, seharusnya tidak hanya menjadi "hiasan" proses demokratisasi di Indonesia. Sebaliknya, dipergunakan untuk menempatkan rakyat "setara" dalam pembicaraan mengenai demokrasi. Digunakan untuk membuka ruang partisipasi warga dalam menentukan kehidupan berdasarkan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan apa yang dibayangkan para pemangku kebijakan sebagai yang dibutuhkan oleh rakyat.

Forum Warga Jepara: Suara bagi demokrasi, bagi rakyat ...

Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Jepara, sejak tahun 2001, menjadi salah satu lembaga yang memberi perhatian terhadap dimungkinkannya partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah. Secara khusus, PC. Lakpesdam NU Jepara bersama dengan PP. Lakpesdam NU Jakarta mendorong pelembagaan partisipasi masyarakat dengan membentuk Forum Warga (FW). FW diharapkan menjadi *supporting system* dalam pelaksanaan proses struktural perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui forum-forum pengajian, tahlilan dan berbagai forum keagamaan lainnya yang ada di desa-desa, sejak tahun 2002, secara massif para fasilitator FW yang sudah disiapkan oleh Lakpesdam NU Jepara melakukan proses penyadaran yang mendorong partisipasi masyarakat. Alhasil, hingga saat ini FW Jepara tersebar di 8 Kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat yang berakar pada pengalaman dan kebutuhan *real* masyarakat, Forum Warga Jepara dibagi atas dua bentuk, yakni berbasis kewilayahan (*teritori*) dan berbasis sektor/profesi (*issue*).

Hingga saat ini FW Jepara terdapat di : Kecamatan kedung (*basis teritori* : Desa Panggung, Sowan Kidul, Wanusobo, Dongos, Rau, Menganti - *basis sektoral* :

Petani, Nelayan dan perempuan pesisir), Kecamatan Pecangaan (*Teritori* :Troso, Karang Randu, Ngeling - *Sektoral* : petani dan pengrajin tenun ikat), Kecamatan Batealit (*Teritori* : Raguklampitan, Batealit, Sumosari – *Sektoral* : petani dan masyarakat desa hutan), Kecamatan Keling (*Teritori* : Kunir, Bandung Harjo, Banyumanis, dan Kaligarang – *Sektoral* : nelayan, petani dan masyarakat desa hutan), Kecamatan Jepara (*Sektoral* - perempuan pesisir di Desa Bulu, Demaan, dan Ujung Batu), Kecamatan Karimunjawa (*Sektoral* : perempuan pesisir di Desa Kemojan dan Pulau Parang), Kecamatan Mayong (Petani di Desa Pancur), Kecamatan Welahan (petani di Desa Ketileng Singolelo).

Isu yang ditangani di tiap wilayah/desa sangat tergantung pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses penanganan persoalan yang dihadapipun terbilang unik dan mementingkan kebijakan yang berpihak pada semua lapisan sosial, ekonomi. “*Rembugan*” adalah istilah yang dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap desa. Rembugan ini sekaligus merupakan forum untuk menentukan strategi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dilakukan. Istilah ini sendiri mencerminkan kearifan yang ada dalam setiap pertemuan sebagai pertemuan antar warga dimana semua yang hadir dihargai pendapatnya.

Forum Warga dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan dibantu oleh adanya koordinator ditiap-tiap desa, adanya fasilitator kecamatan dan K3 di tingkatan kabupaten. Koordinator desa yang adalah relawan desa mengangkat isu yang muncul dalam masyarakat baik di masing-masing sektoral maupun di tiap wilayah. Isu ini dibicarakan dengan fasilitator kecamatan dan K3. Pola penanganan masing-masing isu yang ada dalam masyarakat dapat berupa pelatihan atau pendampingan. Bila isu yang muncul tidak terkait dengan kebijakan pemerintahan, maka akan dibicarakan dalam bentuk forum-forum yang difasilitasi FW. Sebaliknya bila berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, maka K3 berfungsi sebagai mediator antar warga di tiap teritori maupun sektoral dengan pihak pemerintah kabupaten maupun jenjang struktur lainnya.

Dalam hal ini, FW Jepara berfungsi menjadi media komunikasi antar warga dengan beragam persoalan dan lapisan kesulitan yang terjadi. Keberhasilan pengorganisasian FW di satu desa, menginspirasi desa-desa lain disekitarnya untuk turut membentuk Forum Warga. Tidak hanya itu, kemunculan FW Jepara di berbagai tempat terbukti telah meningkatkan posisi tawar rakyat dengan pemerintah, termasuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah.

a. Forum Warga sebagai Media komunikasi Warga.

Setiap desa, setiap sektor memiliki beragam persoalan, berlapis problematika apalagi jika dikaitkan dengan persoalan ekonomi dan akses informasi serta akses modal yang terbatas. Hal tersebut antara lain melatarbelakangi kesadaran mengenai pentingnya keberadaan FW karena dapat menjadi media komunikasi antara warga, sekaligus menjadi mediator berbagai kepentingan yang menyertai persoalan-persoalan tersebut. Setidaknya hal ini dibuktikan melalui pelatihan dan pendampingan internal yang dilakukan oleh FW Jepara dalam menangani persoalan yang muncul dalam masyarakat. Forum Warga adalah milik warga masyarakat itu sendiri, maka koordinator desa dan fasilitator kecamatan serta K3 berfungsi menjadi mediator bagi terakomodirnya persoalan antar warga.

- ▶ *Pemilihan petinggi, sekretaris desa*; Di Desa Bugel, terdapat kecenderungan calon petinggi berasal dari kalangan yang memiliki akses modal, akses informasi lebih sehingga menutup kemungkinan bagi calon lain yang lebih mungkin dalam mengakomodir kepentingan seluruh warga desa. Kehadiran Forum Warga di Bugel telah mendorong memunculkan calon-calon alternatif tersebut serta mempengaruhi proses demokratisasi di desa. Sementara itu di Troso, FW mendorong dilaksanakannya pemilihan sekretaris desa. Hal ini berdasarkan pengalaman bahwa pemilihan sekretaris desa cenderung dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu, termasuk akses modal, akses informasi yang lebih dekat dengan pemerintah. Pemilihan sekretaris desa yang didorong oleh FW dimaksudkan untuk menjadikan pemerintahan desa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
- ▶ *Peningkatan Kapasitas Produksi*; Kekayaan alam, potensi ekonomi di masing-masing desa turut dilirik oleh Forum Warga dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan. Misalnya di Kedung yang terkenal dengan produksi ikan dibuat pelatihan pembuatan berbagai krupuk ikan, di Batealit dan Keling yang terkenal dengan produksi pisangnya diadakan pelatihan pembuatan selai, krupuk dan sebagainya.
- ▶ *Koperasi Simpan Pinjam*; Di beberapa tempat, FW Jepara memfasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam, yang diharapkan bisa membantu modal perekonomian masyarakat.
- ▶ *Peraturan Desa berkaitan dengan Galian C*; Eksplorasi Galian C di Desa Sumosari telah mengakibatkan kerusakan hutan yang berimbas pada Daerah Aliran Sungai di wilayah pertanian; ditambah lagi terdapatnya penebangan liar. Keadaan ini mendorong FW memfasilitasi dibentuknya Jagawana, serta mengusulkan Peraturan Desa berkaitan dengan retribusi atas Galian C.

- ▶ *Kebijakan Penggunaan Seragam Kain Troso*; Produksi, distribusi dan pemasaran kain Troso, sebagai salah satu ciri khas daerah Jepara turut terganggu saat terjadinya Bom Bali 1. Hal ini disebabkan karena pemasaran terbesar kain Troso terdapat di Bali. Krisis ekonomi ini menyebabkan Forum Warga mendorong dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan seragam resmi pegawai pemerintahan di Jepara. Kebijakan tersebut akhirnya menjadikan kain Troso sebagai seragam wajib/resmi pegawai Pemerintahan Daerah hingga ke lapisan pegawai pemerintahan desa. Keberhasilan kebijakan ini turut menginspirasi beberapa kota lain di luar Kabupaten Jepara yang memiliki ciri khas kain tertentu untuk dijadikan pakaian seragam resmi.
- ▶ *Pengelolaan pertanian organik*; merosotnya produksi pertanian masyarakat akibat pengelolaan lahan dan tanaman yang didominasi oleh penggunaan bahan-bahan kimia beracun mengakibatkan 3 kecamatan basis forum warga melakukan serangkaian pelatihan dan pembuatan demplot pertanian organik. Adalah Forum Warga kecamatan Batealit, Welahan dan Mayong yang telah sukses memberikan pemahaman mendalam akan kemandirian petani melalui model pengelolaan lahan menggunakan sistem of rice intensifkation.

Selain beberapa penggalan pengalaman yang terjabarkan, FW Jepara bersama-sama seluruh komponen yang dimiliki melakukan gerakan advokasi anggaran. Dimana hal ini diarahkan pada peningkatan sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat.

b. Forum Warga sebagai Media Partisipasi Suara Warga dalam pembangunan.

Forum Warga sebagaimana misinya memperjuangkan keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan, dan mengatasi persoalan di berbagai sektor dan wilayah dengan tetap berpihak pada semua kepentingan rakyat menunjukkan semuanya bukan lagi mimpi. Antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Besar Rakyat Jepara.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (selanjutnya disebut Musrenbang) *ala* Forum Warga Jepara diawali, didasarkan pada temuan yang dilakukan oleh fasilitator FW. Dalam pengalaman dan penelitian pendampingan ditemukan sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana cara menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya kepada pengambil kebijakan. Salah satu indikatornya adalah masyarakat tidak mengetahui apa itu Musrenbangdes, tidak mendapatkan informasi darimana biaya operasional dan pembangunan fisik desa. Sementara itu terdapat banyak keluhan tidak adanya perhatian pemerintah daerah

terhadap beberapa bidang, sektor, wilayah dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga alasan mendasar mengapa Musyawarah Besar Rakyat Jepara sebagai bentuk lain dari Musrenbang yang lahir dari kesadaran masyarakat, penting untuk dilakukan. **Pertama**, partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir keluhan karena ketidaktahuan. Melibatkan warga dalam setiap pengambilan kebijakan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) diasumsikan menimbulkan dampak rasa memiliki terhadap pemerintah dan produk kebijakan yang dihasilkan (*Sebagaimana tiga sasanti Jawa, rumongso melu handarbeni, wajib melu hangrungkebi, mulad sariro hangroso wani (merasa memiliki, wajib ikut membela, berani bertanggung jawab)*). **Kedua**, sistem demokrasi *representative* (perwakilan) yang selama ini digunakan dan dijadikan legitimasi dalam penyelenggaraan Musrenbang ala pemerintah banyak memiliki kelemahan. Terdapat kecenderungan (berdasarkan pengalaman dan bukti publikasi media) hampir seluruh para wakil rakyat yang terpilih tidak lagi mewakili suara pemilihnya dan karenanya tidak memiliki hubungan harmonis. Komunikasi intensif hanya dibangun pada waktu kampanye menjelang pemilihan umum berlangsung. **Ketiga**, Musyawarah Besar rakyat Jepara ini diharapkan menjadi ruang publik yang terbuka, adil dan demokratis sekaligus menjadi media belajar bagi berbagai pihak dan selanjutnya menjadi bagian dari pendidikan politik bagi rakyat agar dapat memahami persoalan dan menentukan pilihan terbaik bagi mereka mengenai kebijakan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Musyawarah Besar Rakyat Jepara 1 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2005. Musyawarah ini di ikuti oleh lebih dari 750 orang dengan status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin dan kepentingan yang beragam.

Musyawarah tersebut menggulirkan 43 butir rekomendasi dari 8 sektor; antara lain adalah: (1). *Sektor Pendidikan*: Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (guru swasta), Peningkatan SDM/Profesionalisme Guru, Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan formal dan non formal, persoalan Kurikulum yang sering berubah, Rendahnya mutu pendidikan di Jepara (2). *Sektor Kesehatan*: Tingginya angka pertumbuhan penduduk, kurangnya sosialisasi kesehatan terhadap masyarakat, program pemerintah yang *top down*, manajemen dan kinerja pekerja kesehatan, kenyataan bahwa puskesmas dan RSUD Kartini kurang diminati masyarakat, Kesehatan Keluarga (ibu dan anak).(3). *Sektor Lingkungan Hidup*: Energi listrik (SUTET, PLTU, PLTN) Kelautan dan pulau-pulau kecil, Galian C , Pencemaran lingkungan, masalah kehutanan.(4). *Sektor Pertanian*: Modal dan sarana pertanian, pengairan, pengendalian organisme pengganggu

tanaman, pemasaran dan penanganan pasca panen, kesehatan ternak.(5).*Sektor Industri* : Perdagangan, Penegakan hukum Industri, permodalan, ketenagakerjaan (6). *Sektor Kelautan*: Permodalan, Kenaikan harga BBM, pemasaran, abrasi, pemberdayaan Perempuan pesisir.(7). *Sektor industri dan perdagangan*: Permodalan sulit dan suku bunga tinggi, pemasaran hasil industri, kebijakan pemerintah belum melibatkan masyarakat, UMK belum layak, Rendahnya SDM UKM dan buruh.(8). *Sektor Hukum* Legislasi/perundangan Penegakan kasus korupsi yang belum jelas Premanisme Swasta Premanisme (sispil, polisi, militer) Supremasi hukum dan mafia peradilan, pelayanan public, dana SL.

Selanjutnya, dalam amanat Musyawarah, Lakpesdam NU melakukan koordinasi dan menghasilkan agenda kerja pasca Mubes, yaitu: 1). Mempersiapkan personil untuk berperan serta dalam mempengaruhi kebijakan penganggaran daerah melalui alur proses perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) dari mulai desa sampai dengan ditetapkannya APBD diseluruh wilayah pemerintahan di kabupaten Jepara. 2).Mempengaruhi kebijakan Dinas dengan melakukan presentasi program (hasil-hasil mubes) diseluruh dinas terkait dengan 8 sector sebagaimana rekomendasi mubes. 3).Menggalang dukungan dan jaringan pemerintahan (Bappeda, DPRD, Sekda dan Dinas). 4).Menggalang dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama. 5). Penguatan basis data masing-masing item rekomendasi Mubes

Pelaksanaan Mubes Rakyat Jepara 1 adalah sekaligus merupakan kritik terhadap pelaksanaan Musrenbangdes di Kabupaten Jepara. Selama ini Musrenbang Jepara secara prosedural sudah terlaksana, akan tetapi memiliki banyak kelemahan, terutama berkaitan dengan upaya mendorong partisipasi warga, rakyat dalam pengambilan kebijakan. Antara lain disebabkan kurangnya publikasi terhadap masyarakat atau bersifat elitis dikalangan desa dan waktu pelaksanaan musrenbangdes yang terbatas; sejauh ini media publikasi hanya menggunakan surat undangan yang ditandatangani oleh *petinggi* (kepala desa/lurah), sekaligus menentukan peserta Musrenbangdes padahal terdapat 183 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Jepara. Akibatnya, penerima manfaat musrenbangdes sekaligus peserta hanya terbatas pada perangkat desa, ketua RT, ketua RW, Ketua PKK, BPD, Orang-orang '*sekitar*' Kepala desa dan beberapa orang tokoh masyarakat saja.

Selain itu proses Musrenbangdes hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga forum itu hanya digunakan untuk melegalisasikan draft rencana kerja desa/kelurahan yang telah disusun oleh perangkat desa sebelumnya. Hal lain yang juga menghambat adalah pemahaman yang keliru dalam mendefinisikan arti Musrenbang sebenarnya. Banyak Petinggi yang mengartikan musrenbangdes sebagai forum perencanaan

kegiatan desa untuk mengalokasikan dana perimbangan desa. Dilain pihak, kesalahpengertian tentang manfaat/mandat Musrenbangdes terlihat pada ketidaktersediaannya persiapan-persiapan data-data penting oleh masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan untuk kemudian diolah dalam Musrenbangdes sebagaimana yang dituliskan dalam SEB Bappenas dan Mendagri. Padahal, inti Musrenbangdes terletak pada musyawarah bersama seluruh komponen masyarakat berdasarkan data-data *real* yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan belum adanya kesamaan cara pandang mandat Musrenbang sebagai wujud partisipasi masyarakat terlibat aktif, antara pemerintah Kabupaten Jepara (Bappeda) dengan pemangku kebijakan di level desa, kecamatan dan SKPD. Hal lain adalah lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses Musyawarah Besar rakyat Jepara 1 yang dilakukan oleh FW Jepara secara langsung telah mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengubah pola perencanaan pembangunan daerah. Setidaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara untuk melibatkan unsur-unsur yang dekat dengan masyarakat sehingga tidak terkesan elitis. Hal ini tergambar pada proses penganggaran untuk tahun 2007 dan tahun 2008. Sejak tahun 2006 dan 2007, Pemerintah Kabupaten Jepara mengajak unsur-unsur seperti *Non Government Organization* (NGO), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Organisasi Profesi terlibat aktif dalam mendinamisir partisipasi dan peningkatan kualitas usulan di tingkat desa dan kecamatan.

Berbagai hal yang disebutkan diatas menunjukkan kehadiran Forum Warga yang diinisiasi disambut antusias dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya termasuk melibatkan diri dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kehadiran Forum Warga menunjukkan terbukanya ruang public yang mengkomodir suara, aspirasi warga.

Keberlanjutan Demokrasi : sebuah tantangan

Kehadiran FW Jepara setidaknya menunjukkan kesempatan untuk memperjuangkan demokrasi yang berpihak terhadap rakyat sangatlah mungkin. Semangat yang menginspirasi berbagai kegiatan-kegiatan yang diinisiatifkan sendiri oleh rakyat melalui FW Jepara selayaknyalah terus dipupuk dan dipelihara. Kenyataannya, tidak meratanya sumber daya manusia di tiap desa sementara kebutuhan, persoalan, problematika warga terus bermunculan bahkan meningkat mengindikasikan masih diperlukannya para fasilitator FW yang serius (seringkali hanya bermodalkan semangat) berjuang ditengah-tengah masyarakat. Tanpa bermaksud menjadi pahlawan kesiangan bagi warga masyarakat yang terbatas dalam hal akses informasi dan akses

modal, para fasilitator FW yang *nota bene* adalah relawan, tidak hanya masih diperlukan tetapi juga perlu dilatih baik keahlian memfasilitasi maupun pengetahuan mengenai kewargaan.

Forum Warga yang dimiliki dan atau yang adalah warga itu sendiri adalah kekuatan sekaligus tantangannya. Bentuknya yang merupakan komunitas mereka yang peduli terhadap berbagai persoalan di sekitarnya menyebabkannya bersifat sangat cair. Untuk beberapa persoalan tertentu terdapat kesulitan untuk tetap mengokohkan rasa kebersamaan antar warga dengan lintas kepentingan, beragam kebutuhan. Sebaliknya sebagai sebuah komunitas, Forum Warga, dimungkinkan menjadi ruang publik yang dimiliki oleh siapapun dan dari latar belakang apapun.

Penutup

Forum Warga Jepara telah memulai apa yang dapat dimulai berdasarkan konteks masyarakatnya. Kehadiran dan aktivitas FW Jepara sekaligus juga membuktikan bahwa rakyat bukanlah ‘benda’ yang dapat dimanipulasi dengan mengarang kebutuhan dan kepentingannya sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Sebaliknya rakyat mengenali, memahami persoalan dan kebutuhan kehidupan mereka sendiri bukan saja karena mereka yang menjalani dan menghadapinya tetapi karena mereka memaknai. Dalam hal inilah, Forum Warga Jepara membuka ruang lebih lebar lagi bagi warga untuk dapat menyuarakan persoalan, kebutuhan, aspirasi dari kehidupan mereka sendiri.

Mendorong partisipasi publik bukanlah berandai-andai mewakili suara rakyat dengan “membayangkan” persoalan dan kebutuhan mereka. Mendorong partisipasi publik adalah membuka ruang bagi rakyat untuk berbicara, bercerita, bersuara, beraspirasi. Mendorong partisipasi publik adalah juga menempatkan para pemangku jabatan di pemerintahan adalah juga fasilitator yang menjalankan apa yang disuarakan, diaspirasikan oleh rakyat. Para pemangku jabatan di pemerintah menjadi “pelayan” bagi kebutuhan rakyat dengan beragam persoalannya.

Jika prasyarat demokrasi adalah peningkatan pendidikan rakyat sehingga demokrasi menempatkan kesetaraan bagi seluruh rakyat, maka proses pemberdayaan, penyadaran tentang pentingnya partisipasi warga untuk turut terlibat dalam kebijakan yang *nota bene* menentukan kehidupan mereka perlulah dilanjutkan. Sistem yang dijalani selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru yang mengakar membutuhkan kerja lebih untuk mengubah cara pandang terhadap demokrasi yang ‘hanya’ mengandalkan sistem keterwakilan (yang seringkali berkaitan dengan kolusi, nepotisme). Proses pemberdayaan ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang berada di

pemerintahan tetapi juga dikalangan warga, rakyat, yang seringkali masih terpola dengan sistem *patronase*.

Karena itulah demokrasi adalah jalan panjang yang masih terus dirintis, diperjuangkan oleh berbagai pihak. Tetapi bukan lagi mimpi, karena sudah ada awal.*** **(Choirul Anam)**

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN

I. LATAR BELAKANG

- ▶ DPRD memiliki beban yang sangat berat dengan stigma-stigma negatif yang dialamatkan kepada DPRD.
- ▶ Kami menyadari, mengapa stigma-stigma negatif tersebut tetap ada, tiada lain karena kami kurang sosialisasi, kurang berhubungan dgn media, dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi fungsi DPRD
- ▶ Jumlah anggota DPRD terdiri dari 45 Orang dengan latar belakang heterogen dan kualitas yang beragam, sehingga membutuhkan partisipasi yang sangat luas dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
- ▶ Perlu adanya pencitraan kembali DPRD melalui optimalisasi pelaksanaan ketiga fungsi DPRD yang didukung oleh nilai-nilai ; partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

II. KEGIATAN-KEGIATAN DPRD DALAM RANGKA MENSTIMULASI KETERLIBATAN MASYARAKAT

A. Mengembangkan metode outreach/ menjangkau masyarakat dalam rangka pelibatan publik, melalui ;

- ▶ Pembuatan dan penyebaran; poster APBD sampai pelosok desa dan tempat-tempat umum, sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan publik.
- ▶ Penyebaran Leaflet agenda kegiatan DPRD tiap masa persidangan, sebagai wujud transparansi kegiatan-kegiatan DPRD.
- ▶ Pemasangan baligho agenda kegiatan DPRD dan Billboard Sosialisasi DPRD.
- ▶ Penerbitan majalah kiprah DPRD.
- ▶ Mengadakan acara rutin di Radio dalam bentuk talk Show, tiap minggu 1 kali, dengan nama acara : DPRD mendengar (parlementaria).
- ▶ Setiap ada persidangan di DPRD disebarluaskan secara langsung oleh radio (live).

- ▶ Setiap kehadiran dan ketidakhadiran anggota DPRD dalam persidangan nama-namanya ditanyakan melalui layar monitor di ruang sidang.
- ▶ Mengadakan kegiatan safari jum'at, tiap 2 jumat 1 kali dibagi 2 rombongan.
- ▶ Mengadakan kegiatan DPRD saba desa tiap bulan, hari sabtu dan minggu.
- ▶ Menyediakan fasilitas untuk menyampaikan aspirasi melalui program SMS (software khusus polling dan sms).

B. Secara Konsisten melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan publik melalui:

- ▶ Rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan masyarakat
- ▶ Mengadakan acara open house rutin setiap bulan dengan berbagai komponen masyarakat
- ▶ Penyampaian progress report DPRD setiap masa persidangan.
- ▶ Pembahasan RKA SKPD di komisi-komisi dengan melibatkan peserta Musrenbang Kabupaten.
- ▶ Mengadakan konsultasi publik setelah penyampaian Nota Pengantar APBD.

III. UPAYA DPRD DALAM PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

- ▶ Adanya kesepahaman tentang pentingnya pelibatan warga yang selama ini telah dilakukan oleh DPRD dilembagakan dalam bentuk peraturan daerah terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran.
- ▶ Berkat kerjasama antara DPRD dan CSO lahir PERDA NO. 1 tahun 2007 tentang prosedur perencanaan dan penganggaran daerah.
- ▶ Perda tersebut akan lebih menguatkan peran serta masyarakat dalam keterlibatannya pada pembahasan kebijakan publik.

IV. CATATAN2 PENTING DARI PERDA TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

- ▶ Adanya penyusunan pra RKA SKPD pada awal pembahasan APBD (sebelum pembahasan KUA) oleh setiap SKPD.
- ▶ Ditetapkannya PAGU indikatif Kecamatan.
- ▶ Forum delegasi Musrenbang yang akan mengawal pembahasan mulai dari perencanaan s/d penetapan APBD

V. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG LAHIRNYA PERDA TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

- ▶ Adanya kesepahaman pada anggota DPRD tentang pentingnya pelibatan warga dalam pembahasan anggaran.
- ▶ Adanya kesepahaman antara DPRD dengan CSO mengenai kelemahan-kelemahan pelaksanaan Musrenbang selama ini.
- ▶ Adanya komunikasi yang intensif antara DPRD dengan CSO.
- ▶ Bertemunya antara anggota DPRD yang ingin melakukan perubahan dengan warga aktif yang ingin melakukan perubahan juga (sinergisitas).

(H. Dony Ahmad Munir, ST. MM.)



MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN, MEMBANGUN KESETARAAN PEMERINTAH DAN RAKYAT

Reformasi sudah berjalan hampir satu dekade. Banyak perubahan bisa dirasakan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kehidupan demokrasi yang makin kondusif. Di lain sisi, reformasi yang juga menghasilkan desentralisasi atau otonomi daerah tidak luput melahirkan beberapa sisi gelap. Korupsi, kolusi dan nepotisme makin menggejala. Bila dulu hanya dilakukan elite-elite pemerintah pusat, kini makin fenomenal karena juga dilakukan banyak elite lokal. Modus operandinya pun makin beragam.

Rupanya, reformasi belum bisa membuat perubahan pada tingkat penyelenggara negara dan birokrasi. Sekadar menyebut bidang-bidang yang masih kedodoran, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih cukup besar, seakan pemerintah adalah pusat jawaban seluruh masalah; dan para penyelenggara negara sendiri masih arogan menganggap diri sebagai “raja” bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga sangat lemah sehingga masih belum bisa memutus rantai yang panjang, berbelit, tidak efektif dan efisien.

Kondisi semacam ini tentu saja kurang menguntungkan dan tidak kondusif bagi pembangunan secara menyeluruh, terutama sangat dirasakan di daerah-daerah sejak otonomi diberlakukan pada 1999. Sejak itu kita mendapatkan kenyataan pemerintahan daerah berlomba-lomba mencari cara untuk mengakumulasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk biaya pembangunan dengan cara meningkatkan beban pajak, pungutan, retribusi, perijinan dan lain-lain. Yang menderita tidak lain adalah masyarakat sendiri. Banyak anggota masyarakat bisa menerima semua biaya kenaikan dan pajak, dengan syarat dana-dana itu digunakan secara tepat dan maslahat bagi masyarakat secara keseluruhan. Bila pemerintah daerah sering memasang iklan “warga bijak taat bayar pajak”, maka masyarakat menuntut “pemerintah bijak tidak korup dana pajak”.

Dua tuntutan semacam ini dapat dimaknai secara positif sebagai titik tolak untuk mencari kesepahaman tentang pentingnya menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan rakyat. Saling percaya adalah modal sosial yang perlu ditumbuhkan untuk membangun *good governance*, yakni suatu tata kelola pemerintahan yang ditegakkan di atas prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas, egalitarian, serta efektif dan efisien. Inti dari prinsip-prinsip di atas dapat diringkas ke dalam tiga aspek: prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk

membangun kepercayaan publik kepada pemerintah, demikian ungkap Mohammad Taufik A.

Partisipasi Egaliter Warga

Sebagaimana sudah disinggung dalam dialog sebelumnya, partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan publik adalah prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar dalam rangka pembangunan yang memihak kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, relevan membicarakan suatu visi pemerintahan yang terbuka atas suara-suara warganya demi kemajuan daerahnya secara umum. Pemerintahan yang terbuka pada partisipasi warga hanya bisa dilakukan manakala pemerintahan sendiri mulai mengupayakan perubahan nilai dan perilaku dari “tata perintah” (*government*) ke “tata kelola” (*governance*). Pemerintahan bukanlah “mengatur” apalagi “memerintah” dengan mempergunakan pendekatan *top down* sebagaimana dipamerkan dalam pengaturan negara dan kota-kota di negeri ini selama lebih dari tiga dasa warsa. Namun ia lebih merupakan seni mengelola (*the art of management*). Oleh karena itu, menurut Achmad Suud dan disetujui Robert Candra, kata kuncinya adalah kepemimpinan (*leadership*). Karakteristik dari seni mengelola tercermin dalam beberapa misi pemerintahan daerah sebagai berikut.

Pertama, pendekatan partisipatif adalah syarat yang tak dapat ditolak dalam konsolidasi *good governance* dan pemerintahan demokratis. Partisipasi akar-rumpun cenderung dimaknai sebagai salah satu fondasi demokrasi. Meski ini esensial, namun kita perlu definisi yang lebih memadai. Partisipasi demokratis adalah partisipasi dari dan untuk semua. Ini menghendaki penghargaan atas hak-hak asasi bagi semua warga, mulai dengan hak berkumpul dan mengemukakan pendapat. Ini artinya mempromosikan suatu budaya yang “memobilisasi” (bukan “memerintah”) *semua* tanpa pengecualian.

Partisipasi demokratis bukan hanya sebatas hal sipil dan politik, yang biasanya direduksi menjadi perwakilan melalui pemilihan umum. Ia harus meliputi semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural bagi seluruh warga. *Good governance* tidak dapat dibangun dengan menentang kehendak warganya. Harus ada ruang bagi setiap warga. Jadi, tidak ada demokrasi tanpa kewargaan bagi semua. Sebentuk contoh dapat dilihat pada praktik partisipasi yang diselenggarakan di Kabupaten Lebak melalui pembentukan *community stakeholder* yang merangkul berbagai unsur warga, seperti legislatif, akademisi, alim ulama, tokoh pemuda, dan *stakeholder* lain bersama-sama untuk membicarakan kepentingan-kepentingan masyarakat, yang dipaparkan Robert Chandra.

Bukan pekerjaan mudah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat akan kepentingan mereka dan mendorong semangat partisipasi di kalangan mereka

sendiri. Biasanya masyarakat yang kurang berdaya secara obyektif dan secara subyektif merasa minder. Usaha mengubah semangat mereka agar tidak minder dan memberikan bekal kepada mereka, seperti di Gunungkidul misalnya, menurut Mohammad Taufik A, merupakan perjalanan yang luar biasa dalam kondisi masyarakat dengan segala keterbatasan wawasan. Langkah pertama yang dilakukan untuk mendorong partisipasi warga adalah menumbuhkan kepercayaan diri, dan membahasakan informasi menurut bahasa yang mereka pahami. Fase berikutnya mempertemukan mereka dengan kelompok-kelompok lain agar pergaulan dan wawasan bertambah. Hal ini merupakan langkah-langkah praktis meski belum berhasil secara keseluruhan karena tidak mungkin dilakukan ke semua wilayah di kabupaten Gunungkidul ini.

Rasa minder masyarakat ketika berhadapan dengan para eksekutif adalah basis data yang akurat. Eksekutif juga mempunyai pengalaman panjang. Pada fase itulah masyarakat harus memperkuat diri bukan untuk bertaruh dengan eksekutif, namun untuk menjalankan proses *check and balance*.

Kedua, pendekatan kewargaan dalam menciptakan keterlibatan setiap orang dan kesadaran akan tanggung jawab mereka. Pendekatan ini memikirkan kembali kewargaan sebagai memikirkan kemanusiaan. Prasyarat bagi kewargaan yang bertanggung jawab adalah dengan mengkonstruksi relasi baru antara pengelola dan yang dikelola, antara pemerintah dan rakyat, yang di mata Mohammad Taufiq A. merupakan fondasi membangun relasi kesetaraan antara dua pihak ini. Relasi kesetaraan ini meletakkan kemanusiaan di jantung politik, dan memenuhi kebutuhan material sehari-hari warga, khususnya perumahan dan semua layanan publik. “Mengelola” adalah membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mengelola bukan semata urusan pejabat dan lembaga setempat, bahkan wewenang semua orang. Mengelola bukan melulu bekerja dalam wilayah politik, namun juga wilayah material. Tidak ada kewargaan yang bertanggung jawab bila di sana masih terdapat pengangguran, ketiadaan tempat tinggal dan layanan-layanan publik yang memadai. Dengan kata lain, semua problem material menjadi tanggung jawab sosial setiap warga kota yang setia untuk saling membantu satu dengan yang lain. Jadi, kewargaan terkait dengan martabat kemanusiaan.

Ketiga, pelembagaan demokrasi. Demokrasi dan kewargaan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tidak dapat direduksi sekadar hak memilih/dipilih. Representasi sejati melalui pemilihan para wakil warga harus menjadi tujuan. Karena itu, sebuah kota/kabupaten memerlukan semacam dewan kota yang anggotanya dipilih langsung oleh komunitas. Anggota dewan kota adalah mereka yang benar-benar tahu problem komunitasnya dan dari merekalah perubahan-perubahan penting dimungkinkan. Keputusan-keputusan mereka berdampak pada perbaikan kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan masyarakat, seperti distribusi air bersih, layanan kesehatan pokok, ruang-ruang publik, dan sebagainya.

Transparansi: Jaminan Kebebasan atas Informasi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Ada beberapa cara yang dapat diadopsi dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi, antara lain: *Pertama*, pemerintah kota/kecamatan membuka diri dalam hal informasi. Menurut Setyo Dwi Herwanto, program pembangunan tidak boleh disembunyikan dari masyarakatnya. Melihat pengalaman kota Solo, dinas-dinas pemerintahan daerah mau membuka informasi yang terkait dengan program-programnya. Sayangnya masih ada kekurangan dalam hal akses informasi ini, yaitu dinas kesehatan maupun dinas lainnya belum memiliki meja informasi (*front office*). Kasus yang sering dijumpai ketika masyarakat datang ke suatu dinas untuk bertanya, mereka mengalami kebingungan harus bertanya kepada siapa. Kalaupun ada orang untuk tempat bertanya tetapi hanya sekadar menunjuk si A, itu pun tidak ditunjukkan orang yang mana, di mana posisinya. Usulan dari kami kepada masing-masing dinas, sediakan meja informasi agar masyarakat memiliki tempat untuk bertanya mengenai beberapa hal.

Kedua, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah tentang transparansi sebagai bentuk legalisasi bagi para penyelenggara pemerintahan sendiri, dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi pedoman hukum bagi pengawasan. Hal semacam ini dilakukan di Kabupaten Lebak. Jadi, sekali lagi di sini memang diperlukan suatu *leadership* kepala daerah untuk membuka kran transparansi.

Ketiga, memulai transparansi dari level *top management*. Dalam konteks ini kita bisa belajar dari pengalaman Kabupaten Lebak. Menurut Robert Candra, pada tahun 2004, Bupati baru naik ke tampuk pimpinan daerah. Pada waktu itu, bupati membutuhkan waktu satu tahun untuk membentuk komisi transparansi, terbentuk tahun 2005. Proses yang dilalui dimulai dari penetapan Perda sampai dengan operasionalnya. Bantuan APBD sebesar 500 juta per tahun untuk komisi transparansi, 135 juta sebagai tunjangan kehormatan, hak perorangan, dan operasional kantor, dana mediasi dan advokasi sekitar 155 juta.

Transparansi pada level ini juga dilakukan dengan cara pihak top management mengajak secara bersama-sama warga untuk mengetahui proses Musrenbang dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Pelibatan perempuan dalam usaha transparansi ada 5 orang, sesuai kapasitasnya, kepala dinas yang berjenis kelamin perempuan ada: Ibu Sri Rahayu (Pemberdayaan

Masyarakat), Ibu H Trigoyati (bidang ekonomi), dr Syeirul (dinas kesehatan), dr Mulya (kepala RS). Peran perempuan jangan dibatasi.

Keempat, diseminasi informasi. Pemerintah daerah membuat poster tentang berbagai program pembangunan untuk disebar ke desa-desa, kecamatan untuk dibaca. Ada kewajiban badan publik untuk memberikan informasi. Setiap dokumen publik wajib diinformasikan kepada masyarakat. Jangan banyak berharap masyarakat untuk tahu jika kita tidak berusaha menyebarkan informasi yang mereka butuhkan. Transparansi perlu diawali dari niat baik, baru melangkah pada proses pelaksanaan.

Di Lebak misalnya, KPP berusaha membuka cabang melalui PIW (Pusat Informasi Warga); dari 28 kecamatan, baru 6 yang telah berjalan. Jika ada penanaman investasi dengan skala besar, pemerintah daerah selalu melibatkan LSM untuk memberikan pencerahan dan amunisi kepada masyarakat. Hikmah yang dapat diambil dengan diseminasi informasi ini, antara lain para birokrat harus memiliki standard dalam pembuatan konsep. Percepatan birokrat didukung oleh CSBI, sedangkan untuk kalangan legislatif dibantu USAID-LGSP. Masuknya donor-donor asing ke Lebak disebabkan Pemda membuka semua informasi. “Semakin kita buka informasi, maka semakin dapat mencegah fitnah”, ujar Robert Candra.

Akuntabilitas: Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Rakyat

Akuntabilitas adalah indikator untuk melihat seberapa jauh aktivitas pemerintah atau pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah telah memenuhi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas merupakan keniscayaan untuk menjaga amanat rakyat yang dimandatkan kepada pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Akuntabilitas sangat erat hubungannya terutama dengan masalah pertanggung jawaban perolehan dan penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berkenaan dengan masalah pertama, tuntutan otonomi daerah telah memaksa pemerintah daerah mencari cara dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk akumulasi pendapatan asli daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD seringkali memberi dampak buruk dan mencekik masyarakat. Masyarakat kurang merasakan hasil pembangunan karena APBD yang dikumpulkan dari pajak rakyat itu seringkali disalahgunakan oleh pemerintah untuk belanja pejabat. Belanja pejabat lebih besar dari belanja untuk keperluan pembangunan itu sendiri. Masyarakat merasa telah menjadi sapi perah untuk memenuhi nafsu konsumerisme pejabat, tandas Achmad Suud.

Agar upaya menggenjot PAD tidak melahirkan kesengsaraan masyarakat sebagai pembayar pajak, pemerintah daerah sebenarnya bisa mempergunakan pendekatan layanan satu pintu. Layanan satu pintu ini di satu sisi mempermudah anggota masyarakat untuk mengurus berbagai perijinan. Semakin cepat, mudah, dan pendek rantai birokrasi, kemauan masyarakat untuk melegalkan seluruh aktivitas usaha mereka makin tinggi. Ini artinya pemasukan daerah dengan sendirinya akan meningkat. Melalui layanan satu pintu ini pula, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang membuat ekonomi biaya tinggi. Pungutan-pungutan liar bisa semaksimal mungkin dihindarkan.

Kedua, PAD dapat ditingkatkan dengan cara menyelenggarakan kebijakan perijinan usaha yang kondusif. Investor manapun selalu mempertimbangkan kemudahan perijinan sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dana mereka ke suatu daerah. Dengan cara ini, pemerintah daerah tidak menemukan kesulitan untuk membiayai sendiri program-program pembangunan karena dapat diatasi dengan investasi.

Ketiga, retribusi yang makin meningkat jumlah dan macamnya, karena ditetapkan melalui peraturan daerah, adalah sumber lain PAD. Agar retribusi dapat dirasakan manfaatnya, maka ada dua cara dapat dilakukan di sini: menengok kasus Solo, yang dituturkan Setyo Dwi Herwanto. misalnya, retribusi masih tetap dibebankan kepada masyarakat, tidak dapat dihilangkan, namun pengelolaannya diupayakan secara swakelola oleh pelayan masyarakat sendiri. Dan semua itu masih tetap dikoordinasikan dengan APBD. Cara lain adalah forum warga dan CSO bisa melakukan pendekatan dengan kalangan eksekutif dan legislatif yang dipandang progresif. Tujuannya, menurut Mohammad Taufik A, mempengaruhi mereka agar memangkas prosedur sehingga penghasilan unit pelayanan publik tidak harus disetor sebagai PAD, tetapi langsung masuk kembali kepada unit pelayanan yang bersangkutan..

Keempat, menarik investasi. Syaratnya sederhana, yaitu pemerintah daerah harus dapat membuktikan diri transparan dan akuntabel, serta mampu memelihara jejaring dengan investor. Menurut Robert Candra, di Lebak, Bupati selalu mendorong teknokrat dan birokrat mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur (jalan bagus, komunikasi baik, air lancar). Sebagai pengusaha, Bupati Lebak tidak ingin masyarakatnya mengalami kesulitan yang pernah dialaminya ketika berusaha. Jika semua sudah tersusun rapi infrastruktur dan perijinannya maka para investor akan datang dengan sendirinya. Seperti investor dari Australia yang datang sendiri dengan nilai investasi sebesar 3,6 Milyar, dan sudah ditandatangani Bupati atas seijin Gubernur, untuk menanamkan dananya di pabrik semen di Lebak Selatan. Yang kedua adalah investasi dari PT. Sampoerna. Kita mengetahui pabrik terbesar di Asia (tidak bermaksud promosi) adalah Sampoerna. Satu MPS (mitra produksi sigarete) Sampoerna membutuhkan 2100 pegawai dengan proporsi

2000 perempuan dan 100 laki-laki. Pak Bupati sempat bertanya kepada investor tersebut kenapa memilih Lebak. Ternyata investor memilih Lebak karena daerah ini memiliki infrastruktur dan pelayanan perijinan yang baik, serta transparansi yang jelas. Seandainya pemda telah berbuat yang terbaik, maka tidak perlu mencari dana, investor pasti akan datang dengan sendirinya, untuk itu, birokrasi, DPRD, LSM, dan akademisi perlu menyatukan energi dan sumber daya untuk melakukan perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Akuntabilitas juga berkenaan dengan kesesuaian dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Ini bisa dilaksanakan sejak perumusan dan pengambilan kebijakan publik. Untuk menjaga akuntabilitas di Kabupaten Lebak misalnya, proses pengambilan kebijakan dan penetapan Raperda anggaran pelayanan publik sedapat mungkin melibatkan *stakeholder*. Anggota Pansus dan Pokja yang dibentuk, diberi waktu yang cukup untuk dapat mengundang kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan. NDI, LGSP dan Pattiro duduk bersama anggota dewan pada pembahasan APBD yang dihadiri oleh Sekda, dan Bappeda. Mereka duduk bersama untuk melakukan pembahasan, memberikan koreksi dan masukan guna memperoleh hasil terbaik. Bila pada tahun 2003 Lebak mengalokasikan anggaran pelayanan publik 30%, dan 70% belanja rutin pegawainya, kini persentasinya sudah berubah menjadi 60% untuk pelayanan publik dan 40% untuk belanja pegawai. Dengan cara ini pula Lebak dapat mengurangi jumlah desa tertinggal dari 199 pada 1994, kini pada tahun 2007 desa tertinggal berkurang menjadi 52.

Dari paparan di muka, kita memperoleh pelajaran berguna bahwa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai cermin dari penyelenggaraan *good governance* oleh pemerintahan yang bersih dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, karena anggaran pembangunan dan pelayanan publik dapat dijamin berada pada rel yang benar. Peningkatan SDM dapat dipacu melalui pelayanan publik, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Disisi lain, dengan cara ini pula, SDM yang dihasilkan pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. **(Editor)**

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN MENTRADISIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS : Pengalaman Kabupaten Lebak

KONDISI UMUM

- ▶ Luas Wilayah Kabupaten Lebak : 304.472 Ha.
- ▶ Jumlah Penduduk (BPS-2006) : 1.201.690 Jiwa.
- ▶ Administrasi Pemerintahan : 28 Kecamatan.
315 Desa.
5 Kelurahan.
- ▶ Garis Pantai Lebak bagian selatan : 91,42 Kilometer.
- ▶ Pada awal tahun 2004 terdapat 190 Desa Tertinggal, Alhamdulillah melalui Percepatan Pembangunan Daerah, jumlah desa tertinggal telah berkurang secara bertahap sebanyak **138 Desa Tertinggal.**

KONDISI PEMERINTAHAN

- ▶ Sekretariat Daerah 1 Satuan Kerja (8 Bagian)
- ▶ Sekretariat DPRD 1 Satuan Kerja (2 Bagian)
- ▶ Badan 4 Satuan Kerja
- ▶ Dinas 14 Satuan Kerja
- ▶ Kantor 9 Satuan Kerja
- ▶ Kecamatan 28 Satuan Kerja

Sejak awal Tahun 2006, Kabupaten Lebak telah mulai mengoperasionalkan secara efektif Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Perusahaan Daerah Lebak Niaga.

KONDISI KETERTINGGALAN DAERAH DI AWAL TAHUN 2004

Ruas Jalan Kabupaten 933 Km dengan kondisi :

- Baik : 27,02%
- Sedang / Rusak : 72,98%

KONDISI PENDIDIKAN :

- ▶ APK SD/MI & SMP/MTs jauh tertinggal di bawah APK Nasional & Propinsi
- ▶ 54,61% dari 763 SD dalam kondisi Rusak

KONDISI KESEHATAN

- ▶ 35 Puskesmas dan 74 Pustu memerlukan rehabilitasi.
- ▶ Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis masih terbatas, serta 149 desa sulit dijangkau Kendaraan Puskesmas Roda 4, sehingga dibutuhkan Mantri Keliling.

REHABILITASI INFRASTRUKTUR MEMBUTUHKAN WAKTU

11 – 14 TAHUN

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2004 hanya Rp. 12 Miliar Lebih Sehubungan dengan itu kami melaksanakan :

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH yang TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL

VISI KABUPATEN LEBAK

“KABUPATEN LEBAK MENJADI DAERAH YANG MENARIK UNTUK BERINVESTASI PADA TAHUN 2009”

M I S I

MEWUJUDKAN LEBAK SEBAGAI DAERAH YANG KONDUSIF DALAM BERINVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

LATAR BELAKANG VISI – MISI INVESTASI

$Y = G + C + I + NEI$

Pertumbuhan Ekonomi = Belanja Pemerintah + Konsumsi Masyarakat + Investasi + Arus Brg & Jasa

- ▶ Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak tidak dapat hanya mengandalkan APBD dan Daya Beli Masyarakat yang relatif terbatas ;
- ▶ Arus keluar masuk barang dan jasa sangat tergantung kepada mekanisme pasar (hukum ekonomi) ;
- ▶ Pilihan rasional untuk mengejar pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan sub fungsi **INVESTASI**.

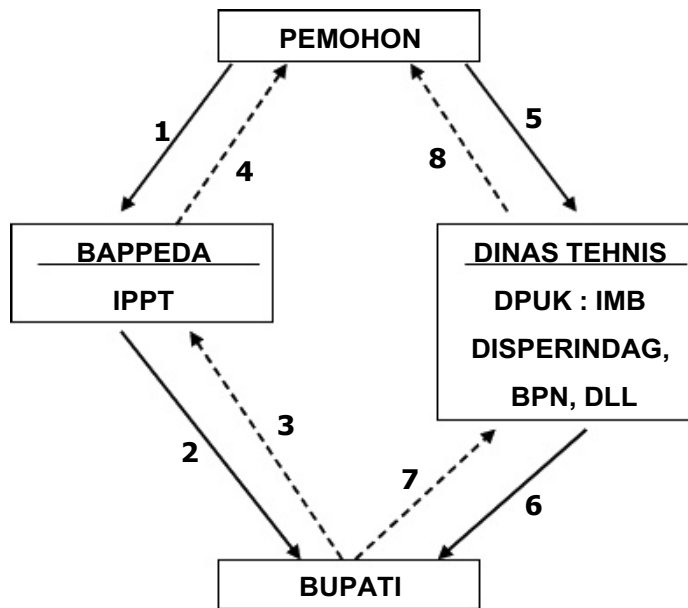
APA YANG DIPERTIMBANGKAN INVESTOR SAAT AKAN MENANAMKAN MODAL ?

- ▶ Ketersediaan Infrastruktur Dasar Penunjang Investasi (**Jalan, Air Bersih, Listrik, Telekomunikasi dlsb-nya**)

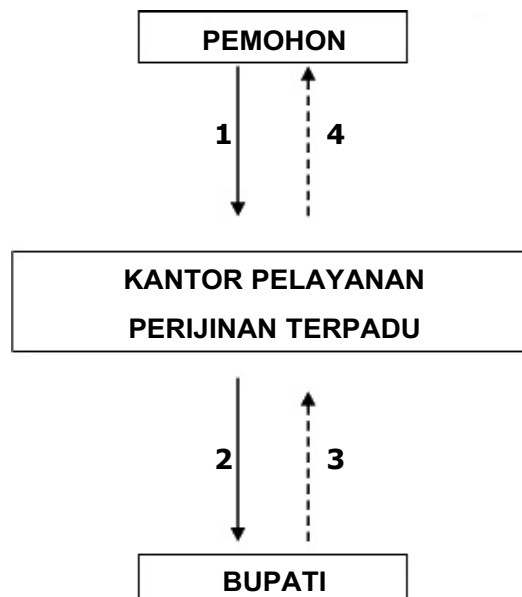
- ▶ Efektivitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan (**Tepat Waktu dan Biaya Jelas**)
- ▶ Penerapan kaidah-kaidah Tata Pemerintahan yang baik (**Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas**)
- ▶ Situasi Kamtibmas dan karakter masyarakat setempat

PENATAAN PELAYANAN PERIJINAN PENANAMAN MODAL / INVESTASI DI KABUPATEN LEBAK – PROPINSI BANTEN

MEKANISME PERIJINAN HINGGA AKHIR 2005



MEKANISME PERIJINAN PADA TAHUN 2006



BEBERAPA UPAYA YANG PERLU DIKEDEPANKAN

- ▶ Mendorong percepatan pembangunan yang berkualitas untuk menjamin ketersediaan infrastruktur penunjang penanaman modal ;
- ▶ Meneguhkan komitmen segenap Pemangku Kepentingan (*Multi Stakeholders*) dalam mendukung efektivitas kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
- ▶ Evaluasi berkelanjutan atas implementasi Perda 6/2004 tentang Transparansi dan Partisipasi ;
- ▶ Optimalisasi *Comparative and Competitive Advantage*.

RANGKAIAN BENANG MERAH PENGALAMAN MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

- ▶ Yakinkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengatasi berbagai masalah.
- ▶ Syarat mutlak untuk memperoleh partisipasi adalah dengan melaksanakan transparansi dan memberikan berbagai akses terhadap informasi publik.
- ▶ Menjaga momentum secara berkelanjutan dengan melibatkan alim ulama, mass media, kelompok perempuan, tokoh pemuda dan mahasiswa.
- ▶ Mendorong seluruh proses legal formal dengan senantiasa mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan akuntabilitas.

ESENSI UTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

- ▶ Melibatkan partisipasi secara luas dengan menyediakan berbagai informasi guna : merumuskan visi dan misi serta rencana strategis daerah.
- ▶ Ketersediaan informasi yang memadai dalam hal program pembangunan tahunan daerah, hingga proses penyusunan apbd.
- ▶ Ketersediaan informasi guna memperoleh partisipasi dalam menyusun peraturan daerah.
- ▶ Keterbukaan dalam pengawasan dan evaluasi berbagai kebijakan serta program.

BEBERAPA HASIL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

- ▶ Pendapatan asli daerah kabupaten lebak tahun 2004, hanya sebesar 12 miliar rupiah lebih, sedangkan pada tahun 2007 pad kabupaten lebak telah mencapai 40 miliar rupiah lebih.
- ▶ Jumlah desa tertinggal berkurang secara bertahap yaitu dari 190 desa menjadi 138 desa.
- ▶ Kinerja rekanan meningkat karena dievaluasi secara obyektif dan tegas dengan menerapkan "*punish & reward*".

- ▶ Kehidupan sosial-politik dan sosial-kemasyarakatan menjadi lebih sehat, dinamis dan mampu mencegah fitnah.
- ▶ Aparat birokrasi mulai terbiasa untuk bekerja lebih terbuka dan profesional sesuai bidang tugasnya.
- ▶ Hasil evaluasi kppod – undp menetapkan kabupaten lebak sebagai tiga besar nasional untuk daerah berinvestasi.

TANTANGAN DAN AGENDA

- ▶ Mempertahankan semangat keterbukaan dengan membuka saluran-saluran komunikasi intensif guna mengatasi resistensi pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan implementasi amanat perda no.6 th.2004 tentang transparansi dan partisipasi.
- ▶ Memfasilitasi komisi transparansi partisipasi sesuai kebutuhan, termasuk mengatur mekanisme dan tata kerjanya, guna mencegah duplikasi tugas serta kewenangan dengan institusi lain (dprd dan bawasda).
- ▶ **Memohon penetapan ruu – kmip** untuk membuka akses informasi di lingkungan instansi vertikal yang bertugas di daerah (bpn ; samsat-polri ; kejarri ; bpn ; pengadilan ; departemen agama dll) guna meningkatkan pelayanan publik.*** **(H. Mulyadi Jayabaya)**

MERETAS JALAN GOOD GOVERNANCE, MEMBANGUN PONDASI KESETARAAN RELASI RAKYAT-PEMERINTAH: Menengok kasus Gunungkidul

Abstrak

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah kita (baik pusat maupun daerah) pasca krisis ekonomi dan reformasi adalah turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif).

Oleh karena itu, pasca reformasi, paradigma penyelenggaraan pemerintahan baru mensyaratkan adanya perubahan dalam mekanisme komunikasi pemerintah yang semula kurang responsif dan akomodatif kepada masyarakat menjadi lebih terbuka, produktif, efektif dan efisien. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merupakan fondasi dasar untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan manajemen pemerintahan. *Good governance* hadir di atas prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas, egalitarian, serta efektif dan efisien.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah telah sesuai dengan norma/nilai yang dianut rakyat; dan apakah penyelenggaraan pelayanan publik tersebut telah mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa, untuk siapa, beserta alasannya.*”

Transparansi dan akuntabilitas adalah penting untuk *stakeholders* memahami pemerintahan daerah dan mengetahui bagaimana, apa, dan siapa penerima manfaat dari pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Kata kunci: *good governance*, hak publik, kewajiban pemerintah, kesetaraan relasi.

Pendahuluan

Gunungkidul merupakan satu dari 5 kabupaten/ kota yang berada di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta. Persoalan akut yang dihadapi Gunungkidul sampai dengan saat ini adalah problem kemiskinan. Masalah kemiskinan di Gunungkidul antara lain ditandai oleh jumlah penduduk dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin masih cukup tinggi (28,06% penduduk masuk kategori penduduk miskin). Selain itu, kemiskinan bisa dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2006 hanya sebesar 69,5.

Gambaran demografis penduduk Gunungkidul, dari total 759.859 jiwa penduduknya, lebih dari 50% hanya berpendidikan Sekolah Dasar, dan ada sekitar 6,3% dari total penduduk merupakan warga yang masih buta huruf. Sebanyak 69% penduduk Gunungkidul hidup sebagai petani dan peternak, 18% berkecimpung dalam sektor perdagangan, usaha dan jasa, sisanya merupakan kelompok buruh, karyawan, dll. Sementara itu, 95% penduduk Gunungkidul beragama Islam, 2% Kristen, 2% Katolik, sisanya beragama Budha, Hindu, dll.

Tantangan dalam Agenda Implementasi *Good Governance* di Gunungkidul

Penyelenggaraan pemerintahan di Gunungkidul dalam rentang satu dasawarsa terakhir juga masih menyisakan tantangan yang berat dalam mewujudkan *good governance*. Sejumlah persoalan yang menjadi tantangan tersebut diantaranya adalah:

1. Masih lekatnya paradigma *government* sentris dan bias birokrasi
Tantangan terbesar penyelenggaraan *good governance* di Gunungkidul adalah mentalitas birokrasi (*mental block*), yang menganggap kapasitas masyarakat masih sangat terbatas, birokrasi lebih paham akan persoalan masyarakat (bahkan dibanding masyarakat itu sendiri). Bias birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendelegasian wewenang ke pemerintah desa, maupun program-program pembangunan yang bisa diselenggarakan sendiri oleh masyarakat.

Masih banyaknya penduduk Gunungkidul yang illiterate, sering dijadikan legitimasi para birokrat untuk mengambil “kebijakan sepihak.” Dalam beberapa kali forum rembuk warga yang diselenggarakan *Maarif Institute* Gunungkidul (MI-GK), para pamong desa juga banyak mengeluhkan kebijakan-kebijakan daerah yang cenderung sentralistis di Kabupaten. Ada indikasi bahwa sebagian besar birokrat juga masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansinya.

Selain itu, masih banyak program-kegiatan di tiap SKPD yang berorientasi “proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi lokal (kelembagaan partisipasi masyarakat) pun dilaksanakan dengan pendekatan proyek.

2. Komitmen reformasi birokrasi masih lemah di internal birokrasi Pemkab *Mindset* dan kultur birokrasi yang masih memosisikan diri sebagai ‘pangreh praja’ bukan ‘pamong praja’, ditandai dengan keluhan mayoritas responden terhadap kualitas pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah, utamanya di bidang layanan pendidikan dan kesehatan, mal-distribusi pupuk dalam sektor pertanian, serta kredit usaha yang tidak tepat sasaran (mayoritas diberikan kepada kelompok *poverty* potensial, bukan pada kelompok *poverty* impoten). Demikian pula banyaknya keluhan mengenai diskriminasi layanan untuk para keluarga miskin pemegang kartu SKTM, Askeskin dan Jamkesos menjadi indikator layanan publik yang belum prima.

Reformasi birokrasi di Pemkab Gunungkidul mengalami *trade-off* di fase wacana dan konsep pada level *top leader bureaucracy*, belum banyak menyentuh kalangan *street level bureaucracy*. Hal ini ditandai dengan banyak keluhan masyarakat lewat MI-GK mengenai kualitas pelayanan dasar, utamanya bidang pendidikan dan kesehatan. Para guru yang tidak disiplin, pegawai Puskesmas yang kurang ramah serta maraknya pungli untuk pengurusan surat-surat di Kelurahan menempati rangking keluhan tertinggi.

3. Lemahnya partisipasi publik

Dalam proses formulasi kebijakan publik maupun dalam proses penganggaran, masih terdapat bias aktor. *Executive heavy* masih menjadi fenomena umum yang dominan di Gunungkidul. Musrembang masih menjadi wahana partisipasi semu dari masyarakat, karena yang datang dan diundang dalam kenyataannya adalah para birokrat yang memang seringkali diposisikan sebagai representasi tokoh masyarakat. Masih terjadi distorsi dan manipulasi forum-forum yang sesungguhnya didesain untuk menjadi forum partisipatif oleh kelompok tertentu, seperti elit desa, birokrat, dll.

Dari sekian banyak kebijakan-program-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terinventarisir dalam skema rencana pembangunan Kabupaten Gunungkidul, mayoritas merupakan reka-kreasi pihak eksekutif, Renja SKPD belum menjadi sarana artikulasi yang partisipatif.

Dalam dimensi kelembagaan, peran DPRD belum optimal dalam menjalankan pengawasan. Persoalan kapasitas anggota dewan dan ketercukupan informasi masih menjadi kendala. Kultur masyarakat yang

masih banyak 'nyadhong' ketika berinteraksi dengan anggota dewan membuat *gap* relasi anggota DPRD dengan konstituen.

4. *Gap* antara *Top Level Bureaucracy* dengan struktur di bawahnya Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih melalui Pilkada Langsung 2005 selaku *top level bureaucracy* mempunyai misi untuk melakukan reformasi birokrasi, salah satunya mengubah *mind-set* birokrasi dari 'pangreh praja' menjadi 'pamong praja', meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun hal tersebut masih terkendala di tingkatan aparatur birokrasi di bawahnya yang masih enggan untuk berubah. Banyak ide dan gagasan progresif dari bupati kurang sigap direspon dan diterjemahkan dalam implementasi oleh birokrasi Pemkab Gunungkidul. Kondisi ini seringkali menyebabkan kekecewaan di masyarakat yang menilai Bupati tidak sungguh-sungguh dalam tiap statemen publiknya.

Dari semua paparan tersebut di atas, tantangan paling berat dalam agenda besar demokratisasi dan perwujudan *good governance* di Gunungkidul yakni masih lebarnya jurang kesenjangan antara pemerintah dengan warga. Birokrasi pemerintah yang sedemikian *powerful* dengan segala kelebihanannya (posisi sosial, kualitas SDM, informasi, dsb), dibanding warga yang demikian *powerless* dengan segala keserbaterbatasannya.

Menyisir Bubur Panas dari Pinggir

Berangkat dari kondisi tersebut, beberapa agenda yang dilakukan MI-GK adalah:

a. Penguatan dan pendampingan masyarakat

Mula-mula yang dilakukan MI-GK adalah melakukan *mapping* aktor dan *stakeholders* di Gunungkidul. Di level masyarakat, terdapat 3 kelompok: ormas, organisasi berbasis profesi dan LSM. Masuk dalam kategori ormas ini adalah ormas keagamaan (Muhammadiyah, NU, PGI, KWI—dan organisasi *underbow*-nya) yang cukup besar pengaruhnya di kalangan masyarakat Gunungkidul; organisasi profesi diantaranya PGRI, KIM (dulu Kelompok Pencapir), Poktan (Kelompok Tani), Asosiasi Ubi Kayu, dll.; termasuk dalam kategori ini adalah kalangan akademisi dan organisasi kemahasiswaan. Sementara itu LSM yang ada di Gunungkidul memang jumlahnya tidak banyak.

MI-GK melakukan pendampingan dengan turut serta dalam aktivitas rembug internal, memfasilitasi pertemuan lintas organisasi, serta dengan beberapa kegiatan stimulus (pelatihan untuk kelompok petani, kader posyandu, pengelola PKBM, dll). Metode tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi warga dengan meningkatkan kesadaran warga tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

publik, setidaknya pada kebijakan publik yang nantinya bersinggungan dengan aktivitas mereka. MI-GK juga menggunakan media berupa poster, *leaflet* dan buletin sebagai wahana informasi dan kampanye kepada warga. Di dalam media yang tersebut disampaikan sejumlah persoalan kemiskinan di Gunungkidul yang merupakan hasil rumusan dari serangkaian diskusi warga, termasuk *review* terhadap sejumlah kebijakan-program yang dijalankan pemkab Gunungkidul, juga *review* terhadap anggaran publik (APBD) sebagai ‘amunisi’ bagi warga untuk berinteraksi dengan pemerintah.

b. Pendekatan terhadap birokrasi

Langkah mendekati birokrasi didasari asumsi bahwa tidak semua birokrat bermental anti-reformasi. Dan di jajaran eksekutif, ternyata cukup banyak birokrat yang visioner, berpikiran terbuka untuk perubahan memajukan Gunungkidul.

Kepada mereka MI-GK melakukan pendekatan dengan mengajak diskusi dengan topik seputar persoalan pemerintahan, kebijakan publik, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, termasuk kendala-kendala internal di kalangan birokrasi Pemkab Gunungkidul.

Mereka bersikap sangat *welcome* terhadap ide, gagasan perubahan; juga mau berbagi informasi dan data, termasuk ketika dipertemukan dengan perwakilan kelompok warga dalam pertemuan forum warga. Pertemuan forum warga-eksekutif yang difasilitasi MI-GK bersifat tematik, misalnya forum warga membahas pendidikan, kesehatan maupun pertanian. Para birokrat dalam kategori ini justru berterimakasih karena telah difasilitasi bertemu dengan representasi warga yang banyak menyampaikan *uneg-uneg* (keluhan), maupun mereka sendiri dapat berbagi informasi serta mengklarifikasi sejumlah program-kebijakan Pemkab kepada warga.

c. Pendekatan terhadap legislatif

Persoalan utama hubungan antar lembaga (legislatif-eksekutif) di Gunungkidul adalah adanya kesalingcurigaan antar keduanya, utamanya jika berkaitan dengan persoalan perumusan kebijakan, khususnya dalam hal penganggaran.

Eksekutif merasa lebih memahami persoalan karena pengalaman dan kompetensi teknis (yang spesifik), sementara DPRD merasa sebagai pemegang kekuasaan legislasi dan mempunyai legitimasi politis (dukungan warga). Namun demikian, anggota DPRD merasa memiliki kendala berupa persoalan kapasitas (dan kompetensi) anggota dewan dan ketercukupan informasi mengenai pokok persoalan yang dibahas dalam agenda kebijakan.

Bercermin dari kondisi tersebut, MI-GK memfasilitasi DPRD dengan menyelenggarakan diskusi-diskusi lintas fraksi dan inter-komisi dengan menyodorkan sejumlah hasil riset (lapangan maupun dokumen) sebagai basis

data dan informasi yang melengkapi wawasan anggota DPRD. Dari kegiatan tersebut, anggota Dewan juga tergerak untuk membuat forum-forum pertemuan berkala dengan konstituen di dapel (daerah pemilihan) masing-masing, dengan mekanisme lintas fraksi.

d. Membuat Forum bersama (warga-eksekutif-legislatif)

Setelah warga mempunyai 'bekal' (informasi, kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara), sejumlah birokrat yang visioner, berpikiran terbuka, serta sejumlah anggota DPRD yang tidak lagi 'alergi' dengan konstituen, maka MI-GK memfasilitasi forum pertemuan/rembug bersama antara warga-legislatif-eksekutif.

Dalam forum-forum yang telah diselenggarakan selama ini, sejumlah manfaat yang dirasakan *stakeholders* Gunungkidul adalah:

- pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif) bisa memberikan penjelasan langsung kepada warga tentang program-kebijakan yang sedang direncanakan maupun yang sedang diimplementasikan;
- pihak masyarakat bisa menanyakan dan mengklarifikasi sejumlah persoalan dan kejanggalan-kejanggalan terkait program-kebijakan pemerintah yang mereka rasakan;
- masyarakat bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan persoalan yang mereka hadapi dan menyampaikan usulan desain kebijakan seperti apa yang pas menurut mereka;
- pemerintah (eksekutif-legislatif) dan masyarakat sepakat untuk memperbaiki pola relasi selama ini, termasuk bagaimana menyelenggarakan Musrembang yang lebih partisipatif dan transparan.

e. Membuka kran konsultasi publik

Iklim keterbukaan dan spirit (sentimen) kompetisi antar kepala daerah dimanfaatkan untuk 'mengompori' *Top Leader Bureaucracy* di Gunungkidul untuk membuat inovasi dalam pencapaian *good governance*. Dalam kepemimpinan Bupati Suharto kali ini Pemkab Gunungkidul telah mempunyai *website* (<http://www.kab-gunungkidul.go.id>) sebagai wahana informasi, 'etalase' dan keterbukaan terhadap publik. *Website* Pemkab Gunungkidul pada tahun 2007 ini telah dikelola secara profesional, dengan *updating* tiap hari. Statistik kunjungan ke *website* tersebut juga cukup tinggi (rata-rata 700-1000 orang per hari).

Masa jabatan bupati kali ini yang baru dalam periode I juga 'dimanfaatkan' untuk mendorong bupati mengambil sikap dan kebijakan yang populis. Bupati telah terdorong untuk mengkreasi forum-forum informal untuk berinteraksi langsung dengan warga, misalnya berupa jumatatan keliling, forum panen, jalan sehat, sepeda santai, *tasyakuran* dan diskusi interaktif di televisi. Forum-forum ini merupakan sarana untuk mensosialisasikan program Pemkab di satu pihak

dan menyerap aspirasi warga di pihak lain. Ini dilakukan secara rutin dan bersifat lebih bebas dibandingkan forum-forum sejenis pada masa Orba.

f. Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif agar lebih akuntabel dalam melayani warga

Di ranah eksekutif hal ini sudah mulai ada perubahan dengan hadirnya KPTSP (Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk melayani keperluan perijinan, kependudukan dan administrasi pertanahan. Selain itu, untuk memfasilitasi interaksi, penyampaian keluhan dan konsultasi dari warga terhadap Bupati, Bupati Gunungkidul juga telah membuka layanan ‘SMS Bupati’.

Selain itu, Pemkab Gunungkidul juga telah membentuk tim kerja untuk mengkaji peraturan daerah (perda) yang bersifat menghambat iklim usaha dan kegiatan perekonomian warga Gunungkidul. Salah satu tujuan dari pengkajian regulasi daerah itu yakni untuk penghilangan hambatan dalam pengurusan perizinan usaha, serta upaya penyederhanaan sistem retribusi dan pajak daerah. Sementara ini, dari 150 perda yang dihasilkan dari tahun 1998-2007, terdapat 10 perda yang dinilai bermasalah, dan akan dilakukan revisi dalam waktu dekat ini.

g. Membangun jejaring pengawasan dengan LSM, Ombudsman dan Pers

Peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara bersama. Beberapa institusi yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah LSM, Ombudsman dan pers. MI-GK membangun jejaring bersama mereka, khususnya dalam membangun kesadaran warga atas pemenuhan hak-hak dasar (kesehatan dan pendidikan). Dalam rentang setahun ini Ombudsman (sebagai lembaga *hybrid* yang mempunyai fungsi pengawasan) telah menangani 8 kasus pengaduan di Gunungkidul. Sementara itu, MI-GK bersama dengan jejaring LSM yang berkiprah di Gunungkidul telah mendorong konsultasi publik untuk masalah-masalah berkaitan dengan keuangan daerah melalui mekanisme *participatory budgeting*. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam forum tersebut adalah kelompok ibu-ibu, kelompok petani penggarap hutan, kelompok pemuda, dll.

Epilog

Kompleksitas tantangan pengejawantahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Gunungkidul sangat kompleks. Maka upaya yang pertama dilakukan adalah melakukan *mapping* masalah dan aktor. Karena sejumlah keterbatasan yang ada (*resources*, waktu dan jangkauan), maka dalam fase tahun-tahun awal aktivitas perlu dibuat skala prioritas agenda kegiatan. Persoalan mendesak untuk dibenahi adalah pola relasi masyarakat dan pemerintah yang timpang.

Oleh karenanya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat **“kesepakatan”** dan **“komitmen”** tentang hubungan pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan warga masyarakat, termasuk dalam pembagian peran dan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan kesepakatan disini adalah komitmen untuk secara bersama-sama membangun *good and democratic governance* dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan melakukan *empowering* bagi masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan upayanya untuk ikut bersama-sama menjaga, mengawal dan mengawasi jalannya konsistensi dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai agen pembangun, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Agenda pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk ikut serta mengawal komitmen pemerintah agar tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan pragmatis dan politis. Oleh karenanya diperlunya masyarakat sipil yang berdaya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika menemukan kejanggalan dalam pemerintahan maka mereka, melalui media massa dan kelompok strategis lainnya, dapat melakukan kontrol agar pemerintahan tetap berjalan di jalan yang benar. Masyarakat yang berdaya ini hanya bisa terwujud jika ada penyediaan ruang bagi mereka untuk melakukan aktivitasnya dan adanya garansi bahwa aktivitasnya akan mendapat respon yang positif dari pemerintah. *Allahua'lam..*** (Mohammad Taufiq A)*

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SEBUAH JALAN UNTUK MERAH KEPERCAYAAN MASYARAKAT

“...Saya ingin dokumen pemerintah seperti percepatan pembangunan ini terbuka ke masyarakat luas, sehingga kita semua bisa mengukur kemajuannya. Demikianlah ciri – ciri dari sebuah good governance, pemerintahan yang baik,”
(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).

Sekapur Sirih

Persaingan antara kekuatan negara dan kekuatan pasar agaknya semakin kuat. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1930, tatanan masyarakat dunia mengalami pergeseran. Peristiwa tersebut sesungguhnya telah mengawali pergeseran paradigma dari masyarakat liberal yang diatur oleh mekanisme pasar menuju masyarakat negara yang diatur oleh negara. Peradaban global telah melahirkan lembaga bangsa-bangsa yang dikenal dengan Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN). PBB kemudian tampil menjadi kerjaan dunia yang mengatur negara-negara dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pada negara ketiga seperti Indonesia terjadi dominasi bahkan hegemoni negara terhadap rakyatnya. Muncullah gerakan-gerakan *Non Government Organization* (NGO) yang memperjuangkan isu demokratisasi dan HAM.

Melihat hal itu agaknya kekuatan pasar dunia pun kembali mengkonsolidasikan kekuatannya, sehingga mampu bangkit kembali pada seperempat abad terakhir. Berdirilah lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan dunia seperti *World Bank* (WB), *International Monetary Fund* (IMF), *World Trade Organization* (WTO) dan sebagainya. Dunia pun selanjutnya dipimpin oleh dua kerajaan besar yaitu kerajaan dibawah dominasi kekuatan negara (PBB) dan kerajaan di bawah dominasi kekuatan pasar (WB, IMF, WTO). Namun, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 telah memunculkan gejala baru. Peristiwa tersebut seakan-akan menjadi simbol atas ketidakmampuan negara-negara dalam menata dunia dan digantikan oleh kekuatan pasar dunia. Pelucutan kekuatan solidaritas bangsa pun diperlihatkan dengan tidak dipatuhinya Resolusi PBB atas operasi militer AS di Irak.

Persaingan kekuatan dari dominasi Negara ke arah kepemimpinan mekanisme pasar ini, akan membawa perubahan besar baik pada konstelasi ekonomi politik internasional, tata pemerintahan sampai bangunan teori ilmu pengetahuan. Dunia sekarang ini sedang berada pada masa transisi. Perubahan besar akan

terjadi; posisi dan peran negara akan didefinisikan kembali, sudah barang tentu hak warga pun akan ikut didefinisikan ulang menuju tatanan masyarakat neo-liberal. Lembaga apa pun yang tidak mampu melakukan penyesuaian dan akomodasi akan menuai kebangkrutan, termasuk negara.

Good Governance agaknya telah menjadi ajang yang menarik bagi dua kekuatan tersebut. Bersaing atau berbagi peran di dalamnya. Terdapat beberapa perbedaan penekanan, walaupun terdapat persamaan fokus dan ide utamanya. UNDP, misalnya, memberikan penekanan khusus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan transformasi administrasi publik (UN Report, 1998). Sementara itu, Bank Dunia lebih memberikan perhatian pada pendayagunaan sumber daya sosial dan ekonomi bagi pembangunan. Sedangkan *Organisation for Economic Cooperation dan Development* (OECD) menekankan pada penghargaan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan legitimasi pemerintah.

Terlepas dari itu semua, *Good Governance* seringkali dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik dalam suatu negara. *Good Governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti transparansi, partisipatif, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektifitas, profesionalisme. Di atas semua itu, atribut utama *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut.¹

Jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Dan ketiganya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip yang lain.²

Dari ketiga prinsip tersebut, saat ini partisipasi masyarakat masih menduduki peringkat pertama dalam pelaksanaannya. Di semua daerah dari daerah hingga pusat. Sehingga seolah-olah ketika sebuah daerah dalam setiap pengambilan keputusannya telah mengakomodasi partisipasi masyarakat, maka daerah tersebut telah melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Lantas bagaimana dengan akuntabilitas dan transparansinya?

Seotong Kisah dari Kota Surakarta

Pada tahun 2005 pasca pilkada, di Kota Surakarta, telah terjadi satu langkah kecil dalam rangka menuju akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan media sosialisasi anggaran dan program pembangunan Kota Surakarta tahu 2005. Penerbitan media sosialisasi ini tentunya tidak langsung mendapatkan tanggapan baik dari sebagian kelompok masyarakat. Bagi pihak-pihak yang merasa terancam kepentingannya memandang sinis dan pesimis terhadap kegunaan media sosialisasi ini. Bahkan pihak legislatif sempat merasa khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat jika masyarakat mengetahui anggaran pembangunan di Kota Surakarta. Pihak legislatif pada awalnya belum bisa menerima penerbitan media sosialisasi ini. Meskipun (seharusnya) media ini bisa menjadi salah satu alat mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan kebermanfaatannya yang telah dirasakan masyarakat (salah satunya adalah menghindarkan masyarakat dari usulan-usulan yang sama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan –Musrenbang-), maka pada tahun 2006, media sosialisasi program pembangunan dibuat kembali. Hampir bersamaan dengan peluncuran media sosialisasi program pembangunan tahun 2006, pemerintah Kota Surakarta juga meluncurkan SMS pengaduan. Dengan nomor 0817441111 (Walikota) dan 0817442222 (Wakil Walikota). Masih pada tahun yang sama, Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencoba untuk membuat dalam skala lebih kecil. Selain program-program yang dilaksanakan beserta anggarannya, Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga menyertakan informasi-informasi terkait dengan kebijakan sektor kesehatan (salah satunya adalah informasi tanggal-tanggal rawan penyakit tertentu). Dengan adanya informasi ini diharapkan tingkat preventif dalam masyarakat akan terbangun.

Tahun 2007 ini pemerintah Kota Surakarta kembali membuat media sosialisasi program pembangunan dan anggaran pembangunan. Semakin banyak kelompok masyarakat terbantu dengan adanya media sosialisasi ini. Dengan adanya media sosialisasi ini masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang ada di wilayahnya? Berapa anggarannya? Siapa pelaksananya? Kalau ingin menanyakan nomor kontak berapa? Sehingga masyarakat akan lebih mudah jika membutuhkan informasi terhadap pembangunan di Kota Surakarta. Setelah peluncuran SMS pengaduan pada tahun sebelumnya, tahun 2007 ini pemerintah Kota Surakarta meluncurkan *call centre* melalui nomor 0271-666229.

Catatan Kecil untuk Akuntabilitas dan Transparansi³

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-

nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan,
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*,
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku,
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi,
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nir massa, maupun media komunikasi personal,
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program,
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat,
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Sedangkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standardisasi dari semua proses-proses pelayanan publik,
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik,
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Akuntabilitas dan Transparansi Sebuah Tantangan.

Belajar dari sepenggal cerita di atas, hal utama bagi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya *good will* penyelenggara Negara dan Kepercayaan Masyarakat. Baru kemudian disusul dengan ketegasan dari kepala daerah untuk melaksanakannya. Tanpa modal awal tersebut maka pelaksanaan *good governance* (khususnya akuntabilitas dan transparansi) di suatu daerah akan terhambat.

Sampai saat ini akuntabilitas dan transparansi masih dirasakan sebagai hal yang berat untuk dilaksanakan. Alasan adanya “rahasia dapur” tidak boleh di ketahui masyarakat seringkali masih terdengar. Pengetahuan penyelenggara negara tentang apa yang harus dipublikasikan, dan apa yang memang menjadi rahasia negara masih diragukan. Ketidaktahuan ini seringkali memunculkan perlakuan “pukul rata” terhadap informasi dari pemerintah. Sehingga masyarakat masih merasakan kesulitan mengakses informasi. Padahal salah satu indikator pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan Negara adalah adanya jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh akses atau kebebasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Alasan lain yang sering muncul dan menjadi hambatan dalam mendorong pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di suatu daerah adalah kekhawatiran akan terjadi gejolak sosial jika masyarakat mengetahui informasi-informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran pembangunan. Alasan ini sebenarnya menyiratkan ketidakmampuan dan ketidaksiapan penyelenggara Negara (pihak yang diberi mandat) dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat (pihak yang memberi mandat).

Keadaan ini tentunya juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagaimana dengan implementasi UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN di daerah? Dalam undang-undang tersebut jelas mencantumkan asas-asas penyelenggaraan negara dan penjelasan-penjelasanannya. Salah satu asasnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Alangkah disayangkan jika penyelenggara negara belum melaksanakan peraturan perundang-undangan ini sebagai asas penyelenggaraan negara. Sangat disayangkan lagi jika penyelenggara negara belum mengetahui adanya peraturan undang-undang ini. Apakah tidak mungkin masyarakat akan meragukan kredibilitas penyelenggara negara dan berangsur-angsur hilang kepercayaannya?

Kepercayaan masyarakat sangat penting artinya bagi pembangunan sebuah negara. Sebelum Nabi Muhammad SAW dikukuhkan menjadi seorang Rasul beliau sudah sangat populer di tengah masyarakat Kota Makkah dengan gelar al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya (amanah/kredibel). Sungguh dahsyat pengaruh suatu kepercayaan dan luar biasa pentingnya untuk kesuksesan pembangunan. Kepercayaan melampaui modal harta benda, kedudukan, jabatan, atau ilmu sekalipun. Ketika kepercayaan sudah sirna di hati masyarakat, sulit untuk tumbuh kembali. Walaupun dengan berjuta janji atau membayar dengan harta sebanyak apapun, jika kepercayaan masyarakat sudah hilang maka perasaan yang muncul adalah selalu mencurigai dan rasa tidak dipercaya akan selalu membayang dan membekas. Maka yang akan terjadi adalah ketidaknyamanan dalam bekerja dan bermasyarakat.

Sebuah tantangan yang tidak mudah bagi penyelenggara Negara untuk meraih kepercayaan dari masyarakat sebagai pemberi mandat? Terlebih pasca era tertutup selama 32 tahun lebih. Belum lagi ditambah dengan persaingan antara kekuatan pasar dan kekuatan Negara. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah menjadikan akuntabilitas dan transparansi sebagai kebutuhan dan mengimplementasikan dalam setiap kebijakan. Karena saat ini kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberikan mandat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pihak yang memberikan mandat.*** **(Setyo Dwi Herwanto)**

Catatan Kaki

1

Tatag Wiranto. 2002. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Bapenas.

2

Dra.Loina Lalolo Krina P. 2003.

Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Jakarta: Bapenas.

3

Dra.Loina Lalolo Krina P. 2003.

Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Jakarta: Bapenas.



POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

A. Pokok Pikiran

Secara doktriner, pemihakan Islam terhadap 'orang miskin' dan proses-proses pengeolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bukanlah hal yang baru. Term '*fukoro* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), dan *mustadz'afin* (orang tertindas)' merupakan term yang dapat kita temui dengan mudah baik dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Kitab-kitab Fiqih baik klasik maupun modern.

Umat Islam harus bekerja keras dalam memerangi kemiskinan, karena kemiskinan seperti Hadits Nabi "... mendekatkan pada kekufuran.." pengingkaran terhadap nilai islam yang sangat pundamental". Allah Swt. Menyebutkan bahwa "Dia ada bersama orang-orang miskin" karena itu bekerja dan berfihak kepada orang miskin seharusnya merupakan bagian dari upaya untuk mendekat (*taqorub*) kepadanya. Dalam banyak hal, kemiskinan bukan merupakan akibat dari keterbatasan sumber daya (*natural resources*) melainkan karena keserakahan dan regim yang menindas. Karena itu, alqur'an sering menyebut orang-orang miskin sebagai 'kelompok *mustadzafin* (kelompok tertindas)' yang secara sengaja dimiskinkan dan disingkirkan oleh 'kelompok *mustaqbirin* (kelompok orang-orang yang sombong dan penindas)'. Dalam situasi ini, maka salah satu misi kenabian adalah berfihak kepada kelompok mustadzafin untuk melawan kelompok mustaqbirin. Dalam situasi ini Allah berjanjiuntuk memenangkan orang-orang mustadzafin dan para pembelanya.

Dengan doktrin di atas, tidak mengherankan jika sejak awal masyarakat muslim telah membentuk lembaga-lembaga yang berusaha membebaskan orang dari kemiskinan baik muslim maupun non-muslim untuk. Zakat dan Shodaqoh merupakan lembaga yang diinisiasi untuk redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Nabi juga menganjurkan orang untuk sensitif dan mau menyantuni orang miskin dan anak-nak yatim.. Dari sisi pengelolaan, doktrin dan raktek masyarakat islam juga mendorong agar jabatan dan kekayaan ditempatkan sebagai 'amanah' (kepercayaan). Karena itu, proses redistribusi kekayaan yang melibatkan lembaga perantara (pemerintah) haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip amanah yaitu: kejujuran, keadilan, transparan, muswarah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara lahir (duniawi) maupun batin. Dengan demikian, dalam doktrin dan tradisi islam kesalehan spiritual harus dikonversi dan tercermin dalam

kesalehan sosial. Kesalehan harus tercermin dalam struktur sosial yang adil dan tidak timpang.

Dengan kekayaan doktrin dan contoh tradisi masyarakat awal muslim (*ashabiqunal awal*), maka tidak mengherankan jika sejak awal gerakan organisasi berbasis Islam di Indonesia tidak hanya bergerak di sektor ritual tetapi juga di sektor-sektor sosial. NU memulai gerakannya melalui pendidikan dan usaha-usaha pembentukan kegiatan ekonomi alternatif di pedesaan. 'Pesantren' merupakan basis utama gerakan ini. Dalam pesantren, masyarakat selain mempelajari ritual juga mempelajari norma dan struktur sosial alternatif yang lebih adil dari struktur sosial yang ada. Dalam pesantren, santri (pelajar) juga dididik untuk mandiri secara ekonomi. Karena itu pesantren selalu mengajarkan kegiatan produksi (*pertanian*) dan antrepreneurship. Karena itu, santri bukan hanya penyebar doktrin ritual tetapi juga merupakan agen perubahan sosial. Di sisi lain, Muhammadiyah sejak awal sudah mendirikan lembaga-lembaga alternatif untuk pengentasan kemiskinan. Menghadapi tantangan zaman, Muhammadiyah justru mengadopsi sistem pendidikan dan lembaga-lembaga modern sebagai sarana penyebaran doktrin dan praktek islam yang pro-pada orang miskin. Karena itu sekolah, rumah sakit, dan unit ekonomi modern dimodifikasi dan disesuaikan untuk menjalankan misi Muhammadiyah untuk membela orang-orang miskin agar dapat mengakses kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan. Selain kedua organisasi Islam di atas, masih banyak kelompok-kelompok Islam yang lebih lokal dan lebih kecil juga bekerja untuk gerakan-gerakan pembebasan kemiskinan.

Sayang, justru pada perkembangannya -terutama setelah fase kemerdekaan Indonesia Merdeka- kedua organisasi Islam yang besar dan beberapa organisasi Islam yang lain justru kehilangan daya dorongnya sebagai gerakan pembebasan kemiskinan dan penegakkan keadilan. Ada dua hal yang menyebabkan ini terjadi. Pertama, organisasi Islam yang sudah besar justru mulai sibuk dengan persoalan-persoalan internalnya sendiri. Dengan kata lain terjadi proses involusi (pelipatan ke dalam dan konflik internal) dalam organisasi-organisasi Islam yang menyebabkan dia kehilangan orientasi ke luar (melihat masyarakat secara luas). Kedua, iklim politik bukan membuat organisasi ini dapat mempengaruhi struktur dan watak politik tetapi justru membuat organisasi terfragmentasi dalam kubu-kubu politik. Organisasi islam bukannya mewarnai, melainkan diwarnai oleh pragmatisme dan kepentingan politik yang beragam. Di sisi lain, orang-orang Islam yang 'progressif' justru lebih senang membentuk kelompok-kelompok kecil yang menurutnya lebih lincah dalam menjalankan misi organisasi. Dalam fase ini kita melihat lahirnya NGO yang diinisiasi oleh orang-orang yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi organisasi Islam.

Melihat fragmentasi yang terjadi, maka Konferensi Nasional: Islam, Good Governance dan Pengentasan Kemiskinan yang dihadiri oleh aktivitis dari

organisasi Islam (Muhammadiyah, NU, dan Organisasi Islam yang lain) dan aktivis NGO berkesimpulan:

1. Sudah waktunya gerakan da'wah Islam kembali pada doktrin dan tradisi awal gerakan Islam yaitu bekerjasama menegakkan keadilan untuk membebaskan manusia dari kemiskinan.
2. Berbagai elemen gerakan da'wah Islam harus segera menjalin jaringan kerja dengan NGO yang bergerak untuk mendorong tata pemerintahan yang adil dan membebaskan manusia dari kemiskinan.
3. Berbagai elemen gerakan da'wah, NGO, dan Masyarakat di tingkat Grassroots harus segera di dorong untuk aktif mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik agar berorientasi pada kemiskinan. Usaha-usaha yang dapat ditempuh diantaranya:
 - a. Mendorong organ dan aktivis organisasi untuk terlibat dan mempengaruhi program pembangunan yang dibahas dalam musrenbang agar lebih berfihak pada kelompok miskin.
 - b. Mendorong pemerintah untuk lebih amanah dalam pengelolaan pemerintahan melalui: transparansi anggaran, penegakkan akuntabilitas publik, dan pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan.
 - c. Aktif memasukan pandangan-pandangan yang pro-orang miskin dalam proses-proses politik. Keterbukaan dan persaingan politik bukan untuk dihindari, melainkan untuk dimanfaatkan sebagai wahana untuk menegakan prinsip-prinsip keadilan dan pembelaan pada kelompok miskin.
4. Agar suara dari gerakan da'wah dan NGO bukan sekedar klaim, maka gerakan da'wah dan NGO harus memperkuat forum-forum konstituen di tingkat akar rumput agar mereka lebih berani menyuarakan dan membela kepentingannya.

Kami percaya bahwa pembelaan terhadap keadilan dan kelompok miskin juga merupakan nilai kemanusiaan dan kebudayaan yang universal.

B. Rekomendasi

Pada sesi diskusi kelompok (*lesson learned* dan rekomendasi), fokus pembahasan pada penajaman pokok-pokok masalah, perumusan langkah-langkah strategis, serta menyepakati poin-poin rekomendasi yang membidik tiga ranah, yaitu regulasi, pembiayaan, dan kelembagaan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, suara warga, serta pelembagaan akuntabilitas dan transparansi. Secara umum, peserta konferensi merekomendasikan:

- a. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya membuat kesepakatan dan wilayah kerja yang jelas terkait kebijakan penanganan kemiskinan secara

integratif sehingga tidak terjadi lagi pembebanan tidak proporsional di satu pihak, khususnya mengenai regulasi, anggaran, dan lembaga.

- b. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempunyai *political will* yang kuat untuk mengeksekusi re-alokasi anggaran APBN dan APBD yang berpihak pada masyarakat miskin
- c. Pemerintah daerah hendaknya menjalin kerja-kerja kemitraan ataupun mendesain program sinergis dengan organisasi massa Islam dan NGOs sehingga tidak hanya terbangun ruang komunikasi publik antar *stakeholder* namun juga kekuatan kerja kolektif dengan semangat dan orientasi yang sama, yakni mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan masyarakat.
- d. Pihak swasta diharapkan terlibat aktif bersama pemerintah di semua level membangun kerja-kerja kemitraan, atau setidaknya komunikasi, yang memungkinkan kedua belah pihak mempunyai kebijakan yang sejalan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro sehingga melahirkan kebijakan *pro poor* di semua sektor.
- e. Jaringan kelompok-kelompok Islam (ormas dan NGOs Islam) hendaknya terus mengkampanyekan pentingnya kesadaran sekaligus praktek-praktek partisipasi publik dari arus bawah melalui proses replikasi dan diversifikasi model-model inisiatif lokal (*best practices*) pada skala luas dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial-lokal.
- f. Jaringan kelompok-kelompok Islam hendaknya merancang agenda tindak lanjut konferensi di tingkat akar rumput yang diharapkan menggerakkan roda-roda ekonomi mikro, membuka akses publik bagi masyarakat miskin, dan memperluas skala partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti workshop, pelatihan, pemberian modal, dan pendampingan. Pada saat yang sama, jaringan ini harus memperkuat peran partisipasi dan kontrol terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik oleh pemerintah, utamanya yang menyentuh hak-hak dasar warga negara.

Lampiran

PEMBICARA

Nama : **Prof. Dr. Azyumardi Azra**
Lembaga : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jabatan : Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs)
Alamat Kantor : Jl. Kertamukti, Pisangan, Ciputat 15419
Jakarta - (021) 7401472

Nama : **Dr. Sudibyo Markus**
Lembaga : PP Muhammadiyah
Jabatan : Ketua
Tempat, Tanggal Lahir : Pare (Kediri), 24 Oktober 1941
Alamat Kantor : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No.62, Jakarta Pusat
Alamat Rumah : Pamulang Permai
Telp. Kantor : 021 - 3911915
HP. : 0812 991 6660
Email : s_markus@cbn.net.id

Nama : **Ir. Musthafa Zuhad Mughni**
Lembaga : PB Nahdlatul Ulama
Jabatan : Ketua Tanfidziyah
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 18 September 1948
Alamat Kantor : Gedung PBNU
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430
Alamat Rumah : Jl. H. Samali 41-A, Kalibata,
Jakarta Selatan
Telp. Kantor : 021 - 39838022
Telp. Rumah : 021 - 7990780
HP. : 0811 812 179

Nama : **Dr. Bambang , MPM.**
Lembaga : Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Jabatan : Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 14 Agustus 1955
Alamat Kantor : Departemen Kesehatan RI
Jl. HR. Rasuna Said Blok.X-5, Kav 4-9
Blok.A Kuningan, Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Rawamangun, Jakarta Timur
Telp. Rumah : 021 - 4896248
HP. : 0812 9157 621
Email : bamsar@yahoo.com

Nama : **dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes.**
Lembaga : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Jabatan : Kepala Dinas
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 27 Juli 1963
Alamat Kantor : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Alamat Rumah : Jl. Bina Griya Raya No.648-A, Pekalongan
Telp. Kantor : 0285 - 421972
Telp. Rumah : 0285 - 421978
HP. : 081 2280 6467

Nama : **dr. Ibnu Naser Arrohimi, S.Ag., MM.R.**
Lembaga : RS. PKU Muhammadiyah Gombong,
Jawa Tengah
Jabatan : Dewan Pengurus
Tempat, Tanggal Lahir : Gombong, 18 Juli 1977
Alamat Kantor : PKU Gombong
Jl. Yos Sudarso No.461, Gombong,
Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jl. Stasiun No.6, Gombong
Telp. Kantor : 0287 - 473614
HP. : 0813 2806 5095

Nama : **Hamid Muhammad**
Lembaga : Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
Jabatan : Direktur SMP
Alamat Kantor : Departemen Pendidikan Nasional RI,
Gedung E Lt.5
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Selatan 10270

Nama : **Bahrudin**
Lembaga : Pendidikan Komunitas Qoryah Thoyyibah,
Salatiga
Jabatan : Pengelola
Tempat, Tanggal Lahir : 9 Februari 1965
Alamat Kantor : Jl. R. Mas Said No.12, Kalibening, Salatiga
Telp. Kantor : 0298 - 311438
HP. : 0817 41641 51
Email : ah_bahrudin@yahoo.com

Nama : **Suhirman**
Lembaga : FPPM

Nama : **Drs. H. Ahmad Suud**
Lembaga : Baitul Tamwil Muhammadiyah Wiradesa
Pekalongan
Alamat Kantor : Baitul Tamwil Muhammadiyah Wiradesa
Pekalongan
Alamat Rumah : Jl. Mayjen S. Parman 183, Wiradesa -
Pekalongan
Telp. Kantor : 0285 - 4417213 / 6674

Nama : **H. Dumhari Noor**
Lembaga : Pondok Pesantren Sido Giri, Pasuruan,
Jawa Timur

Nama : **Ir. H. Joko Widodo**
Lembaga : Pemerintah Daerah
Jabatan : Walikota Solo

Nama : **Doni A. Munir**
Lembaga : Legislatif Daerah
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Sumedang
Alamat Kantor : DPRD Kabupaten Sumedang
Jl. Pangeran Suriaatmaja No.10,
Sumedang, Jawa Barat
Telp. 0261 - 201229

Nama : **Choirul Anam**
Lembaga : Forum Warga Jepara
Jabatan : Koordinator
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 09 Desember 1979
Alamat Kantor : Jl. R. Tubagus RT.03 RW.07, Karang
Kebagusan, Jepara, Jawa Tengah
Alamat Rumah : Kp. Damai 01, Sowan Kidul RT.03
RW.01, Kedung, Jepara, Jawa Tengah
Telp. Rumah : 0291 - 3340836
HP. : 081 575 699 739
Email : wargajepara@yahoo.com,
sengenge24@yahoo.com
Homepage : www.anamjepara.blogspot.com

Nama : **Obeng Nur Rosyid**
Lembaga : Fahmina Institute
Jabatan : MP Islam dan Penguatan Komunitas
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Februari 1976
Alamat Kantor : FAHMINA Institute
Jl. Suparno No.37
Alamat Rumah : Jl. Bundasari No.55 Lemah Abang,
Cirebon
Telp. Kantor : 0231 - 203789
Telp. Rumah : 0231 - 3367345
HP. : 081 224 31335
Email : obeng_nr@yahoo.com

Nama : **Robert Candra**
Lembaga : Pemerintah Daerah
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak
Alamat Kantor : Jl. Alun-Alun Selatan No. 2,
Rangkasbitung - Banten

Nama : **Setyo Dwi Herwanto**
Lembaga : Pattiro Surakarta
Jabatan : Direktur
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 27 Oktober 1975
Alamat Kantor : Sodipan RT.08 RW.05, Pajang Laweyan,
Surakarta 57146
Telp. Kantor : 0271 - 7651970
HP. : 0856 4710 1111
Email : setyo_dk@yahoo.com
Homepage : www.setyodwiherwanto.blogspot.com

Nama : **Gus Nung**
Lembaga : FUKOHA
Jabatan : Direktur

Nama : **Muhammad Taufik**
Lembaga : MAARIF Institute Sekretariat Daerah
Gunung Kidul
Jabatan : Koordinator
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 7 April 1981
Alamat Kantor : Sekretariat Daerah MAARIF Institute
Gunung Kidul
Jl. Pramuka, Gg. Pudak No.7, Wonosari,
Gunung Kidul
Alamat Rumah : Ganjuran, Sb. Mulyo, Bb. Lipuro, Bantul
Telp. Kantor : 0274 - 392456
Telp. Rumah : 0274 - 7004886
HP. : 0818 0274 8174
Email : mohammad_tfq@yahoo.com

Nama : **Muhammad Mirdasy**
Lembaga : Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
PW Muhammadiyah Jawa Timur
Jabatan : Sekretaris
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 7 Januari 1970
Alamat Kantor : Jl. Kertomenanggal 4 No. 1 Surabaya
031- 8491529
Alamat Rumah : Jl. Jambu No.1, Pandean, Pasuruan,
Jawa Timur
Telp. Kantor : 031 - 8437191
Telp. Rumah : 0343 - 635030
HP. : 0816 5412 698
Email : mirdasy@yahoo.com

FASILITATOR

Nama : **Entin Sriani Muslim**
Lembaga : Sanggar Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 25 September 1968
Alamat Kantor : Jl Bojong Kaler No.22, Bandung
Alamat Rumah : Jl. Sarimadu 12-A, Sarijadi Blok 26,
Bandung
Telp. Kantor : 022 - 2502703
Telp. Rumah : 022 - 2013468
HP. : 0813 20700 440
Email : entinsrianimuslim@yahoo.com

Nama : **Herizal Effendi**
Lembaga : MAARIF Institute
Jabatan : Capacity Building Specialist
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 11 September 1966
Alamat Kantor : MAARIF Institute for Culture and
Humanity, Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
Alamat Rumah : Jl. Cicukang Gg. Mesjid I/63, Bandung
Telp. Kantor : 021 - 3914004
HP. : 0813 2121 0003
Email : herizal@maarifinstitute.org,
herizaleffendi@yahoo.com

Nama : **W. Henywati**
Lembaga : PP Nasyiatul Aisyiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 9 Juni 1967
Alamat Kantor : Jl. Parangtritis No.192, Yogyakarta
Rumah : Jl. Parangtritis Saman II / 55,
Yogyakarta
Telp. Kantor : 0274 - 374658
Telp. Rumah : 0274 - 388311
HP. : 0811 2676 23
Email : heni97@yahoo.com

NOTULENSI

Nama : **Abdul Azis**
Lembaga : Sanggar Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 20 November 1974
Alamat Kantor : Jl Bojong Kaler No.22, Bandung
Alamat Rumah : Jl. Gagak 79, Bandung
Telp. Kantor : 022 - 2502703
HP. : 0813 2151 3111
Email : boyanezuah@yahoo.com,
sanggar@bdg.centrin.net.id

Nama : **Bekti Sayekti**
Lembaga : Sanggar Bandung
Jabatan : Bendahara
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 Maret 1977
Alamat Kantor : Jl Bojong Kaler No.22, Bandung
Alamat Rumah : Jl. Gunung Semeru No.4
Telp. Kantor : 022 - 2502703
Telp. Rumah : 022 - 2002893
HP. : 0812 209 1945
Email : keykosemeru@yahoo.com,
entin@bdg.net.id

Nama : **Fitria Emazola**
Lembaga : PW IRM Jawa Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 April 1985
Alamat Kantor : Jl. Sancang No.6, Bandung, Jawa Barat
Alamat Rumah : Jl. Raya Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat
Telp. Kantor : 0251 - 640305
HP. : 0817 0817 611
Email : zola-astri@yahoo.com

EKSEKUTIF MAARIF INSTITUTE

DAN PANITIA

Nama : **Raja Juli Antoni**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Direktur Eksekutif
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Juli 1977
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta
Pusat 10350
Alamat Rumah : Jl. Banteng Gg. Samin I No.6 RT.002
RW.002, Kranji, Bekasi Barat
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003
HP. : 0812 10 8484 3
Email : antoni@maarifinstitute.org,
toni_damai@yahoo.com

Nama : **Fajar Riza Ul Haq**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Koordinator Program Pengembangan
Kajian Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 1 Februari 1979
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta
Pusat 10350
Alamat Rumah : Kp. Cibunar RT.13 RW.03, Gedepangrango,
Kadudampit, Sukabumi
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003
HP. : 0817 4403 43
Email : fajar@maarifinstitute.org,
fajarrizaulhaq@yahoo.com

Nama : **Joko Sustanto**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Koordinator Program Demokrasi dan Good Governance
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 15 Mei 1969
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Alamat Rumah : Telaga Mas Blok K2/47 Duta Harapan-Bekasi
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003
HP. : 08 111 77 60 33
Email : joko@maarifinstitute.org,
jokopeace@yahoo.com

Nama : **Endang Tirtana**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Asisten Program Pengembangan Kajian Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Balai, 8 April 1981
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Alamat Rumah : Kp. Cilangkap RT.05 RW.03, Cadassari, Tegalwaru, Purwakarta
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003
HP. : 0813 7428 3474
Email : endang@maarifinstitute.org,
hegelen@yahoo.com

Nama : **Siti Sarah Muwahidah**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Asisten Program Pengembangan Kajian Islam
Alamat Rumah : Jl. Agung Sedayu No.9-B, SAmbisari, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004

HP. : F. 021 - 3914003
: 0817 263 495
Email : sitisarahm@maarifinstitute.org,
: sitisarahm@gmail.com

Nama : **Ahmad Imam Mujadid Rais**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Asisten Program Demokrasi dan Good
Governance
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Februari 1980
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta
Pusat 10350
Alamat Rumah : Jln. H. Baping Gg. TK RT 002/09 No. 56
Ciracas-Jakarta Timur 13740
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
: F. 021 - 3914003
HP. : 085 8851111 30
Email : mujadid.rais@gmail.com

Nama : **Muhammad Supriadi**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Sekretaris Eksekutif
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1977
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
Alamat Rumah : Jl. Raya Gunung Kapur RT.15 RW.04,
Bojong Indah, Parung, Bogor
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
: F. 021 - 3914003
Telp. Rumah : 0251 - 541134
HP. : 0813 1653 8753
Email : supriadi@maarifinstitute.org,
: msupriadi@yahoo.com

Nama : **Henny Ridhowati**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Keuangan
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 24 Agustus 1976
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta
Pusat 10350
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003
HP. : 0812 8820 274
Email : henny@maarifinstitute.org

Nama : **Iwan Setiawan**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Office Boy
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Agustus 1973
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Alamat Rumah : Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta
Pusat 10350
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003

Nama : **Irman Susanto**
Lembaga : MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jabatan : Sopir
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 20 Oktober 1979
Alamat Kantor : Wisma Nusantara Lt.7
Jl. MH. Thamrin No.59, Menteng, Jakarta
Pusat 10350
Alamat Rumah : Komp. PWI Jaya Blok A-9 No.12, Cilebut
Timur, Sukaraja, Bogor
Telp. Kantor : T. 021 - 3914004
F. 021 - 3914003
HP. : 0856 9349 6114

Nama : **Ibnu Tsani**
Lembaga : Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
Jabatan : Anggota Pimpinan
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 9 Februari 1980
Alamat Kantor : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Lt.3 Jl. Menteng Raya No.62, Menteng,
Jakarta Pusat
Alamat Rumah : Jln. Lapangan Bola No. 79 Kranji-Bekasi,
Jawa Barat
HP. : 0813 1999 3121

Nama : **Umar**
Lembaga : Muhammadiyah
Jabatan : Staff Dokumentasi
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Maret 1983
Alamat Rumah : Jl. Kebon Jahe Kober II No.20, Jakarta
10160
HP. : 0813 1959 2003
Email : umar_aje@yahoo.com

Nama : **Revinna Devita**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 April 1983
Rumah : Jl. Kol. Sugiono M No.10 RT.010 RW.02,
Duren Sawit, Jakarta Timur
HP. : 0812 9722 134
Email : blackpink_r2004@yahoo.com

Nama : **Rezilina Tasya**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Juli 1981
Rumah : Jl. Kol. Sugiono M No.14 RT.010 RW.02,
Duren Sawit, Jakarta Timur
HP. : 0812 9698 120
Email : zie_rezi@yahoo.com

Nama : **Syafitri Wahyuni**
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 11 Juni 1985
Alamat Rumah : Jl. Angrek 3 RT.016 RW.02 No.17,
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan
HP. : 0856 93009086
Email : fi3_beda@yahoo.com

PESERTA

Nama : **Abdul Azis A Paturungi**
Lembaga : Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
Jabatan : Direktur Eksekutif
Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 4 Februari 1971
Alamat Kantor : Jl. Tamalate IV No 9, Makasar
Alamat Rumah : Komp. Puri Taman Sari K-1 No.5, Makassar
Telp. Kantor : 0411 - 883427
Telp. Rumah : 0411 - 4664298
HP. : 0815 2413 135
Email : yasmib@telkom.net
yasmib-sulselbar@indosat.net.id

Nama : **Abdul Halis Said**
Lembaga : Forum Solidaritas Mastarakat Poso (FSMP)
Jabatan : Ketua Umum
Tempat, Tanggal Lahir : Poso, 7 April 1977
Alamat Kantor : Jl. W. Monginsidi No.3-A, Poso
Alamat Rumah : Kel. Tegalrejo, Poso, Kota Utara
Telp. Kantor : 0452 - 23417
HP. : 0852 4132 4481

Nama : **Agus Pramono**
Lembaga : PUSHAM UNAIR
Jabatan : Peneliti

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Agustus 1981
Alamat Kantor : Jl. Ketintang Tengah IV No. 7, Surabaya
Alamat Rumah : Manukan Lor IV C No.6, Surabaya
Telp. Kantor : 031 - 70582908
Telp. Rumah : 031 - 7416509
HP. : 0817 9393 614, 031 - 60474414
Email : pusham_unair@yahoo.com,
pramono_tour@yahoo.com

Nama : **Ahmad Rifa'i**
Lembaga : INRES Solo
Jabatan : Direktur
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 9 Mei 1975
Alamat Kantor : Jl Jambu 5 No 12, RT.6 RW.5, Jajar
Laweyan Solo
Telp. Kantor : 0271 - 725548
HP. : 0815 4858 3911
Email : myrifai@yahoo.com, inres_slo@yahoo.com,
inressolo@multiply.com

Nama : **Ahmad Syauqi**
Lembaga : Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha
Kecil (PUPUK) - Surabaya
Jabatan : Direktur Eksekutif
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 14 November 1973
Alamat Kantor : Jl Gayung Kebon Sari VII/2 Injoko
Surabaya
Alamat Rumah : Tunggul Wulung Indah H-14, Malang
Telp. Kantor : 031- 8283976
HP. : 0817 9003 835
Email : syauqi@pupukindonesia.org,
farid@pupukindonesia.org
Homepage : www.pupukindonesia.org

Nama : **Akhadiansyah**
Lembaga : Lensa NTB
Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 8 Oktober 1977
Alamat Kantor : Jl. Lintas Mbawi Km.03, Dompu, NTB
Alamat Rumah : Jl Koperasi Gang II No.53-A, Ampenan,
Mataram
Telp. Kantor : 0819 1741 6611
Telp. Rumah : 0370 - 636251
HP. : 0812 3743 274
Email : lensa_ntb@yahoo.co.id

Nama : **Alif Basuki**
Lembaga : PATTIRO Surakarta
Jabatan : Program Manajer
Tempat, Tanggal Lahir : 16 Mei 1977
Alamat Kantor : Sodipan RT 08/RW 04, Pajang Laweyan,
Surakarta 57146
Telp. Kantor : 0271 - 708 5058
HP. : 0813 2909 7761
Email : aliefboys@yahoo.co.id,
pattiro_surakarta@yahoo.com

Nama : **Aminuddin Aziz**
Lembaga : PATTIRO PEKALONGAN
Jabatan : Direktur
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Maret 1972
Alamat Kantor : Jl. Parang Garuda 3 No. 1 Perum
Medono Indah Kota Pekalongan
Alamat Rumah : Jl. Raya Kertoharjo 107, Pekalongan
Selatan 51134
Telp. Kantor : 0285 - 4415868, 7910277
Telp. Rumah : 0285 - 7932273
HP. : 0815 6942 812
Email : amin_w1@yahoo.com

Nama : **Asia Andi Pananrangi, SP.**
Lembaga : Lembaga Pemberdayaan Perempuan
Bone
Jabatan : Dewan Pendiri
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 7 April 1967
Alamat Kantor : Jl. Andalas No.31, Watampone, Bone,
Sulawesi Selatan
Alamat Rumah : Desa Apala, Barebbo, Bone, Sulawesi
Selatan
HP. : 0812 422 9820, 0813 5513 2536
Email : asia_bone@yahoo.com

Nama : **Ayi Yunus Rusyana**
Lembaga : Letsform
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 08 Oktober 1975
Alamat Kantor : Jl. Sancang No.6, Bandung, Jawa Barat
40262
Alamat Rumah : Jl. Kapling Sadang No.209, Cinunuk,
Cileunyi, Bandung 40393
Telp. Rumah : 022 - 87823606
HP. : 081 323 034 965
Email : ayiyunus@yahoo.com

Nama : **B. Ely Mahmudah**
Lembaga : YKSSI
Jabatan : Koordinator Program Anggaran Pro Poor
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 5 Desember
Alamat Kantor : Jl. TG. Bangkol No.17 Karang Anyar,
Pagesangan-Mataram (NTB)
Alamat Rumah : Kebun Sari Ampenan
Telp. Kantor : 0370 - 634576
Telp. Rumah : 0370 - 625542
HP. : 081 8037 32010
Email : ely_mhd2005@yahoo.com,
ykssi@mataram.wasantara.net.id

Nama : **Bachtiar Dwi Kurniawan**
Lembaga : Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah
Jabatan : Anggota
Tempat, Tanggal Lahir : , 29 September 1981
Alamat Kantor : Jl. Cik Ditiro No. 23, Yogyakarta 55262
Jl. KH. A. Dahlan No.103, Yogyakarta
Alamat Rumah : Rejowinangun RT.24 RW.8, Kotagede, Yogyakarta
HP. : 0815 7940 860
Email : bachtiar_dk@yahoo.com

Nama : **Badiul**
Lembaga : LAKPESDAM - Jepara
Kantor : Jl. Sunantubagus RT.03 RW.01, Karang Kebagusan, Jepara, Jawa Tengah

Nama : **Basuki Abdul Aziz**
Lembaga : JPPI
Alamat Kantor : Jl. Harmawangsa III No.35, Surabaya
Telp. Kantor : 031-5035587
Email : jpmijatim@telkorn.net

Nama : **Cecep Choirul Sholeh**
Lembaga : Lakpesdam Sukoharjo
Jabatan : Sekretaris (Peneliti)
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 2 Juni 1972
Alamat Kantor : Perum Jombor Permai B – 5, RT.6 / RW 3, Bendosari, Sukoharjo
HP. : 0817 9460 679
Email : cecep_ozy@yahoo.co.id

Nama : **Daniel Wattimanela**
Lembaga : Lembaga Antar Iman Maluku
Jabatan : Internal Program Officer

Tempat, Tanggal Lahir : 9 Mei 1975
Alamat Kantor : Jl. Martha Ch. Tiahahu No.17, RT.003/
RW.01, Kel. Amantelu, Ambon 97122
Alamat Rumah : Desa Passo, Ambon
Telp. Kantor : 0911 - 342643
Telp. Rumah : 0911 - 362297
HP. : 0852 433 11722

Nama : **Defi Nopita**
Lembaga : MAARIF Institute Sekretariat Daerah
Gunung Kidul
Jabatan : Asisten Program
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 23 Desember 1983
Alamat Kantor : Jl. Pramuka, Gg. Pudak No.7, Pandansari,
Wonosari, Gunung Kidul
Alamat Rumah : Jl. Kaliurang Km.4,5, Karangbendo,
Yogyakarta
Telp. Kantor : 0274 - 392456
HP. : 0817 548 4467
Email : definopita@yahoo.co.uk

Nama : **Erwin Nugraha**
Lembaga : Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha
Kecil (PUPUK) - Bandung
Jabatan : Staff Informasi
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 22 Mei 1974
Alamat Kantor : Jl. Permata Bumi Raya Kav. 6, Cisaranten
Kulon, Arcamanik, Bandung 40293
Alamat Rumah : Komp. Bumi Panyabuban Blok 1-7 No.5,
Bandung
Telp. Kantor : 022 - 783 4482
Telp. Rumah : 022 - 91156057
Email : erwinugraha@yahoo.com,
pupuk@bdg.centrin.net.id
Homepage : www.pupukbandung.org

Nama : **Fauzan Jamal**
Lembaga : AKATIGA
Alamat Kantor : Jl TB. Ismail II No 2 Bandung 40134
Telp. Kantor : 022 - 2532326

Nama : **H.M. Musadirdja**
Lembaga : Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah
Jawa Barat
Jabatan : Sekretaris
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 16 Juli 1945
Alamat Kantor : Jl. Kancil No.1, Bandung 40262
Alamat Rumah : Jl. Cigending 685-A, Ujung Berung,
Bandung
Telp. Kantor : 022 - 7300783
Telp. Rumah : 022 - 7802701
HP. : 081 395 385 777

Nama : **Joni Lumembang**
Lembaga : Yayasan Kombongan Sitiru
Jabatan : Staf Lapangan
Tempat, Tanggal Lahir : Tana Toraja, 19 Januari 1974
Alamat Kantor : Jl. Tritura No.11 To Kaluku Makale, Tana
Toraja, Sulawesi Selatan
Alamat Rumah : Jl. Tritura No.11 To Kaluku Makale, Tana
Toraja, Sulawesi Selatan
Telp. Kantor : 0423 - 22477
Telp. Rumah : 0423 - 22477
HP. : 0813 425 04832, 0813 420 41415

Nama : **Jumarim**
Lembaga : Yayasan Pemberdayaan untuk
Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) NTB
Jabatan : Direktur
Tempat, Tanggal Lahir : Sinta-Loteng, 1976
Alamat Kantor : Jl. Telex Raya No.3 KR Bedil, Mataram
Alamat Rumah : Jl. H. Naim Gg. Nangka, Jempong Baru,
Mataram

Telp. Kantor : 0370 - 633625
HP. : 0817 5762 292
Email : jumarimumarmaye@yahoo.com,
ypkm_ntb@yahoo.com

Nama : **Marpuji Ali**
Lembaga : Biro Kerjasama PW Muhammadiyah
Jawa Tengah
Jabatan : Ketua
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 Agustus 1951
Alamat Kantor : Jl. Singosari Raya 33 Semarang
Alamat Rumah : Jl. Teratai III/15, Surakarta
Telp. Kantor : 024 - 8314823
Telp. Rumah : 0271 - 718381
HP. : 0811 294 991
Email : marpujiali@yahoo.com
Homepage : www.muhammadiyahjateng.or.id

Nama : **Mas'ad SA Fachir**
Lembaga : PWNA Jawa Timur
Jabatan : Bendahara
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Mei 1973
Alamat Kantor : Jl. Kertomenanggal VI no.2, Surabaya
Alamat Rumah : Kejawan Gebang 3 No.7, Surabaya
Telp. Kantor : 031 - 8491529
Telp. Rumah : 031 - 5927317
HP. : 0856 306 9794, 031 - 71071722
Email : aad2205@yahoo.co.id
Homepage : www.nasyiah.jatim.org

Nama : **Muchammad Fahazza**
Lembaga : PATTIRO-Malang
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 11 Januari
Alamat Kantor : Jl. Arif Margono Gg. II No. 15, Malang
Alamat Rumah : Jl. LA. Sucipto 362 Malang
Telp. Kantor : 0341 - 341 725
Telp. Rumah : 0341 - 341725

HP. : 0818 3877 05
Email : cfahazza@yahoo.com

Nama : **Muhammad Farhan**
Lembaga : ITPI [INSTITUT TATA PEMERINTAHAN
POPULAR INDONESIA]
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 Maret 1966
Alamat Kantor : Jl. Batik Kumeli No. 56 - Sukaluyu,
Bandung 40123
Alamat Rumah : Jl. Cijaura Hilin 53, Buahbatu, Bandung
40287
Telp. Kantor : 022 - 2504553
Telp. Rumah : 022 - 7501140
HP. : 0852 2084 1140, 0812 2141 920
Email : ipgisekr@bdg.centrin.net.id

Nama : **Muhammad Sayuti**
Lembaga : Majelis Reboan Yogya
Jabatan : Peneliti
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 17 Maret 1971
Alamat Kantor : Jl. Agus Salim 64-A
Alamat Rumah : Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Telp. Kantor : 0274 - 373602
Telp. Rumah : 0274 - 7804433
HP. : 0816 426 8645
Email : masyuti@yahoo.com

Nama : **Mukhsin**
Lembaga : Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah NTT
Jabatan : Sekretaris
Tempat, Tanggal Lahir : Waso Manggarai, 16 Februari 1970
Alamat Kantor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.23, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur
Alamat Rumah : Jl. Keuangan Negara II, Kota Kupang
Telp. Kantor : 0380 - 833693
Telp. Rumah : 0380 - 839305
HP. : 0813 3940 4274

Nama : **Mustamim, Drs., M.Si.**
Lembaga : Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Sulawesi Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 7 Mei 1963
Alamat Kantor : Jl. KHA Dahlan No. 49 Palu
Alamat Rumah : Jl. Al Khaerat No.9, Tondo
HP. : 0813 4103 6664

Nama : **Muttaqien**
Lembaga : LABDA-SHALAHUDDIN, YOGYAKARTA
Jabatan : Direktur Eksekutif
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 2 April 1978
Alamat Kantor : Kompleks Budi Mulia, Perum Banteng 3, Jl. Kaliurang KM 8,5 Yogyakarta
Alamat Rumah : Perum Dayu Permai C-8 - Jl. Kaliurang Km.8, Yogyakarta
Telp. Kantor : 0274 - 880731
Telp. Rumah : 0274 - 886324
HP. : 0815 6871 358
Email : muttaqien_2005@yahoo.com, labda_yk@yahoo.com

Nama : **Nadia Bafagih**
Lembaga : Yayasan Cakrawala Timur Surabaya
Jabatan : Pengurus
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 1 Mei 1975
Alamat Kantor : Jl. Siwalan Kerto Tengah 67, Surabaya 60236
Telp. Kantor : 031 - 847 1597
HP. : 0812 3510 705
Email : c-timur@sby.centrin.net.id

Nama : **Nandang Suherman**
Lembaga : B. Trust Bandung
Jabatan : Program Manager dalam Advokasi Anggaran
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17 Desember 1962

Alamat Kantor : Jl. Budiasih 5-B (Belakang LP Sumedang),
Sumedang
Alamat Rumah : Cipacing Permai Blok O/1, Jatinangor,
Sumedang
Telp. Rumah : 022 - 7797943
HP. : 0812 2008 523
Email : nsu62@yahoo.com

Nama : **Novi Romadhona**
Lembaga : MAARIF Institute Sekretariat Daerah Kota
Metro
Tempat, Tanggal Lahir : T. Karang, 25 Agustus 1978
Alamat Kantor : Jl. Terong No.5, Iring Mulyo, Kec. Metro
Timur, Kota Metro 34111
Alamat Rumah : JL. Raden Fatah No.28,xawi, Bandar
Lampung
Telp. Kantor : 0725 - 7021014
HP. : 0815 4037 967
Email : vienovie@yahoo.com

Nama : **Nur Cahyoprobo**
Lembaga : Tim Kerja Anti Korupsi Muhammadiyah
Regional DIY
Jabatan : Staf
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 20 Juli 1974
Alamat Kantor : Jl. KH. A. Dahlan No.103
Alamat Rumah : Kalakijo Triharjo, Sleman
Telp. Kantor : 0274 - 375025
Telp. Rumah : 0274 - 866173
HP. : 0815 7861 3411

Nama : **Nur Hidayat**
Lembaga : Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP)
Jabatan : Peneliti
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 18 April 1979
Alamat Kantor : Gedung Graha Pena, 8th Floor, Room 801,
Jl. A. Yani 88 Surabaya

Telp.Kantor : 031 - 8202038
HP. : 0816 536 554, 0812 3274 025
Email : hidayat@jpip.or.id, redhi@jpip.or.id
Homepage : www.jpip.or.id

Nama : **Purnama Sidik**
Lembaga : PW IRM Jawa Barat
Jabatan : Ketua Umum
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 14 Agustus 1982
Alamat Kantor : Jl. Sancang No.6, Bandung, Jawa Barat
40262
Telp. Kantor : 022 - 7312395
HP. : 0813 2252 5244
Email : purnama_sidik2k3@yahoo.com,
humanism2004@yahoo.com,
purnamaupi@yahoo.com

Nama : **Risnawaty**
Lembaga : Komunitas Peduli Perempuan dan Anak
(KPPA) Sulawesi Tengah
Jabatan : Dept. Legislasi, Anggaran & Pengawasan
Tempat, Tanggal Lahir : 26 Juni 1980
Alamat Kantor : Jl. Cemara VI No.6, Donggala Kodi, Palu
Barat, Sulawesi Tengah
Alamat Rumah : BTN Baliase, Palu Selatan
Telp. Kantor : 0451 - 461088
HP. : 0813 341 252 166
Email : risna_palu@yahoo.com

Nama : **Salim Wazdy**
Lembaga : INDIPT Kebumen, Jawa Tengah
Jabatan : Staf Peneliti
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 6 Juni 1972
Alamat Kantor : Jl. Cincin Kota, Gg. Merpati No.4,
Karangsari, Kebumen, Jawa Tengah
Alamat Rumah : RT.01 RW.03, Bagung Prembun,
Kebumen, Jawa Tengah

Telp. Kantor : 0287 - 5501864
Telp. Rumah : 0287 - 662037
HP. : 0815 6974 954
Email : s.wazdy@yahoo.com, indipt@indipt.org
Homepage : www.indipt.org

Nama : **Sarbini**
Lembaga : MAARIF Institute Sekretariat Daerah
Boyolali
Jabatan : Koordinator
Alamat Kantor : d.a. Gedung Dakwah Muhammadiyah -
Jl. Pandanaran 72
Telp. Kantor : 0276 - 331331, 0271 - 700329

Nama : **Sumiati, S.Ag.**
Lembaga : PW Aisyiah Jawa Timur
Jabatan : Wakil Ketua Kader
Alamat Kantor : Jl Kerta Manunggal VI / 2 Surabaya
Alamat Rumah : Peneleh XI No.9
Telp. Rumah : 031 - 71207159
HP. : 081 55 000 478

Nama : **Syamsuddin**
Lembaga : LAPPERA Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 16Juli 1976
Alamat Kantor : Jl. Minggiran No.61-A, Yogyakarta
Alamat Rumah : Bantul Warung, Bantul, Yogyakarta
Telp. Kantor : 0274 - 375 416
HP. : 0856 4304 5662
Email : syamdin@yahoo.com

Nama : **Ulul Albab**
Lembaga : Public House
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 April 1981
Alamat Kantor : Jl. KH. Mas Mansyur No.2, Bendan -

Alamat Rumah : Pekalongan - JATENG
: Jl. Jlamprang Krapyok Kidul, Gg. P No.13,
Pekalongan - JATENG
Telp. Kantor : 0285 - 423850
HP. : 0856 4257 1917

Nama : **Yuliati Umrah**
Lembaga : ALIT
Jabatan : Direktur Eksekutif
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 16 Juli 1975
Alamat Kantor : Jl Achmad Jais no 68, Surabaya,
Jawa Timur
Alamat Rumah : Jl. Kebraon Manis Selatan I No.42
Telp. Kantor : 031 - 532 2768
HP. : 0816 515 961
Email : yumrah@yahoo.co.uk,
areklintang@sby.centrin.net.id
Homepage : www.areklintang.org

Nama : **Zulfatun Ni'mah**
Lembaga : Lakpesdam Cilacap
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Desember 1979
Alamat Kantor : Jl Masjid No.1 / 36, Cilacap 53225
Alamat Rumah : Jl. Kyai Asy'ari No.12, Planjan, Kesugihan
Telp. Kantor : 0282 - 521141
HP. : 0813 270 44124
Email : zulfa_ma@yahoo.com

PROFIL

MAARIF INSTITUTE

for Culture and Humanity

Latarbelakang

Maarif Institute for Culture and Humanity didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2003. Kelahirannya bermula dari kesadaran akan pentingnya institusi kultural yang memperjuangkan tersosialisasikannya watak dan ciri khas Islam Indonesia sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*, inklusif, dan toleran serta memiliki kompatibilitas dengan demokrasi yang berpihak kepada keadilan.

Hal ini menjadi penting karena distorsi interpretasi terhadap Islam telah memunculkan wajah Islam yang anti-demokrasi dan anti-kemajuan, pro-kekerasan, dan anarkis. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian krisis ekonomi, politik, dan kerusakan sosial lainnya menuntut perlu munculnya “tenda bangsa” sebagai upaya konsolidasi kepemimpinan masyarakat di luar kekuatan partai-partai.

Ahmad Syafii Maarif adalah seorang tokoh Islam yang dapat dikatakan sebagai sedikit figur bangsa yang tetap konsisten dalam perjuangan Islam kultural yang inklusif. Sebagai tokoh Islam, ia berani menegaskan bahwa negara Indonesia harus tetap menjadi negara yang berdiri di atas Pancasila; bukan “negara agama” tertentu. Ia adalah teladan (*uswah*), sosok yang menampilkan Islam kultural secara pluralis, dan cermin yang sesungguhnya dari sikap *rahmatan lil alamin*; yakni ajaran Islam yang paling mendasar bahwa keislaman adalah sebuah sikap kemanusiaan yang bajik bagi apa dan siapa saja.

Visi

Terwujudnya cita-cita intelektualisme dan sosial Ahmad Syafii Maarif untuk memperjuangkan tegaknya prinsip-prinsip Islam yang inklusif, toleran, humanis, berkeadaban, dan damai sebagai landasan demokrasi dan keadilan sosial.

M i s i

1. Mensosialisasikan gagasan pembaharuan Islam serta melakukan dialog dan kerja sama antar-agama, antar-budaya, dan antar-peradaban dalam rangka mewujudkan keadaban, perdamaian, saling pengertian, dan kerjasama yang konstruktif bagi kemanusiaan.
2. Memperjuangkan percepatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi civil society, legislatif, dan eksekutif serta mendorong proses resolusi konflik, mediasi, dan rekonsiliasi.

Program dan Aktivitas

1. Program Pengembangan Kajian Islam

Program bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengkampanye kan gagasan Islam yang berkemajuan. Program mencakup kegiatan penerbitan Media MAARIF, penerbitan buku, seminar/simposium nasional dan internasional, pelatihan dan *capacity building*, workshop, dan dialog antar agama. Maarif Institute juga memberikan “Maarif Award” kepada individu maupun lembaga yang dinilai memberikan sumbangan kongkret terhadap penyebaran gagasan dan praktik inklusivitas, toleransi, demokrasi, pluralisme, keadilan sosial, HAM, dan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.

2. Program Penguatan Demokrasi dan *Good Governance*

Program bertujuan untuk menggalang dan menjalin kerjasama antar-organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat dan memastikan tegaknya demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Program mencakup kegiatan pelatihan dan *capacity building*, workshop, lokakarya, advokasi kebijakan publik. Program ini juga difokuskan untuk mendorong “kemarahan publik” terhadap praktik korupsi serta mengupayakan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (*good government*).

Organisasi

Pendiri : Ahmad Syafii Maarif
Haedar Nashir
Moeslim Abdurahman
Rizal Sukma
Jeffrie Geovannie
Suyoto

Dewan Pembina : M. Amin Abdullah
Abdul Munir Mulkhani
Clara Joewono
Ahmad Luthfi Assyaukanie
M. Deddy Julianto

Eksekutif

Direktur Eksekutif : Raja Juli Antoni

Program Pengembangan Kajian Islam

Koordinator : Fajar Riza Ul Haq
Asisten Program : Endang Tirtana

Program Demokrasi dan *Good Governance*

Koordinator : Joko Sustanto
Asisten Program : Ahmad Imam Mujadid Rais

Sekretaris Eksekutif : Muhammad Supriadi

Sekretaris Program : Siti Sarah Muwahidah

Capacity Building : Herizal Effendi

Specialist Keuangan : - Rahmanita
- Henny Ridhowati

Redaktur Pelaksana
Media MAARIF : Fauzi Fashri

Office Boy : Iwan Setiawan

Sopir : Irman Susanto

Alamat

Gedung Wisma Nusantara Lantai 7
Jl. MH. Thamrin No.59 Jakarta Pusat 10350
Telp. : 62 21 3914004
Fax. : 62 21 3914003
Web. : www.maarifinstitute.org
e-mail. : maarif@maarifinstitute.org

Rekening Bank

Yayasan Ahmad Syafii Maarif
Bank BNI 46 Kantor Cabang MH. Thamrin (Gedung Wisma Nusantara)
No. Rekening : 0114179273

MAARIF Istitute

Gedung Wisma Nusantara, Lantai 7
Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350

Telp. : 62 21 3914004

Fax.. : 62 21 3914003

Web : www.maarifinstitute.org
e-mail : maarif@maarifinstitute.org

ISBN: 978 - 979 - 97766 - 2 - 4